

SOSIAL EKONOMI PERTANIAN: SUATU PENGANTAR



Oleh:

Cakti Indra Gunawan, SE., MM., Ph.D
Karunia Setyowati Suroto, S.Pt., M.P
Anung Prasetyo Nugroho, SE.,MMA



Penerbit : UNITRI Press, Anggota IKAPI
Jalan Telagawarna, Tlogomas, Malang
Telp (0341) 565500 Fax (0341) 565522

SOSIAL EKONOMI PERTANIAN: SUATU PENGANTAR

Oleh : Cakti Indra Gunawan, SE., MM., Ph.D
Karunia Setyowati Suroto, S.Pt., M.P
Anung Prasetyo Nugroho, SE.,MMA

ISBN : 978-623-92030-4-7

Perancang sampul : Meva Ainawati
Penata Letak : Agung Wibowo
Penyunting : Dr. Cahyo Sasmito, SH, MSI
Pracetak dan Produksi : Ronasari MahajiPutri,S.KM.,M.Kes
Galuh Widhi Gumilar, S.Kom

SOSIAL EKONOMI PERTANIAN: SUATU PENGANTAR

Cetakan : I Maret -Malang
2020
vii : 178 hlm : Ukuran 25cm x 17,6cm

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
Dilarang mengutip, memperbanyak dan menterjemahkan
sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa ijin tertulis dari
penerbit.

Cetakan pertama : Maret 2020
Penerbit : **UNITRI Press**
 **Anggota IKAPI**
Jalan Telagawarna, Tlogomas, Malang
Telp (0341) 565500 Fax (0341) 565522

ISBN : 978-623-92030-4-7

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah buku yang berjudul **Sosial Ekonomi Pertanian: Suatu Pengantar**, dapat diselesaikan dengan baik. Penulis mengucapkan rasa syukur dan terima kasih kepada semua pihak yang telah mensupport terbitnya buku ini.

Ucapan terima kasih, penulis sampaikan kepada Rektor Universitas Tribhuwana Tunggaladewi, Bapak Prof. Dr. Ir. Eko Handayanto, MSc yang telah memberikan motivasi penulisan buku ini. Tidak lupa penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada Jajaran Sekolah Pascasarjana yang telah mendorong terealisasinya buku ini.

Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan kontribusi, kami ucapkan terima kasih.

Semoga buku ini bermanfaat bagi. Mahasiswa jenjang S1 dan S2 yang mengkaji Sosial Ekonomi Pertanian. Buku ini dapat dibaca juga oleh praktisi yang berkecimpung di bidang ekonomi dan pertanian.

Malang, Maret 2020

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR TABEL	vii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Pentingnya Sosial Ekonomi Pertanian	1
1.2 Ruang Lingkup Keilmuan	13
BAB 2 ASPEK SOSIAL EKONOMI	18
2.1 Pengertian Aspek Ekonomi dan Sosial	18
2.2 Dampak Aspek Ekonomi dan Sosial.....	19
2.3 Ringkasan	37
BAB 3 TEORI PERTANIAN	39
3.1 Definisi Pertanian	39
3.2 Teori Ekonomi Pertanian.....	42
3.3 Pembangunan Pertanian	53
3.4 Ringkasan	63
BAB 4 ASPEK PEMASARAN PERTANIAN	66
4.1 Pemasaran Pertanian.....	66
4.2 Tata Niaga Pertanian	76
4.3 Pemasaran Pertanian Berbasis Sistem Informasi	84
4.4 Contoh Kasus	85
4.5 Ringkasan	88

BAB 5 ASPEK PRODUK PERTANIAN	91
5.1 Definisi Produksi Pertanian	91
5.2 Unsur-Unsur Penting Produksi Pertanian.....	101
5.3 Permasalahan Produksi Pertanian	110
5.4 Contoh Kasus.....	114
5.5 Ringkasan	121
BAB 6 ASPEK MANAJEMEN KEUANGAN PERTANIAN	124
6.1 Manajemen Keuangan Pertanian.....	124
6.2 Kegiatan dalam Manajemen Keuangan Pertanian	136
6.3 Contoh Kasus.....	139
6.4 Ringkasan	147
BAB 7 SOSEK PERTANIAN DI ERA GLOBAL.....	149
7.1 Petani Modern (Industry 4.0).....	149
7.2 Contoh Pertanian Modern	155
7.3 Ringkasan	159
DAFTAR PUSTAKA	161
GLOSARIUM.....	171
INDEKS.....	173
TENTANG PENULIS	175

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Bagan Masyarakat Petani (Chayanov) (Irham & Mariyono, 2001).....	9
Gambar 1.2 Bagan Masyarakat Petani di Desa (Van Vollenhoven)	10
Gambar 3.1 Pendekatan Deduktif-Induktif dalam Kerangka Teori (Setiawan, Satria, & Tjitropranoto, 2019)	44
Gambar 3.2 Interaksi Konsumen dan Produsen.....	48
Gambar 4.1. Struktur, Perilaku, Kinerja Pasar	69
Gambar 4.2 Marketing Channel	73
Gambar 4.3 Marjin Pemasaran	74
Gambar 5.1 Perkembangan Produksi Jagung Indonesia Tahun 2006— 2011 (Sumber: BPS, 2006-2012)	102
Gambar 5.2 Perkembangan Produksi Padi Indonesia 2006-2011 (Sumber: BPS, 2006-2011)	102
Gambar 5.3 Perkembangan Luas Lahan di Indonesia.....	107
Gambar 5.4 Ekspor dan Impor Sektor Pertanian Desember 2013	112
Gambar 6.1 Pengertian Manajemen Sebagai Suatu Proses.....	125
Gambar 6.2 Kegiatan dalam Keuangan	130
Gambar 6.3 Keterkaitan Subsistem dalam Sistem Agribisnis.....	135
Gambar 6.4 Hubungan Tingkat Suku Bunga dan Investasi	144

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Perbandingan Masyarakat Primitif, Petani dan Petani Modern.....	7
--	---



BAB 1 PENDAHULUAN



1.1 Pentingnya Sosial Ekonomi Pertanian

Penerapan paradigma modernisasi yang mengutamakan prinsip efisiensi dalam pelaksanaan pembangunan pertanian menyebabkan terjadinya perubahan struktur sosial masyarakat petani di pedesaan. Berbagai proses pelaksanaan pembangunan, terutama industrialisasi, dalam jangka menengah dan panjang menyebabkan terjadinya perubahan struktur pemilikan lahan pertanian, pola hubungan kerja dan struktur kesempatan kerja, serta struktur pendapatan petani di pedesaan (Elizabeth, 2017).

Terkait dengan struktur pemilikan lahan, perubahan tersebut mengakibatkan terjadinya: (1) Petani lapisan atas; merupakan petani yang akses pada sumber daya lahan, kapital, mampu merespons teknologi dan pasar dengan baik, serta memiliki peluang berproduksi yang berorientasi keuntungan; dan (2) Petani lapisan bawah; sebagai golongan mayoritas di pedesaan yang merupakan petani yang relatif miskin (dari segi lahan dan kapital), hanya memiliki faktor produksi tenaga kerja (Dewi & Rudianto, 2013); (Nuraedah, 2018). Untuk memenuhi kebutuhan berproduksi, kedua lapisan masyarakat petani tersebut terlibat dalam hubungan kerja yang kurang seimbang. Lebih seabad lamanya struktur masyarakat pertanian Indonesia dalam kondisi sangat timpang. Lebih 80% petani berlahan kurang dari 1 ha per-KK. Lebih dari 50% jumlah petani berlahan sempit ini, menguasai hanya 21 % dari keseluruhan lahan pertanian.

Sementara itu sekitar 20% sisanya, menguasai lebih dari 50% keseluruhan lahan pertanian (petani berlahan luas) (Prabowo, Wijayanti, & Saddaruddin, 2018). Menilik sejarah perkembangannya, di Indonesia telah terjadi pergeseran pola pengusahaan lahan ke arah yang lebih intensif sebagai imbas adopsi teknologi di bidang pertanian, yang relatif berbeda antar agroekosistem, jenis komoditas, dan wilayah.

Terjadi penyusutan lahan pertanian produktif akibat pesatnya perkembangan pembangunan di berbagai sektor ekonomi yang menuntut ketersediaan lahan dan sarana prasarana yang memadai. Kondisi ini terutama terjadi di Jawa, dimana Dewi & Rudianto (2013), mengestimasi rata-rata 23.100 hektare per tahun lahan di Jawa terkonversi ke penggunaan di luar pertanian. Gejala marginalisasi petani dan kemunduran perekonomian pedesaan menjadi sulit terelakkan. Dalam proses pembangunan pertanian (seperti revolusi hijau), dalam konteks sosiologi pedesaan, petani sebagai “wong cilik” malah sesungguhnya tidak terlibat, karena revolusi hijau justru ‘meninggalkan’ kaum petani. Dengan pendekatan teori dependensi, terbukti bahwa telah terjadi proses ketergantungan petani terhadap pupuk sebagai dampak dari program pemupukan intensif dan pemakaian bibit unggul dalam program Bimas, Insus sampai Supra-Insus, sehingga terjadi penurunan (keterbelakangan) penghasilan petani. Dalam hal ini, bisa jadi petani hanya merupakan korban pembangunan pertanian tersebut (Muta’ali, 2004).

Meski demikian, tidak dipungkiri bahwa di sisi lain, terdapat berbagai dampak positif revolusi hijau, dimana program tersebut setidaknya berusaha melibatkan petani kecil yang diupayakan agar mampu mengadopsi berbagai program pembangunan pertanian. Bahkan proporsi mendasar yang hendak dijangkau adalah petani dengan luasan lahan <0,5 ha. Hariadi (2011) menegaskan bahwa pembangunan pertanian yang dilaksanakan pemerintah salah satunya mampu membawa hasil swasembada beras bagi negara Indonesia pada tahun 1984. Dikemukakan pula bahwa, terjadinya ketimpangan penguasaan lahan dan pendapatan salah satunya lebih dikarenakan perbedaan akses antar golongan petani terhadap modal dan teknologi (terkait kemampuan SDM antar wilayah/lokasi).

Sementara itu, proses polarisasi yang sangat cepat yang dialami masyarakat petani disebut *White* sebagai proses eksploitasi (penghisapan) dari golongan kapitalis terhadap masyarakat di bawahnya. Petani, dari segi ekonomi, dilihat berdasarkan kemampuan mereka untuk dapat menghasilkan pendapatan berdasarkan sekian liter beras. Dari segi struktur sosial, petani merupakan kelompok masyarakat dengan klasifikasi paling bawah, seperti juga halnya para nelayan (Indarti, Luthfi, & Kismini, 2016). Hal ini turut dipacu oleh pertumbuhan populasi (angkatan kerja, migrasi) dan perkembangan teknologi, akhirnya menempatkan kaum petani pada posisi yang lemah.

Penetrasi ekonomi kapitalis ke pedesaan berupa penerapan teknologi modern dan sistem pasar yang mengutamakan efisien serta perubahan nilai ekonomi lahan, menyebabkan tingginya konversi tanah dari pertanian ke non-pertanian. Hal ini mengakibatkan hilangnya kesempatan bertani bagi sebagian besar buruh tani, serta semakin longgarnya ikatan-ikatan sosial yang terjalin dalam masyarakat pedesaan. Dampak sosiologis lain ekonomi kapitalis tersebut mempengaruhi tujuan produksi petani, strategi, nilai dan norma, serta orientasi hidup, bahkan kemungkinan untuk terjadinya proses depeasantisasi akibat makin merembaknya iklim konsumtif yang merambah hingga ke pedesaan (Junaedi, Setyawan, & Soepatini, 2016).

Berbagai perubahan yang muncul setidaknya menunjukkan keterkaitan petani dengan globalisasi sistem ekonomi dunia, sebagai akibat proses adaptasi ketika mereka terintegrasi dalam sistem ekonomi global, serta mempengaruhi sistem ekonomi, sosial, dan budaya. Hal ini juga mencerminkan perubahan sosial petani yang masih dinaungi dimensi *structural*.

Petani di Indonesia mayoritas merupakan petani kecil dengan penguasaan dan pengusahaan lahan yang relatif sempit (< 0,25 ha). Keterbatasan tersebut pada dasarnya bercirikan antara lain: (1) sangat terbatasnya penguasaan terhadap sumber daya; (2) sangat menggantungkan hidupnya pada usahatani; (3) tingkat pendidikan yang relatif rendah; dan (4) secara ekonomi, mereka tergolong miskin (Indarti et al., 2016). Sebagai masyarakat mayoritas yang hidup di pedesaan, petani merupakan masyarakat yang tidak primitif, tidak pula modern. Masyarakat petani berada

di pertengahan jalan antara suku-bangsa primitif (*tribe*) dan masyarakat industri. Mereka terbentuk sebagai pola-pola dari suatu infrastruktur masyarakat yang tidak bisa dihapus begitu saja. Dari perjalanan sejarah, kaum petani pedesaan (*peasantry*) memiliki arti penting karena di atas puing-puing mereka masyarakat industri dibangun. Mereka mendiami bagian “yang terbelakang” (di masa kini) dari bumi ini (Djoni & Rohman, 2010).

Oleh sejumlah penulis, masyarakat petani di pedesaan dipandang sebagai fenomena (yang jelek) dan memperlakukannya sebagai agregat-agregat tanpa bentuk, tanpa struktur, masyarakat tradisional, serta mengecap mereka sebagai manusia-manusia yang ‘terikat tradisi’ (kebalikan dari ‘modern’). Masyarakat luar desa, pertama-tama memandang kaum petani pedesaan sebagai satu sumber tenaga kerja dan barang yang dapat menambah kekuasaannya (*fund of power*). Padahal kenyataannya, petani juga merupakan pelaku ekonomi (*economic agent*) dan kepala rumah tangga; dimana tanahnya merupakan ‘satu unit ekonomi dan rumah tangga’ (Nurif & Mukhtar, 2010).

Sajogyo mengartikan masyarakat petani sebagai masyarakat tradisional. Konteks ini hendaknya dinilai bukan semata-mata sebagai ‘sumberdaya peng-usahatani-an’ atau ‘buruh tani’ yang punya ‘nilai tukar’, penghasil ‘nilai tambah’, tetapi seharusnya diakui sebagai manusia, yang berpeluang untuk mendidik diri (‘rekayasa’ diartikan sebagai upaya membina hak-hak azasi manusia). Sistem ekonominya disebut ”sistem usahatani keluarga”. Petani tidak homogen, melainkan ada yang kaya, menengah, petani gurem, serta bersifat dinamis. Menurutnya,

sedikitnya empat ciri utama dalam masyarakat petani, yaitu: (1) satuan rumah tangga (keluarga) petani adalah satuan dasar dalam masyarakat yang berdimensi ganda; (2) petani hidup dari usahatani dengan mengolah tanah; (3) pola kebudayaan petani berciri tradisional dan khas; dan (4) petani menduduki posisi rendah dalam masyarakat sebagai “wong cilik” (orang kecil) terhadap level masyarakat di atas desa (Irham & Mariyono, 2001).

Pada masa kini petani merupakan masyarakat yang memiliki kemampuan mengadopsi perkembangan teknologi pertanian. Hal ini terlihat pada perkembangan agribisnis komoditi pertanian, seperti hortikultura, perkebunan rakyat (kopi, coklat, panili, dan lain-lain), dan peternakan komersial salah satunya melalui program *integrated farming system*. Keadaan tersebut dicapai berkat perkembangan sarana dan prasarana infrastruktur yang mendukung makin terbukanya akses petani terhadap teknologi pertanian dan kebutuhan pasar modern.

Akses petani di pedesaan juga sudah terbuka melalui perkembangan teknologi komunikasi dan transportasi yang sudah mencapai pelosok pedesaan. Ave mengemukakan pengertian petani dari sisi mata pencaharian (Raharjo, Muta'ali, Hardoyo, Sudrajat, & Harini, 2014). Pada awalnya manusia memulai mata pencaharian dari meramu dan berburu, yang berubah menjadi peladangan berpindah, kemudian menjadi daerah peladangan menetap. Daerah ini kemudian berkembang menjadi daerah pertanian dengan menggunakan peralatan sederhana. Akhirnya, dengan berkembangnya sistem pengairan (irigasi) dan teknologi di bidang pertanian, berkembang kehidupan sosial bermasyarakat

dan membentuk suatu lingkungan hidup, meningkatkan intensitas hidup dan berinteraksi di antara masyarakatnya. Sementara itu, (Marphy & Priminingtyas, 2019) mendefinisikan petani sebagai orang yang bermata pencaharian dengan bercocok tanam di tanah. (Marphy & Priminingtyas, 2019), mengkaji petani secara antropologis atau historis, dari manusia primitif hingga menjadi petani modern. Berdasarkan pemikiran dari berbagai ahli, perbandingan metamorphosis petani dikemukakan pada Tabel 1.

Tabel 1 Perbandingan Masyarakat Primitif, Petani dan Petani Modern

Primitif (<i>Tribe</i>)	Petani (<i>Peasant</i>)	Petani Modern (<i>Farmer</i>)
• Bertani Berpindah	• Bertani tetap	• Rumah kaca
• Kebutuhan primer dan kerabat	• Subsisten	• Keuntungan maksimum
• Ada ikatan dengan tetangga	• Ada ikatan nilai-nilai	• Hubungan longgar dalam symbol
• Surplus diserahkan ke golongan	• Surplus diserahkan ke penguasa	• Surplus sebagai keuntungan
• Intensitas hubungan dengan luar rendah	• Intensitas hubungan dengan luar negeri	• Mobilitas tinggi
• Belum ada spesialis	• Semi spesialisasi atau campuran	• Spesialisasi/professional
• Belum ada sewa tanah	• Sudah ada sewa tanah	• Cenderung sewa

Sumber: Direduksi dari (Muta'ali, 2004) dan (Prabowo et al., 2018)

Pada era globalisasi, perbandingan masyarakat petani industri/tradisional, semi komersial atau komersial (modern) tidak lagi ditentukan oleh jenis pekerjaan/mata pencahariannya semata, melainkan lebih ditentukan kualitas sumber daya manusianya. Kualitas ini dapat dikaji antara lain melalui: (1) sejauh mana visi dan misi kehidupannya di masa kini dan masa mendatang; serta (2) investasi di bidang pangan, gizi, dan kesehatan, serta investasi di bidang pendidikan. Namun pada dasarnya, dunia petani merupakan satu dunia yang teratur, yang memiliki bentuk-bentuk organisasi yang khas meskipun tidak tampak dari tingkat atas tatanan sosial. Dunia mereka bukanlah *amorphous* (tanpa bentuk) yang seolah hanya ruang kosong, yang hanya membutuhkan masukan modal industri dan ketrampilan untuk dapat membuatnya bergerak.

Chayanov menjelaskan karakteristik fundamental pertama dari ekonomi usaha tani (*farm economy*) petani yang merupakan suatu perekonomian keluarga (*family economy*) (Raharjo et al., 2014). Dalam perekonomian petani dinyatakan unsur-unsur biaya produksi tidak dapat diperbandingkan dengan yang terdapat dalam perekonomian kapitalis. Oleh karena itu, cara penghitungan laba tidak dapat sepenuhnya diterapkan pada perekonomian petani. Masalah petani adalah fakta yang menarik, sebab mencari keseimbangan antara tuntutan dunia luar dan kebutuhan petani akan berlangsung selamanya; dimana hasil yang mereka peroleh adalah dari seluruh tahun kerja, bukan dari hari kerja (unit kerja).



*Gambar 1.1 Bagan Masyarakat Petani (Chaynov)
(Irham & Mariyono, 2001)*

Mencermati Gambar 1.1, aliran Marxian melihat akses perekonomian dan pemilikan sumber daya petani dengan mengkategorikan atas petani kaya dan petani miskin. Aliran antropologis mengkaji masyarakat petani dari sisa-sisa peninggalan dan keterbelakangan kebudayaannya. Chaynov mengkaji perkembangan masyarakat petani dengan usahatani keluarga, subyektifitas garapan terhadap keseimbangan perekonomian petani, dan jangkauan petani yang makin terbuka terhadap berbagai akses pembangunan.



*Gambar 1.2 Bagan Masyarakat Petani di Desa (Van Vollenhoven)
(Irham & Mariyono, 2001)*

Sementara itu, Van Vollenhoven (Gambar 1.2) menggambarkan masyarakat petani sebagai masyarakat desa yang dilatarbelakangi kesatuan agroekosistem (alam/geografi) dan kebudayaan. Kesatuan lingkungan geografisnya terutama terkait dengan penguasaan dan pengusahaan sumberdaya lahan. Sedangkan kesatuan kebudayaan (kultural) meliputi berbagai aturan-aturan sosial yang berlaku dalam masyarakat petani tersebut. Berbagai aturan tersebut antara lain meliputi aturan adat, penduduk asli, tanah, lahan garapan, hubungan kekeluargaan, dan kehidupan ekonomi masyarakat (rakyat) desanya.

Pembentukan kelompok tani yang diatur oleh Surat Edaran Menteri pertanian, membuatnya cenderung merupakan kelompok formal. Hal ini berdampak, kelompok tani yang semula bersifat kelompok sosial (social groups) terpaksa berkembang menjadi

kelompok tugas (task groups), karena terlampau banyaknya intervensi luar terhadap kelompok tani tersebut. Selain itu pembentukan kelompok tani lebih diarahkan untuk memudahkan pelaksanaan tugas pemerintah menyalurkan sarana produksi kepada petani, yang memang lebih mudah dikoordinasikan dalam satuan kelompok dibanding perseorangan petani. Hasil penelitian berkenaan dengan pengorganisasian petani, ditemukan bahwa tindakan kolektif melalui organisasi formal seharusnya hanya dipandang sebagai sebuah opsi belaka, sehingga tak dipandang sebagai suatu keharusan (Dewi & Rudianto, 2013). Selain itu penting untuk memperhatikan keberadaan institusi sosial lokal dan modal sosial lokal karena telah berdampak positif pada upaya peningkatan dan pemberdayaan masyarakat miskin perdesaan (Junaedi et al., 2016).

Permasalahannya adalah kelompok-kelompok tani penerima dana bantuan program PUAP tersebut sulit berkembang sesuai harapan, sehingga tidak mampu mendukung pencapaian tujuan program. Salah satunya terjadi pada Kelompok tani ‘Arfak’ yang menerima dana program PUAP di Kampung Hanghouw Distrik Tanah Rubu. Bagi masyarakat suku Arfak tindakan kolektif hanya terjadi dalam aktifitas yang berkaitan dengan urusan menyangkut kekerabatan keluarga besar (klan/marga).

Kuatnya pengaruh adat dalam aktifitas masyarakat turut mempengaruhi pengambilan keputusan individu dalam menjalin suatu relasi (Djoni & Rohman, 2010). Ini jelas terlihat dengan adanya konsep Igya ser hanjob atau hanjop (dalam bahasa Hattam/Moule) atau Mastogow hanjob (dalam bahasa Sougbb).

Igya dalam bahasa Hattam berarti berdiri, ser artinya menjaga dan hanjob berarti batas. Secara harfiah Igya ser hanjob mengandung makna berdiri menjaga batas namun batas disini bukan hanya bermakna sebagai suatu kawasan, namun secara luas bermakna mencakup segala aspek kehidupan masyarakat (Indarti et al., 2016). Dalam konsep ini terkandung nilai-nilai adat yang membatasi ruang gerak individu dalam menjalin relasi dan interaksi dengan sesamanya maupun lingkungannya.

Realitas sosial masyarakat khususnya petani yang tergambar diatas menurut Berger dan Luckmann dalam (Elizabeth, 2017), merupakan pengetahuan yang bersifat keseharian yang hidup dan berkembang dimasyarakat, seperti konsep, kesadaran umum, wacana publik, sebagai hasil dari konstruksi sosial. Dengan kemampuan dialektis, di mana terdapat tesa, anti tesa dan sintesa, Berger memandang di dalam masyarakat petani terjadi dialektika antara diri (*the self*) dengan dunia sosio-kultural. Dialektika itu berlangsung dalam suatu proses dengan tiga “momen” simultan, yakni eksternalisasi, objektivasi dan internalisasi. Tiga momen dialektika ini memunculkan suatu proses konstruksi sosial (Marphy & Priminingtyas, 2019). Konstruksi sosial sebenarnya memiliki arti yang sangat luas dalam ilmu sosial. Hal ini biasanya dihubungkan dengan pengaruh sosial dalam pengalaman hidup setiap individu (Raharjo et al., 2014).

1.2 Ruang Lingkup Keilmuan

Makna ekonomi pertanian bermula dari kemampuan disiplin ilmu ini untuk memecahkan permasalahan di bidang pertanian dengan menggunakan prinsip-prinsip ekonomi. Teori permintaan dan penawaran di bidang pertanian akan dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan apa jenis bahan makanan yang harus diproduksi, dan berapa banyak yang harus diproduksi, agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat suatu daerah atau negara akan bahan makanan (Nuraedah, 2018). Selain itu, teori ekonomi juga dapat digunakan sebagai alat untuk menjelaskan mengapa harga produk-produk pertanian naik atau turun selama periode waktu tertentu, mengapa harga yang dibayar oleh konsumen lebih tinggi daripada harga yang diterima oleh petani, dan masih banyak pertanyaan-pertanyaan lainnya yang dapat dijelaskan jawabannya berlandaskan pada teori ekonomi.

Selain petani yang dapat bertindak sebagai produsen dari produk-produk pertanian sekaligus sebagai konsumen atas produk-produk pertanian, pemerintah juga berkepentingan terhadap hasil analisis ekonomi pertanian. Produksi, konsumsi dan pertukaran produk-produk pertanian memerlukan campur tangan pemerintah agar kebutuhan dalam negeri akan produk-produk pertanian dapat terpenuhi. Campur tangan pemerintah dalam kegiatan ekspor, yang dimaksudkan untuk memperoleh devisa yang dapat digunakan untuk membiayai impor atas barang dan jasa, yang tidak dapat dihasilkan di dalam negeri, dapat dilakukan melalui seperangkat kebijakan ekspor dan impor (Hariadi, 2011).

Semuanya ini akan dapat berjalan dengan baik bila didasarkan pada informasi yang akurat dengan menggunakan analisis ekonomi pertanian. Aplikasi ilmu ekonomi pada bidang pertanian memerlukan cabang ilmu lainnya agar dapat memberikan penjelasan yang lengkap dan penyelesaian terhadap permasalahan yang ada di bidang pertanian. Tujuan utama dari berbagai pendekatan teori ekonomi untuk bidang pertanian adalah meningkatkan peranan pertanian dalam pembangunan perekonomian suatu negara.

Setiap saat kita selalu dihadapkan pada pilihan-pilihan ekonomi. Setiap individu harus memilih barang-barang, jasa-jasa dan kegiatan-kegiatan yang terbaik. Di sisi lain kita dihadapkan pada keterbatasan sumber daya yang akan digunakan untuk memperoleh barang, jasa dan kegiatan yang kita inginkan. Permasalahannya adalah bagaimana kita menggunakan sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas yang biasa disebut juga sebagai proses ekonomi.

Sejak kecil kita sebenarnya sudah biasa melakukan pilihan di antara dua atau lebih kegiatan: apakah pergi dengan ayah ke rumah saudara atau pergi dengan ibu ke pertokoan (Muta'ali, 2004). Membuat pilihan seperti itu merupakan keputusan ekonomi karena memilih kegiatan yang satu berarti harus mengorbankan kegiatan yang lainnya. Saat tumbuh menjadi dewasa, keputusan-keputusan ekonomi menjadi lebih kompleks misalnya menempuh pendidikan di perguruan tinggi atau bekerja, membeli traktor atau membeli ternak, memperbaiki rumah atau memperluas lahan yang akan disewa.

Dalam hal ini secara terus menerus tanpa disadari kita telah menerapkan ekonomi sebagai seni, meskipun kita tidak mempelajari atau memahami ilmu ekonomi. Ahli di bidang pertanian, pelaku agribisnis, kepala pemerintahan setiap saat juga dihadapkan pada permasalahan ekonomi. Mempelajari penerapan prinsip-prinsip ekonomi di bidang pertanian tidak menjamin keberhasilan pengambilan keputusan ekonomi, tetapi akan memberikan pemahaman tentang proses ekonomi dan mengarahkan pengambilan keputusan ekonomi yang lebih baik (Prabowo et al., 2018).

Karena setiap individu harus melakukan tindakan ekonomi setiap waktu, maka pemahaman mengenai praktek ekonomi akan lebih banyak daripada pemahaman tentang teori ekonomi. Setiap waktu kita menggunakan gagasan atau konsep-konsep dan istilah-istilah ekonomi, seperti permintaan (*demand*), penawaran (*supply*), kesejahteraan (*wealth*), harga (*price*), persaingan (*competition*). Oleh karena itu, untuk mengetahui area disiplin ekonomi pertanian perlu dipahami terlebih dahulu arti atau definisi dari ilmu ekonomi dan ekonomi pertanian itu sendiri.

Berikut ini akan dijelaskan mengenai definisi kedua bidang ilmu tersebut. Menurut Junaedi et al (2016), untuk mendefinisikan ilmu ekonomi kita harus mempertimbangkan empat hal, yaitu:

1. tidak terbatasnya keinginan manusia;
2. terbatasnya sumber daya;
3. alokasi sumber daya;
4. jangka waktu.

Dengan mengombinasikan keempat hal tersebut maka ilmu ekonomi dapat didefinisikan sebagai studi tentang bagaimana masyarakat, baik individu maupun kelompok, mengalokasikan sumber daya-sumber daya yang terbatas di antara berbagai keinginan untuk memaksimalkan kepuasan pada waktu tertentu.

Menurut Nurif & Mukhtar (2010), ilmu ekonomi merupakan ilmu yang digunakan untuk menganalisis penggunaan sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan dasar. Seperti halnya dengan disiplin ilmu pada umumnya, diperlukan keahlian dalam menggunakan prinsip-prinsip ekonomi untuk memecahkan berbagai permasalahan. Aplikasi-aplikasi tersebut meliputi:

1. Menentukan alternatif cara penggunaan sumber daya;
2. Memenuhi berbagai kebutuhan dan keinginan pada berbagai tingkat preferensi;
3. Berkaitan dengan butir 1 dan 2, berarti ilmu ekonomi mempelajari perilaku manusia antara lain pengambilan keputusan yang terbaik tentang penggunaan sumber daya.

Dengan demikian, ilmu ekonomi merupakan ilmu yang berkenaan dengan upaya pemenuhan kebutuhan jasmani yang tidak berhubungan langsung dengan uang. Selanjutnya dikemukakan bahwa secara umum, ilmu ekonomi berguna untuk membantu masyarakat suatu negara untuk memilih barang dan jasa yang lebih baik, barang dan jasa yang lebih banyak dan kualitas (taraf) hidup yang lebih tinggi.

Berdasarkan uraian di atas dan pengertian mengenai ilmu ekonomi, maka ekonomi pertanian dapat didefinisikan sebagai ilmu sosial terapan, yang prinsip-prinsip dan metode analitis ilmu ekonomi digunakan untuk mencari solusi bagi permasalahan ekonomi dalam bidang pertanian.

Pada umumnya terdapat dua jenis permasalahan yang dihadapi oleh para ahli di bidang pertanian. Pertama, ahli ekonomi pertanian harus mampu menentukan kebutuhan dan keinginan konsumen. Kedua, ahli ekonomi pertanian harus menghadapi persoalan produksi dan distribusi produk-produk pertanian. Secara tradisional, ahli ekonomi pertanian lebih berorientasi pada dua jenis permasalahan tersebut. Saat ini, ekonomi lebih berorientasi pada konsumen sehingga ahli ekonomi pertanian dituntut untuk mencoba lebih memahami keinginan-keinginan konsumen.



BAB 2 ASPEK SOSIAL EKONOMI



2.1 Pengertian Aspek Ekonomi dan Sosial

Setiap usaha yang dijalankan, tentunya akan memberikan dampak positif dan negatif. Dampak positif dan negatif ini akan dapat dirasakan oleh berbagai pihak, baik bagi perusahaan itu sendiri, pemerintah, ataupun masyarakat luas (Elizabeth, 2017). Dalam aspek ekonomi dan sosial dampak positif yang diberikan dengan adanya investasi lebih ditekankan kepada masyarakat khususnya dan pemerintah umumnya.

Bagi masyarakat adanya investasi ditinjau dari aspek ekonomi adalah akan memberikan peluang untuk meningkatkan pendapatannya. Sedangkan bagi pemerintah dampak positif yang diperoleh adalah aspek ekonomi memberikan pemasukan berupa pendapatan baik bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah (Kurniati, 2014). Lebih dari itu yang terpenting adalah ada yang mengelola dan mengatur sumber daya alam yang belum terjamah. Sebaliknya, dampak negatif pun tidak akan terlepas dari aspek ekonomi, misalnya pekerja dari luar daerah sehingga mengurangi peluang bagi masyarakat sekitarnya (Dewi & Rudianto, 2013).

Dampak positif dari aspek sosial bagi masyarakat secara umum adalah tersedianya sarana dan prasarana yang dibutuhkan, seperti pembangunan jalan, jembatan, listrik dan sarana lainnya. Kemudian bagi pemerintah dampak negatif dari aspek sosial adanya perubahan demografi di suatu wilayah, perubahan budaya dan kesehatan masyarakat. Dampak negatif dalam aspek sosial

termasuk terjadinya perubahan gaya hidup, budaya, adat istiadat dan struktur sosial lainnya (Prabowo, Wijayanti, & Saddaruddin, 2018).

Jadi, dalam aspek ekonomi dan sosial yang perlu di telaah apakah jika usaha atau proyek dijalankan akan memberikan manfaat secara ekonomi dan sosial kepada berbagai pihak atau sebaliknya. Oleh karena itu, aspek ekonomi dan sosial ini perlu dipertimbangkan, karena dampak yang akan ditimbulkan nantinya sangat luas apabila salah dalam melakukan penilaian. Diharapkan dari aspek ekonomi dan sosial, yang akan dijalankan akan memberikan dampak yang positif lebih banyak. Artinya, dengan berdirinya usaha atau proyek secara ekonomi dan sosial lebih banyak memberikan manfaat di bandingkan kerugiannya (Danar, Ali, & Nugroho, 2012).

2.2 Dampak Aspek Ekonomi dan Sosial

Secara garis besar dampak dari aspek ekonomi dengan adanya suatu usaha atau investasi, misalnya pendirian suatu pabrik, antara lain (Marphy & Priminingtyas, 2019):

1. Dapat meningkatkan ekonomi rumah tangga melalui :
 - a. Peningkatan tingkat pendapatan keluarga. Dengan adanya suatu investasi akan memberikan peningkatan kepada masyarakat, terutama bagi mereka yang dapat diterima bekerja di lokasi pabrik maupun mereka yang bekerja di luar lokasi pabrik dengan cara berdagang atau lainnya.

- b. Perubahan pola nafkah. Di beberapa wilayah kehadiran pabrik atau suatu usaha akan mengubah pola hidup masyarakat. Misalnya, semula masyarakat hidup dari pertanian, dengan kehadiran pabrik banyak yang beralih profesi menjadi karyawan pabrik.
- c. Adanya pola nafkah ganda. Bagi masyarakat di sekitar lokasi usaha di samping tetap mempertahankan pekerjaan semula seperti bertani, mereka juga bekerja sebagai karyawan, sehingga memperoleh penghasilan ganda.
- d. Tersedianya jumlah dan ragam produk barang dan jasa di masyarakat, sehingga masyarakat punya banyak pilihan untuk produk yang diinginkan. Banyaknya ragam produk dan jasa pada akhirnya akan meningkatkan kemasn, harga, mutu produk dan jasa, sehingga hal ini juga berpengaruh terhadap harga jual di pasaran.
- e. Membuka kesempatan kerja bagi masyarakat sekaligus mengurangi pengangguran, karena setiap proyek/usaha baru yang didirikan pasti akan membutuhkan tenaga kerja tambahan dan hal ini tentu saja akan membuka peluang bagi tenaga kerja yang belum mendapatkan pekerjaan atau masih menganggur.
- f. Tersedianya sarana dan prasarana dengan dibukanya suatu proyek atau usaha dapat pula memberikan fasilitas bagi masyarakat luas maupun pemerintah (Nurif & Mukhtar, 2010):



Gambar 2.1 Sarana dan Prasarana Umum

Menggal, mengatur dan menggunakan ekonomi sumber daya alam melalui (Djoni & Rohman, 2010):

- a. Pemilikan dan penguasaan sumber daya alam yang teratur, artinya kepemilikan diatur berdasarkan luas lahan, jangan sampai masyarakat kehilangan kesempatan. Demikian pula dengan penguasaan sumber daya alam juga diatur sedemikian rupa.
- b. Penggunaan lahan yang efisien dan efektif, penggunaan lahan yang benar-benar memberikan manfaat kepada berbagai pihak.
- c. Peningkatan nilai tambah sumber daya alam.
- d. Peningkatan sumber daya alam lainnya yang belum terjamah, terutama untuk wilayah-wilayah yang masih terisolasi.

2. Meningkatkan perekonomian pemerintah baik lokal maupun regional melalui (Arvianti & Abin, 2018):
 - a. Menambah peluang dan kesempatan kerja dan berusaha bagi masyarakat.
 - b. Memberikan nilai tambah proses manufaktur.
 - c. Menambah jenis dan jumlah aktivitas ekonomi nonformal di masyarakat.
 - d. Pemerataan pendistribusian pendapatan.
 - e. Menimbulkan efek ganda ekonomi.
 - f. Peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).
 - g. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
 - h. Menambah pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di daerah tertentu.
 - i. Menyediakan fasilitas umum yang sangat dibutuhkan masyarakat.
 - j. Menghemat devisa apabila produk dan jasa yang dihasilkan dapat mengurangi pemakaian impor dan jasa dari luar negeri.
 - k. Memperoleh pendapatan berupa pajak dari sumber-sumber yang dikelola oleh perusahaan, baik dari pendapatan penjualan maupun dari pajak lainnya. Meningkatkan devisa negara, jika produk atau jasa yang akan di produksi di buat untuk diekspor, baik untuk bahan baku maupun bahan jadi.

3. Pengembangan daerah

- a. Meningkatkan pemerataan pembangunan (dengan prioritas pembangunan di daerah tertentu). Biasanya untuk proyek-proyek tertentu pemerintah menetapkan wilayah atau daerah tertentu yang hanya di buka. Dengan tujuannya adalah untuk pemerataan pembangunan dan pembukaan wilayah yang selama ini terisolasi di seluruh wilayah Indonesia (Setiawan, Satria, & Tjitropranoto, 2019).
- b. Meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa, di mana setiap adanya proyek baru biasanya berdatangan tenaga kerja dari berbagai wilayah.
- c. Terbuka lingkungan pergaulan dengan adanya pembukaan suatu wilayah, tentu akan mengundang pendatang dari daerah lain, sehingga dengan demikian dapat terbina lingkungan pergaulan antar berbagai suku bangsa yang ada di Indonesia.
- d. Membuka isolasi wilayah dan cakrawala bagi penduduk. Daerah yang tadinya terpencil akan menjadi terbuka, begitu pula penduduk di sekitarnya menjadi lebih mengenal lingkungan sekitarnya sehingga membuka cakrawalanya.

Sedangkan dampak sosial dengan adanya suatu proyek atau investasi antara lain meliputi (Sulistyodewi Nur Wiyono, Utami, & Karyani, 2017):

1. Adanya perubahan demografi melalui terjadinya :
 - a. Perubahan struktur penduduk menurut kelompok umur, jenis kelamin, mata pencaharian, pendidikan dan agama.
 - b. Perubahan tingkat kepadatan penduduk.
 - c. Pertumbuhan penduduk, tingkat kelahiran, tingkat kematian bayi, dan pola migrasi.
 - d. Perubahan komposisi tenaga kerja baik tingkat partisipasi angkatan kerja maupun tingkat pengangguran.
2. Perubahan budaya yang meliputi terjadinya :
 - a. Kemungkinan perubahan kebudayaan melalui perubahan adat istiadat, nilai dan norma budaya setempat.
 - b. Terjadinya proses sosial baik proses asosiatif / kerja sama, proses disosiatif konflik sosial, akulturasi, asimilasi dan integrasi maupun sosial lainnya.
 - c. Perubahan pranata social / kelembagaan masyarakat di bidang ekonomi seperti (hak ulayat), pendidikan, agama dan keluarga.
 - d. Perubahan warisan budaya seperti perusahaan situs purbakala maupun cagar budaya.
 - e. Perubahan pelapisan sosial berdasarkan pendidikan, ekonomi, pekerjaan dan kekuasaan.

- f. Perubahan kekuasaan dan kewenangan melalui kepemimpinan formal dan informal, mekanisme pengambilan keputusan di kalangan individu yang dominan, pergeseran nilai kepemimpinan.
 - g. Perubahan sikap dan persepsi masyarakat terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan.
 - h. Kemungkinan terjadinya tingkat kriminalitas dan konflik antara warga asli dengan pendatang.
 - i. Perubahan adaptasi ekologis.
3. Perubahan kesehatan masyarakat meliputi terjadinya :
- a. Perubahan parameter lingkungan yang di perkirakan terkena dampak rencana pembangunan dan berpengaruh terhadap kesehatan.
 - b. Perubahan proses dan potensi terjadinya pencemaran.
 - c. Perubahan potensi besarnya dampak timbulnya penyakit, seperti peningkatan angka kesakitan dan angka kematian.
 - d. Perubahan karakteristik spesifik penduduk yang berisiko terjadi penyakit.
 - e. Perubahan sumber daya kesehatan masyarakat.
 - f. Perubahan kondisi sanitasi lingkungan.
 - g. Perubahan kondisi gizi masyarakat.
 - h. Perubahan kondisi lingkungan yang dapat mempermudah proses penyebaran penyakitnya.

Dapat disimpulkan bahwa dalam aspek ekonomi komponen yang penting untuk ditelaah di antaranya (Achyani, Sutanto, & Faliyanti, 2018):

1. Ekonomi rumah tangga (tingkat pendapatan, pola nafkah dan pola nafkah ganda).
2. Ekonomi sumber daya alam (pola kepemilikan dan penguasaan sumber daya alam, pola penggunaan lahan, nilai tanah sumber daya alam dan sumber daya alam lainnya).
3. Perekonomian lokal dan regional (kesempatan kerja dan berusaha, memberikan nilai tambah dan proses manufaktur, jenis dan jumlah aktivasi ekonomi nonformal, distribusi pendapatan, efek ganda ekonomi, Produk Domestik Regional Bruti (PDRB), Pendapatan Asli Daerah (PAD), pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, fasilitas sosial, aksesibilitas wilayah).
4. Pengembangan wilayah.

Sedangkan komponen sosial yang penting untuk di telaah di antaranya meliputi:



Gambar 2.2 Komponen Sosial

1. Komponen Demografi

Pemuda adalah aset nasional yang memerlukan penanganan secara baik dan hati-hati karena di tangan pemudalah pembangunan diharapkan akan diteruskan. Keberhasilan pembangunan pada masa mendatang antara lain ditentukan oleh kondisi atau kualitas sumber daya pemuda saat ini. Kualitas ini antara lain dapat diketahui dari hasil Sensus Penduduk 1990. Pemuda yang dimaksud dalam tulisan ini adalah penduduk usia 15-29 tahun (Suroso, Marimin, & Maharani, 2015). Di samping aspek kuantitatif yang pertumbuhannya cepat, kondisi kependudukan pada masa mendatang juga ditentukan oleh aspek kualitatif. Pengetahuan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia ini khususnya kelompok usia muda atau pemuda penting, mengingat kelompok ini sangat potensial. Tulisan ini mengungkapkan kualitas sumber daya pemuda di Indonesia, dilihat dari aspek demografi, sosial, dan ekonomi.

Sumber daya manusia, sumber daya alam, dan teknologi adalah tiga faktor pembangunan yang pokok. Penemuan para ahli menunjukkan bahwa peranan sumber daya manusia terhadap pembangunan, khususnya pembangunan ekonomi amatlah besar karena tanpa upaya pengembangan kualitas manusia, suatu negara tidak akan mampu mencapai tingkat perkembangan setinggi yang dicapai oleh negara-negara maju sekarang ini. Schultz (1962) dalam Junaedi, Setyawan, & Soepatini (2016) seorang sarjana ekonomi sumber daya manusia dari Amerika Serikat misalnya, menyimpulkan "Suatu peringkat pertumbuhan ekonomi mungkin saja dicapai dengan peningkatan modal konvensional, walaupun

tenaga kerja yang tersedia mempunyai keterampilan dan pengetahuan yang rendah, tetapi tingkat pertumbuhan yang dicapai amat terbatas.

Tidak mungkin suatu negara akan mengenyam hasil pertanian modern atau kemajuan industri modern yang pesat tanpa melakukan investasi besar-besaran dalam pengembangan sumber daya manusianya". Sumber daya manusia merupakan faktor yang amat penting dalam pembangunan ekonomi di Jepang dan Eropa Barat, yang mengalami kehancuran total pada Perang Dunia II, terutama disebabkan negara-negara tersebut telah memiliki sumber daya manusia yang mejnadai. "Keajaiban Korea" (*Korean Miracle*) dan "Keajaiban Taiwan" (*Taiwan Miracle*) dipandang sebagai *human resource based* karena pembangunan sumber daya manusia dilaksanakan lebih dahulu daripada pembangunan ekonomi (Suroso et al., 2015).

Sulistiyodewi et al (2017), misalnya, memperkirakan bahwa modal pendidikan di Korea Selatan dan Taiwan mencapai 40 % modal ekonomi nasional, 44% di Amerika Serikat, 29% di Inggris, dan hanya 6 sampai 17% di negara-negara Asia dan Afrika. Pencapaian pembangunan sosial yang lebih baik oleh Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dibandingkan dengan propinsi lainnya, diukur dari tingkat kematian bayi yang lebih rendah daripada rerata nasional, harapan hidup yang lebih tinggi, status gizi yang lebih baik, dan urutan ketiga pada PDRB per kapita, menurut Nurif & Mukhtar (2010) adalah karena pembangunan di DIY lebih menekankan pada pembangunan sumber daya manusia.

2. Komponen Budaya

Kemajuan ekonomi menjadi salah satu tujuan pembangunan yang merepresentasikan kesejahteraan masyarakat. Perspektif ekonomi cenderung mendominasi cara berpikir tentang definisi pembangunan dan kesejahteraan. Secara konseptual, pembangunan dapat disebut sebagai pertumbuhan dan perluasan, perubahan, perbaikan, serta transformasi dan modernisasi (Setiawan et al., 2019). Oleh karena itu, seringkali dimaknai bahwa sebuah kota yang maju adalah kota dengan laju pertumbuhan ekonominya tinggi sebagaimana diwujudkan dalam bentuk gedung-gedung pencakar langit, pusat-pusat perbelanjaan yang mewah, transportasi yang mewah, dan sebagainya.

Kota-kota seperti itu merupakan surga bagi masyarakat konsumtif seperti yang banyak ditemui pada kota-kota besar di Indonesia. Ternyata, pembangunan ekonomi juga merupakan suatu proses budaya karena ekonomi itu sendiri, merupakan bagian dari realitas budaya yang dapat membentuk *economic sense* sebagaimana disebutkan oleh Michael McPherson yang dikutip (Marphy & Priminingtyas, 2019). Dengan demikian, tak mengherankan bila pembangunan perkotaan di Indonesia dapat menyuburkan budaya konsumerisme bagi masyarakatnya ketika pembangunan ekonomi perkotaan lebih menitikberatkan pada realitas budaya tersebut.

Budaya konsumerisme kemudian mendorong masyarakat untuk mengkonsumsi berbagai produk yang melebihi kebutuhan dasar (Djoni & Rohman, 2010). Budaya konsumerisme mungkin dinilai sebagai budaya “buruk” yang juga memberikan pengaruh

pada pembangunan ekonomi suatu wilayah. Namun, banyak sekali budaya “baik” yang memberikan pengaruh pada pembangunan ekonomi secara signifikan. Peranan budaya dalam perekonomian saat ini mendapat perhatian utama dari ahli ekonomi dan dipercaya bahwa budaya ekonomi suatu wilayah merupakan alat yang berguna bagi pembangunan (Danar et al., 2012).

Faktanya, banyak aset budaya seperti keterampilan dan produk mendorong kesejahteraan masyarakat. Untuk memahami dampak budaya terhadap perekonomian, penting untuk mengetahui nilai-nilai dan norma-norma budaya yang ada diantara individu-individu dan aktifitas ekonominya (Kurniati, 2014). Salah satu hasil penelitian yang memberikan gambaran dampak budaya terhadap ekonomi adalah penelitian yang dilakukan sendiri oleh Farzaneh Chavoshbashi, Mohsen Ghadami, Zahra Broumand, dan Fatemeh Marzban yang dimuat dalam *African Journal of Business Management* Volume 6(26) yang terbit tahun 2012.

Penelitian ini menggunakan pendekatan sistem dinamik dan menarik untuk dikaji ulang, terutama mengkaji variabel-variabel yang digunakan dan kinerja model yang telah dibangun. Untuk mengkaji hasil penelitian ini, dilakukan studi kepustakaan dan analisis system thinking yang dibangun oleh Chavoshbashi dan kawan-kawan. Kaji ulang ini dapat menjadi pembelajaran dalam memahami interaksi nilai-nilai budaya dalam pembangunan dan konstruksi rekayasa sosial yang diperlukan untuk mencapai tujuan pembangunan. Kajian ini juga mengulas kaitan budaya dan komunikasi dengan pembangunan ekonomi.

Elizabeth (2017) mendefinisikan nilai sebagai konsepsi keinginan yang memandu cara pelaku sosial (seperti pemimpin organisasi, pembuat kebijakan, perorangan) memilih tindakan, menilai masyarakat dan kejadian, serta menjelaskan tindakan dan aksinya. Dalam pandangan tersebut, nilai merupakan kriteria atau tujuan lintas situasional (seperti keamanan dan hedonisme), diurut menurut kepentingan sebagai panduan kehidupan. Avrami et al. (2000) dalam Junaedi et al (2016) menganggap konsep nilai sebagai suatu keadaan intrinsik dan universal yang saat ini secara umum menjadi suatu konstruksi sosial yang lahir dari konteks budaya dalam suatu waktu dan tempat. Secara implisit atau eksplisit, nilai-nilai budaya merepresentasikan ide abstrak tentang apa itu barang, hak, dan keinginan dalam masyarakat (William 1970 dalam Suroso et al., 2015).

Nilai-nilai budaya ini (seperti kebebasan, kesejahteraan, keamanan) merupakan dasar bagi norma-norma khusus yang menunjukkan apa yang cocok pada situasi yang beragam. Fungsi lembaga sosial (seperti sistem keluarga, pendidikan, ekonomi, politik, agama), tujuan dan bentuk kegiatannya, mengekspresikan prioritas nilai-nilai budaya. Sebagai contoh, dalam masyarakat yang menilai pentingnya ambisi dan keberhasilan individu, organisasi ekonomi dan sistem hukumnya menjadi lebih kompetitif (seperti pasar kapitalis dan proses hukum adversarial).

Sebaliknya, sebuah budaya yang menekankan pada kesejahteraan kelompok diekspresikan dalam sistem hukum dan ekonomi yang lebih kooperatif (seperti sosialis dan mediasi) (Marphy & Priminingtyas, 2019). Potensi perubahan budaya dapat

dipahami dari perubahan konteks sosial ekonomi dunia sejak revolusi industri. Arvianti & Abin (2018) menilai sumber perubahan mendasar adalah penambahan jumlah penduduk dalam 10 tahun mulai dari tahun 1999 sampai dengan tahun 2009 sehingga penduduk dunia bertambah dari 6 miliar menjadi 6.8 miliar dan diperkirakan akan terus meningkat (tapi lebih lambat) sampai pertengahan abad 21. Pertumbuhan penduduk yang cepat merefleksikan keberhasilan modernisasi dan industrialisasi.

Hal tersebut menyebabkan suatu perbaikan kondisi material yang tidak pernah terpikir sebelumnya dalam kehidupan ratusan juta penduduk, dengan meningkatnya pendapatan, harapan hidup, kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan (Goklany 2007 dalam Setiawan et al., 2019). Karakteristik utama modernisasi dalam 250 tahun sejak revolusi industri adalah ekspansi tanpa henti, peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi, pertumbuhan industri dan perdagangan, dan ledakan penduduk dunia. Ekspansi merupakan salah satu prinsip dinamika modernisasi. Prabowo et al (2018) mencoba memberikan pemahaman yang sederhana dalam mendefinisikan nilai-nilai budaya dan pengaruhnya terhadap hasil-hasil ekonomi.

Menurut mereka, langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut adalah dengan mendefinisikan budaya dalam bentuk yang lebih sempit sehingga mudah mengenali hubungan kausal budaya dan hasil-hasil ekonomi. Untuk alasan tersebut, mereka mendefinisikan budaya sebagai kepercayaan dan nilai-nilai adat yang diturun-temurunkan oleh suku, agama, dan kelompok sosial dari generasi ke generasi. Walaupun tidak

mendalam, namun definisi ini fokus pada dimensi budaya yang dapat mempengaruhi hasil-hasil ekonomi. Di samping itu, dengan membatasi potensi pengaruhnya pada dua hal yaitu kepercayaan dan nilai atau kesukaan, definisi tersebut memberikan suatu pendekatan yang dapat mengenali pengaruh kausal dari budaya terhadap hasil-hasil ekonomi.

Untuk mengenali nilai-nilai budaya dalam pembangunan ekonomi, Mariano Grondona, seorang intelektual berkebangsaan Argentina, memberikan sebuah indikator tipologi budaya dan dirinci oleh Junaedi et al., (2016) (lihat Box-2) yang menjadi landasan teori yang dipertimbangkan oleh Chavoshbashi dan kawan-kawan dalam melakukan penelitian sebagaimana dijelaskan dalam tulisannya yang berjudul *Designing Dynamic Modelling for Measuring the Effect of Cultural Values on Iran's Economic Growth*. Chavoshbashi et al. (2012) menggunakan dua jenis nilai dan standar yang mengemukakan: nilai intrinsik dan nilai instrumental. Nilai intrinsik adalah nilai yang tidak memperhatikan manfaat dan bahayanya.

Nilai patriotik kadangkala harus dikesampingkan karena dapat berbahaya bagi kehidupan manusia. Sebaliknya nilai instrumental lebih bernilai karena bermanfaat secara langsung. Oleh karena itu, Chavoshbashi dan kawan-kawan mengasumsikan bahwa sebuah negara mendedikasikan kebijakannya dalam pembangunan ekonomi dengan titik berat pada kesempatan kerja, produktivitas, dan investasi. Mereka mengelompokkan tipologi budaya Grondona dalam lima kategori yaitu:

(1) nilai dan hasil yang berkaitan dengan kerja, (2) nilai-nilai universal, (3) nilai dan kepercayaan personal, (4) nilai-nilai tata kelola dan aturan, dan (5) nilai-nilai agama.

Berdasarkan hal tersebut, Chavoshbashi dan kawan-kawan mendefinisikan nilai-nilai budaya terdiri atas nilai-nilai individu dan nilai-nilai sosial. Nilai-nilai individu mencakup nilai kerja, kreativitas dan inovasi, etika, penghematan, kebahagiaan personal, kedisiplinan, keuntungan, dan pembelajaran. Nilai-nilai sosial meliputi rasa saling percaya, keadilan dan kesetaraan, tanggung jawab sosial, kerjasama, keterampilan interaktif, akuntabilitas, kesejajaran, taat hukum, dan hal lainnya. Mereka membuat pembobotan masing-masing nilai dengan teknik AHP (Analytical Hierarchy Process) dan menghitung nilai awal dengan menggunakan software VENSIM. Berdasarkan metode tersebut, mereka mendapatkan nilai tertinggi untuk nilai individu (nilai etika dan kebahagiaan personal) dan nilai sosial (keterampilan interaktif dan akuntabilitas).

A.

3. Kesehatan Masyarakat

Menurunnya Status Gizi Masyarakat

Masalah sosial ekonomi di dalam masyarakat salah satunya adalah kemiskinan yang sering melanda masyarakat Indonesia. Hal ini mengakibatkan penurunan daya beli masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pangannya, sehingga menyebabkan kurangnya konsumsi makanan bergizi yang berdampak pada penurunan status gizi.

Pengamatan Posyandu di Sulsel menemukan krisis ekonomi pangan pada balita dari 5,7 % pada tahun 1997 meningkat menjadi 14,9 % tahun 1999. Penurunan status gizi balita tersebut nyata sebagai akibat kekurangan kalori/protein sesaat, terbukti dari hasil penelitian : angka malnutrisi akut anak di bawah 2 tahun meningkat dari 9,9 % tahun 1997 menjadi 14,4 % tahun 1999. Penurunan status gizi akan mendatangkan berbagai masalah ikutan sebagai berikut:

- a. Menghambat pertumbuhan dan perkembangan fisik serta intelektual janin dan anak terutama anak balita. Kekurangan gizi pada janin dan balita dapat menimbulkan loss generation.
 - b. Kekurangan gizi pada ibu hamil dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan janin.
 - c. Kekurangan gizi pada ibu nifas menghambat produksi ASI.
 - d. Kekurangan gizi pada masyarakat dapat menurunkan daya tahan tubuh, memudahkan yang sehat menjadi sakit serta menghambat kesembuhan bagi yang sakit.
- B.

Menurunnya Akses pada Fasilitas Pelayanan

Mengingat prioritas pendapatan keluarga untuk membeli makanan, maka penyediaan biaya untuk pelayanan kesehatan mengalami penurunan. Hal ini diperbesar dengan meningkatnya tarif jasa pelayanan kesehatan khususnya pada fasilitas swasta. Akibatnya akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan menurun dengan tajam.

Menurunnya perhatian terhadap Lingkungan

C. Lingkungan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi status kesehatan. Dengan adanya krisis ekonomi sosial menyebabkan perhatian masyarakat terpusat pada kegiatan untuk mempertahankan hidup, sehingga perhatian terhadap lingkungan menurun. Akibatnya sanitasi rumah, lingkungan pemukiman, penyediaan air bersih mengalami penurunan yang tajam.

Menurunnya Partisipasi Masyarakat dalam berbagai Kegiatan yang Mendukung Kesehatan

D. Mengurangnya perhatian masyarakat tidak terbatas hanya pada lingkungan, tapi juga terhadap berbagai kegiatan yang mendukung kesehatan, misalnya: Posyandu, Pos KB, Pos Obat dan lain-lain.

Mengabaikan Perilaku Sehat

E. Keadaan krisis sosial ekonomi dapat menimbulkan kondisi pengabaian perilaku hidup sehat, misalnya : meningkatnya merokok, kebebasan seksual, makan tidak teratur dan lain-lain.

Munculnya Masalah Kesehatan Lain

F. Krisis sosial ekonomi dapat menimbulkan secara tak langsung masalah kesehatan lain, misalnya: meningkatnya stress, cidera akibat tindak kekerasan, penyakit hubungan seksual dan lain-lain.

2.3 Ringkasan

Pembangunan pertanian dan pedesaan kedepan merupakan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan petani di pedesaan yang bermuara pada pengembangan ekonomi lokal, hal ini karena meningkatnya produksi pertanian (agribisnis) selama ini belum disertai dengan peningkatan pendapatan petani. Petani sebagai unit agribisnis terkecil belum mampu meraih nilai tambah yang rasional sesuai skala usaha tani terpadu. Oleh karena itu persoalan membangun kelembagaan di bidang agribisnis sangat urgen untuk dilakukan, mengingat semakin lemahnya posisi tawar (*bargaining position*) petani dalam agribisnis. Penguatan kelembagaan agribisnis tidak hanya menyangkut *on farm bussiness* saja tetapi juga *off farm agribussiness*-nya.

Selama ini, pengembangan kelembagaan agribisnis pedesaan yang sudah diterapkan belum sepenuhnya menjawab persoalan. Pola kemitraan antara petani dan pengusaha agribisnis skala kecil dengan skala besar belum menunjukkan kinerja yang diharapkan dan tingkat kesinambungannya masih rendah. Secara umum model kemitraan pada pengembangan agribisnis belum memberikan manfaat secara optimal, sehingga seringkali timbul konflik dan berakhir dengan bubarnya kemitraan tersebut. Tidak berkembangnya pola kemitraan dalam pengembangan agribisnis karena secara filosofis belum dapat mempersatukan stakeholders dalam kerangka tujuan bersama yang memberikan manfaat secara proporsional.

Terpusatnya pembangunan perkotaan yang mempercepat arus urbanisasi ternyata memberikan banyak dampak negatif diantaranya, adalah terserapnya sumber daya alam dan sumber daya manusia dari perdesaan ke perkotaan. Arus urbanisasi yang tidak terkendali akan menurunkan daya dukung sektor pertanian terhadap kegiatan pembangunan di pedesaan. Semakin berkurangnya lahan pertanian yang beralih menjadi kawasan industri dan banyaknya tenaga kerja produktif yang mencari peluang kerja di perkotaan, semakin memperkecil ketersediaan tenaga kerja di perdesaan. Di samping itu juga akan menurunkan produktivitas pertanian yang mengakibatkan meningkatnya impor produk pertanian untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.

Disamping itu, kelembagaan agrobisnis selama ini masih banyak bersifat patronase, sehingga masih dijumpai eksploitasi antar pelaku agrobisnis dalam satu jaringan agribisnis baik secara terselubung, legal maupun terbuka. Dengan demikian kegiatan agrobisnis belum bersifat *integrative* dan sangat mungkin friksi antar kegiatan agrobisnis tidak bisa dihindarkan.



BAB 3 TEORI PERTANIAN



3.1 Definisi Pertanian

A.T Mosher (dalam Raharjo, Muta'ali, Hardoyo, Sudrajat, & Harini, 2014) mengartikan, pertanian adalah sejenis proses produksi khas yang didasarkan atas proses pertumbuhan tanaman dan hewan. Kegiatan-kegiatan produksi didalam setiap usaha tani merupakan suatu bagian usaha, dimana biaya dan penerimaan adalah penting. Tumbuhan merupakan pabrik pertanian yang primer. Ia mengambil gas karbondioksida dari udara melalui daunnya. Diambilnya air dan hara kimia dari dalam tanah melalui akarnya. Dari bahan-bahan ini, dengan menggunakan sinar matahari, ia membuat biji, buah, serat dan minyak yang dapat digunakan oleh manusia. Pertumbuhan tumbuhan dan hewan liar berlangsung di alam tanpa campur tangan manusia.

Beribu-ribu macam tumbuhan di berbagai bagian dunia telah mengalami evolusi sepanjang masa sebagai reaksi terhadap adanya perbedaan dalam penyinaran matahari, suhu, jumlah air atau kelembaban yang tersedia serta sifat tanah. Tiap jenis tumbuhan menghendaki syarat-syarat tersendiri terutama tumbuhnya pada musim tertentu (Irham & Mariyono, 2001). Tumbuhan yang tumbuh di suatu daerah menentukan jenis-jenis hewan apakah yang hidup di daerah tersebut, karena beberapa di antara hewan itu memakan tumbuhan yang terdapat di daerah tersebut, sedangkan lainnya memakan hewan lain.

Sebagai akibatnya didapati kombinasi tumbuhan dan hewan di berbagai dunia.

Pertanian terbagi ke dalam pertanian dalam arti luas dan pertanian dalam arti sempit (Wonogiri, 2019). Pertanian dalam arti luas mencakup :

1. Pertanian rakyat atau disebut sebagai pertanian dalam arti sempit.
2. Perkebunan (termasuk didalamnya perkebunan rakyat atau perkebunan besar).
3. Kehutanan.
4. Peternakan.
5. Perikanan (dalam perikanan dikenal pembagian lebih lanjut yaitu perikanan darat dan perikanan laut).

Sebagaimana telah disebutkan di atas, dalam arti sempit pertanian diartikan sebagai pertanian rakyat yaitu usaha pertanian keluarga di mana diproduksi bahan makanan utama seperti beras, palawija (jagung, kacang-kacangan dan ubi-ubian) dan tanaman-tanaman hortikultura yaitu sayuran dan buah-buahan. Pertanian rakyat yang merupakan usaha tani adalah sebagai istilah lawan dari perkataan “*farm*” dalam Bahasa Inggris. Pertanian akan selalu memerlukan bidang permukaan bumi yang luas yang terbuka terhadap sorotan sinar matahari (Wiranto, 2018).

Pertanian rakyat diusahakan di tanah-tanah sawah, ladang dan pekarangan. Di dalam pertanian rakyat hampir tidak ada usaha tani yang memproduksi hanya satu macam hasil saja. Dalam satu tahun petani dapat memutuskan untuk menanam tanaman bahan makanan atau tanaman perdagangan (Padmaningrum & Wibowo,

2010). Alasan petani untuk menanam bahan makanan terutama didasarkan atas kebutuhan makan untuk seluruh keluarga petani, sedangkan alasan menanam tanaman perdagangan didasarkan atas iklim, ada tidaknya modal, tujuan penggunaan hasil penjualan tanaman tersebut dan harapan harga.

Manusia membutuhkan energi untuk mempertahankan ketahanan tubuhnya. Nasi merupakan salah satu bahan makanan pokok yang mudah diolah, mudah disajikan, enak, lagi pula nilai energi yang terkandung di dalamnya cukup tinggi, sehingga berpengaruh besar terhadap aktivitas tubuh atau kesehatan. Padi merupakan bahan makanan yang menghasilkan beras. Menurut cara tanamnya, padi dapat dibagi menjadi padi sawah dan padi gogo. Padi sawah adalah padi yang ditanam di sawah dengan pengairannya sepanjang musim atau setiap saat. Sedangkan padi gogo adalah padi yang diusahakan di tanah tegalan kering secara menetap. Padi gogo diusahakan dengan menerapkan teknik budidaya seperti pengolahan tanah, pemupukan, dan pergiliran tanaman (Sumastuti, 2004).

A.T Mosher (dalam Irham & Mariyono, 2001) memberikan definisi farm sebagai suatu tempat atau bagian dari permukaan bumi di mana pertanian diselenggarakan oleh seorang petani tertentu apakah ia seorang pemilik, penyakap atau manajer yang digaji. Sedangkan usaha tani adalah himpunan dari sumber-sumber alam yang terdapat tempat itu yang diperlukan untuk produksi pertanian seperti tubuh tanah dan air, perbaikan-perbaikan yang telah dilakukan di atas tanah itu, sinar matahari, bangunan-bangunan yang didirikan di atas tanah dan sebagainya

(Sumastuti, 2004). Usaha tani dapat berupa usaha bercocok tanam atau memelihara ternak. Ciri yang sangat menonjol dalam sistem usahatani khususnya tanaman pangan adalah jaringan irigasi. Sedangkan ciri umum yang spesifik pada suatu wilayah antara lain adanya lahan yang selalu tergenang, lahan dataran tinggi dengan suhu yang sangat rendah, kondisi iklim yang kering atau basah. Bentuk umum sistem usahatani di Indonesia dapat dibedakan (Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Pertanian, 1990) antara lain (Suroso, Marimin, & Maharani, 2015):

1. Sistem usaha tani lahan sawah dengan tanaman padi sebagai tanaman utama, diselingi palawija, sayur-syuran atau tebu.
2. Sistem usaha tani lahan kering atau tegalan di mana padi gogo dan berbagai jenis tanaman palawija dan hortikultura sebagai komoditas pokok.
3. Sistem usaha tani lahan dataran tinggi banyak ditanami dengan sayur-sayuran dan beberapa jenis palawija dan sebagian varietas padi. Usaha tani perkebunan yang umumnya menanam berbagai jenis tanaman ekspor dan industri sebagai komoditas yang diusahakan.

3.2 Teori Ekonomi Pertanian

Ekonomi pertanian dapat diartikan sebagai penerapan teori ekonomi di bidang pertanian atau pendekatan secara teoritis terhadap permasalahan permasalahan dibidang pertanian (Achyani, Sutanto, & Faliyanti, 2018). Pada prinsipnya kutipan ini memberikan gambaran bagaimana ekonomi pertanian

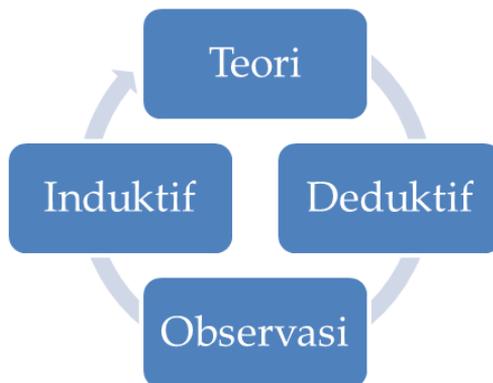
diorganisasikan dan diajarkan di berbagai perguruan tinggi di seluruh dunia. Meskipun polanya terus mengalami perubahan, program studi ekonomi pertanian sering kali ditempatkan dalam fakultas pertanian daripada dalam fakultas ekonomi. Implikasinya, para mahasiswa lebih difokuskan pada pengetahuan teknis tentang pertanian dan peternakan serta teori-teori dasar bidang pertanian. Selanjutnya, para dosen mengajarkan ilmu ekonomi agar mahasiswa dapat menerapkan teori ekonomi ke bidang pertanian.

Dalam arti yang sempit, ilmu ekonomi dianggap relevan untuk keberhasilan pelaksanaan bisnis di bidang pertanian. Berdasarkan pandangan ini, para mahasiswa yang diarahkan untuk berprofesi sebagai ahli bidang pertanian, pengelola dalam bidang pertanian, pelaku agribisnis dan agropolitis, perlu memahami ilmu ekonomi untuk diterapkan secara lebih luas dalam bidang pertanian (Sulistiyodewi Nur Wiyono, Utami, & Karyani, 2017). Dengan kata lain, para mahasiswa perlu memahami “pendekatan teoritis terhadap permasalahan ekonomi pertanian”. Suatu mata kuliah disusun dan diajarkan berdasarkan pada kerangka dasar pengetahuan yang mengarah pada teori.

Ada kalanya mahasiswa mempelajari teori (ilmu) murni dan pada saat yang lain mereka mempelajari teori yang diaplikasikan untuk memecahkan permasalahan tertentu (ilmu terapan). Dalam ekonomi pertanian, harus dipahami terlebih dahulu konsep-konsep atau teori ekonomi sebelum menggunakannya untuk memecahkan permasalahan di bidang pertanian. Perlu diketahui bahwa ilmu terapan mempunyai kegunaan yang lebih terbatas dibandingkan ilmu murni. Teori

merupakan kerangka pengetahuan umum yang berusaha menggambarkan fenomena tertentu. Teori dibangun melalui observasi (pendekatan induktif) dan pemikiran logis (pendekatan deduktif). Teori merupakan abstraksi dari dunia nyata (fakta) (Sulistiyodewi Nur Wiyono et al., 2017);(Achyani et al., 2018);(Wonogiri, 2019).

Kebenaran suatu teori adalah bagaimana teori tersebut dapat menggambarkan fakta dengan baik dan bagaimana kegunaan teori tersebut dalam memecahkan permasalahan dalam dunia nyata. Penggunaan kedua pendekatan ini dalam kerangka pengujian kebenaran teori secara ilmiah disajikan di Gambar 3.1.



Gambar 3.1 Pendekatan Deduktif-Induktif dalam Kerangka Teori (Setiawan, Satria, & Tjitropranoto, 2019)

Dalam usahanya menggambarkan fenomena tertentu, terdapat adanya keterbatasan yang mungkin disebabkan oleh keterbatasan yang melekat pada teori yang akan digunakan maupun keterbatasan pengguna. Keinginan mahasiswa untuk memahami perilaku manusia secara individual dalam rangka memenuhi kebutuhannya dibatasi oleh pemahaman mahasiswa itu sendiri tentang ilmu ekonomi.

Para ahli ekonomi juga sering kali dibatasi oleh kemampuan mereka dalam mengukur variabel-variabel ekonomi secara akurat. Sebagai contoh: bagaimana mengukur kepuasan? Mengukur variabel ini tidak semudah mengidentifikasi dan mengukur variabel dalam penelitian yang dilakukan di laboratorium. Pengamatan tentang perilaku manusia akan memberikan hasil yang umumnya berbeda dengan perilaku manusia yang sebenarnya (cenderung bias) (Arvianti & Abin, 2018).

Untuk memperkecil bias yang terjadi dan untuk mempermudah penerapan teori kedalam kehidupan nyata yang kompleks, diperlukan asumsi. Untuk menyederhanakan situasi dan hubungan yang kompleks, ilmuwan sering menggunakan asumsi-asumsi. Ahli fisika biasanya menggunakan asumsi “ruang hampa” dalam berbagai kegiatan penelitian mereka. Ahli ekonomi mengasumsikan bahwa tujuan suatu bisnis adalah memaksimalkan keuntungan. Tujuan dari penggunaan asumsi adalah untuk mengurangi jumlah variabel yang diteliti sehingga lebih mudah untuk menentukan hubungan di antara variabel yang diamati (Marphy & Priminingtyas, 2019). Karena ahli ilmu sosial jarang atau hampir tidak pernah melakukan penelitian di laboratorium seperti yang banyak dilakukan oleh ahli ilmu eksakta (misalnya fisika dan biologi) di mana variabel-variabel yang diamati lebih terukur dan bisa dikondisikan, maka ahli ilmu sosial membuat lebih banyak asumsi dibandingkan ahli ilmu eksakta.

Selain pendekatan induktif dan deduktif yang banyak digunakan dalam disiplin ilmu pada umumnya, ekonomi pertanian juga menggunakan pendekatan yang biasa digunakan dalam ilmu ekonomi, yaitu (Danar, Ali, & Nugroho, 2012): 1) mikro-makro sebagai bagian utama dari ilmu ekonomi umum, 2) konsumsi-produksi yang merupakan kegiatan pokok yang dilakukan dua pelaku utama dalam perekonomian yang paling sederhana, dan 3) positif-normatif sebagai pendekatan yang biasa digunakan dalam ilmu ekonomi umum. Berikut ini akan dijelaskan mengenai pendekatan-pendekatan tersebut.

1. Pendekatan Mikro-Makro

Dua bagian pokok dari ilmu ekonomi adalah mikro ekonomi dan makro ekonomi. Dalam dua bidang ilmu ini, ahli ekonomi mengamati dan mempelajari kegiatan-kegiatan ekonomi baik individu maupun kelompok. Dalam mikro ekonomi, dipelajari kegiatan konsumen dan produsen secara individual serta pasar yang merupakan interaksi antara konsumen dan produsen. Sedangkan makro ekonomi memperhatikan unit ekonomi sebagai suatu keseluruhan, yang menghadapi permasalahan yang lebih luas seperti pendapatan nasional (*national income*), kesempatan kerja (*employment*), tabungan (*savings*), investasi (*investment*) dan inflasi (*inflation*). Secara umum, ahli ekonomi pertanian mempelajari pengorganisasian bisnis di bidang pertanian secara individual dalam penggunaan sumber daya yang optimal.

Konsekuensinya, pengajaran mata kuliah ekonomi pertanian lebih ditekankan pada pendekatan mikro ekonomi, tetapi sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti saat ini, berbagai sektor ekonomi mempunyai keterkaitan yang erat sehingga permasalahan makro seperti kesempatan kerja, inflasi dan investasi mempunyai dampak yang besar terhadap petani dan pelaku agribisnis. Oleh karena itu, penting bagi mahasiswa yang mempelajari ekonomi pertanian untuk memahami tidak hanya bagaimana mengorganisasikan suatu bisnis untuk memperoleh penerimaan yang optimum tetapi juga bagaimana pengaruh perubahan perekonomian secara keseluruhan terhadap keputusan-keputusan ekonomi dalam bisnis di bidang pertanian.

2. Pendekatan Konsumsi-Produksi

Dalam ilmu ekonomi, terdapat dua aspek yang sangat penting berkaitan dengan pelaku kegiatan ekonomi pokok yaitu konsumen dan produsen. Keduanya mempunyai hubungan yang tidak terpisahkan dan saling tergantung satu sama lain. Produsen menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Konsumen bergantung pada produsen atas barang dan jasa untuk memuaskan kebutuhan dan keinginannya. Dua aspek ini penting dalam ilmu ekonomi karena perilaku masing-masing akan menentukan karakteristik pasar melalui permintaan oleh konsumen dan penawaran oleh produsen.

Bagi para ahli pertanian yang lebih menekankan pada ekonomi produksi pertanian (sisi produksi) akan mengalami kesulitan untuk menjelaskan bagaimana petani atau pelaku agribisnis memahami keinginan atau preferensi konsumen atas produk-produk pertanian yang akan mereka hasilkan. Interaksi kedua pelaku utama ini dalam perekonomian yang sederhana disajikan pada Gambar 3.2.



*Gambar 3.2 Interaksi Konsumen dan Produsen
(Danar et al., 2012)*

3. Pendekatan Positif-Normatif

Menurut pendekatan ekonomi positif, ahli ekonomi membuat laporan mengenai apa yang ditemukannya tanpa membuat penilaian apakah temuannya tersebut baik atau buruk. Dalam pendekatan ini ahli ekonomi hanya menentukan alternatif-alternatif penyelesaian masalah tanpa mencoba untuk mengidentifikasi alternatif mana yang terbaik. Dengan demikian pendekatan ekonomi positif menghindari adanya penilaian.

Menurut pendekatan ekonomi normatif, ahli ekonomi dapat membuat penilaian mengenai fakta ekonomi yang diamati. Hasil pengamatan yang menunjukkan bahwa pendapatan usaha tani lebih rendah daripada pendapatan di luar usahatani merupakan ekonomi positif. Kesimpulan hasil penelitian bahwa pendapatan usaha tani berdasarkan pengamatan lebih rendah daripada pendapatan usaha tani yang seharusnya merupakan ekonomi normatif.

Sistem pertanian dalam perekonomian suatu negara yang tergolong sebagai negara maju sangatlah kompleks. Sistem tersebut dapat dibentuk oleh berbagai macam perusahaan mulai dari yang kecil hingga yang besar, dengan bentuk-bentuk organisasi yang berbeda-beda seperti perusahaan swasta milik perorangan, perusahaan-perusahaan milik keluarga, perusahaan berbadan hukum milik pemerintah atau swasta, koperasi tani dan koperasi konsumsi. Saluran pemasaran yang dibentuk dalam rangka pengalokasian input atau sarana produksi pertanian dari para pemasok (pemilik sumber daya) sampai ke para petani atau peternak, dan dalam rangka pengalokasian produk-produk pertanian dari petani atau peternak sampai kepada pengecer atau konsumen, akan berbeda-beda baik untuk produk-produk pertanian yang sama maupun produk-produk pertanian yang berbeda.

Input-input pertanian seperti pupuk, benih dan mesin-mesin pertanian dapat dibeli oleh petani atau peternak melalui perusahaan perorangan atau perusahaan besar (*dealer*) yang mewakili perusahaan pemasok bagi sektor pertanian (*farm supply firm*). Produk-produk makanan yang dijual di tingkat pengecer (*retailer*) dapat mengurangi dua fungsi pemasaran yang biasanya dilakukan oleh perusahaan. Bila perusahaan di tingkat pengecer memproduksi roti-roti itu sendiri, maka pembelian tepung akan dilakukan langsung ke perusahaan penggilingan tepung. Sedangkan pengecer lainnya dapat memperoleh barang tersebut dengan membelinya langsung ke perusahaan roti yang mengolah gandum menjadi roti dan kue-kue lainnya.

Sektor pertanian dan peternakan dengan organisasinya yang kompleks mulai dari pemasok input (sumber daya) – petani/peternak – konsumen dalam berbagai bentuk mempunyai peranan yang penting dalam pembangunan. Terdapat banyak alternatif jalur atau strategi pembangunan. Strategi yang digunakan oleh tiap-tiap negara ditentukan oleh kepemilikan sumber daya dan tingkat pembangunan negara-negara yang bersangkutan. Beberapa negara dengan kepemilikan sumber daya minyak dan mineral yang sangat besar nilainya dapat membentuk modal untuk pembangunan melalui ekspor sumber daya tersebut.

Beberapa negara lainnya menekankan pada ekspor hasil tanaman perdagangan seperti kopi, cokelat dan teh. Sedangkan negara lainnya lagi memfokuskan pada ekspor hasil-hasil industri dan sementara yang lainnya menekankan pada peningkatan produksi pangan pokok. Jalur pembangunan yang optimal

berbeda-beda antara satu negara dengan negara lainnya. Kesalahan dalam memilih jalur pembangunan dengan kepemilikan sumber daya dan tingkat pembangunan tertentu dapat mengakibatkan stagnasi ekonomi dalam jangka Panjang (Sulistiyodewi Nur Wiyono et al., 2017).

Berikut ini disajikan beberapa contoh negara yang salah memilih jalur pembangunan. Argentina, negara yang memiliki sumber daya lahan yang subur, pada tahun 1940-an dan 1950-an memilih jalur pembangunan yang menekankan pada industrialisasi yang mengabaikan sektor pertanian. Akibatnya, ekspor pertanian yang sebelumnya merupakan komponen penting dalam pertumbuhan ekonomi mengalami stagnasi dalam tahun 1950-an, dan devisa yang berkurang menghambat Argentina untuk melakukan impor terhadap barang-barang modal yang dibutuhkan dalam industrialisasi (Wonogiri, 2019). Akibat selanjutnya pertumbuhan ekonomi menurun tajam. India juga merupakan contoh negara lainnya yang potensial untuk sektor pertanian, pertumbuhannya juga merosot karena penekanannya pada industrialisasi yang tidak proporsional dalam tahun 1950-an dan 1960-an. Pertanian di sebagian besar negara-negara berpendapatan rendah sangat tidak produktif.

Awalnya dalam proses pembangunan banyak penduduk yang bekerja di sektor pertanian, dan persentase pendapatan nasional berasal dari sektor tersebut. Selama pembangunan berlangsung, pertumbuhan penduduk dan pendapatan per kapita meningkat. Selama pendapatan tumbuh, lebih banyak pangan akan diminta atau dengan kata lain produksi dan impor produk-produk

pertanian dipastikan meningkat. Karena pertanian menggerakkan banyak sumber daya dalam sebagian besar negara-negara berpendapatan rendah, maka sejumlah dana diperlukan untuk membiayai impor pangan kecuali kalau output (produk) pertanian berkembang pesat.

Kapasitas sektor pertanian untuk mempekerjakan tenaga kerja yang lebih besar sangatlah terbatas. Saat pendapatan terus meningkat, permintaan akan komoditi non-pertanian juga bertambah. Oleh karena itu, pembangunan ekonomi mensyaratkan transformasi ekonomi atau struktural yang melibatkan pengembangan sektor non-pertanian. Sektor pertanian selain memberikan kontribusi dalam pengembangan pangan, tenaga kerja dan modal, juga menyediakan pasar bagi barang-barang non-pertanian (Suroso et al., 2015). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa nilai awal dan rendahnya produktivitas pertanian di sebagian besar negara yang sedang berkembang memberikan peluang bagi upaya peningkatan pendapatan nasional melalui pembangunan pertanian. Karena nilai awal tersebut dan rendahnya pendapatan per kapita di sektor pertanian, terdapat kesempatan riil untuk memperbaiki distribusi pendapatan dan meningkatkan kesejahteraan sebagian besar penduduk melalui pembangunan pertanian (Arvianti & Abin, 2018).

3.3 Pembangunan Pertanian

Indonesia adalah negara agraris yang berbasis pada sektor pertanian. Ironi yang terjadi adalah pertanian tidak dapat menjadi tuan rumah di negerinya sendiri. Swasembada beras yang tercapai pada tahun 1984 ternyata tidak dapat dipertahankan dan hanya dua tahun kemudian Indonesia terus-menerus membuka kran impor beras (Junaedi, Setyawan, & Soepatini, 2016). Menjadi importir beras merupakan masalah besar ketika swasembada pangan telah tercapai. Puncaknya adalah pada tahun 1997 dimana Indonesia harus mengimpor beras sebanyak 5,7 juta ton . Meskipun sebesar volume impor pada tahun 1997, tapi impor beras menjadi ketergantungan karena produksi dalam negeri tidak pernah mencukupi kebutuhan konsumsi dalam negeri.

Stok cadangan beras nasional yang tersedia harus mampu memenuhi konsumsi masyarakat untuk waktu minimal tiga bulan. Patokan ini sebagai upaya untuk menghindari kelangkaan dan gejolak harga. Ketika stok berkurang dan produksi beras dari petani lokal tidak bisa menutupi kekurangan tersebut, maka pemerintah membuka kran impor. Untuk meminimalkan dampak politis yang akan terjadi, pemerintah biasanya mengungkapkan bahwa impor adalah untuk menambah stok cadangan nasional dan bukan untuk konsumsi masyarakat secara langsung. Pemerintah melalui tender akan menunjuk rekanan untuk mengimpor beras dan langsung masuk gudang (Muta'ali, 2004).

Namun yang terjadi adalah membanjirnya beras impor di pasaran meskipun pada saat itu tidak ada kebijakan untuk melepas beras impor ke pasaran. Hal ini disebabkan pengimpor beras baik yang legal maupun ilegal, bahkan bulog, melepas stok beras yang dimiliki termasuk dari impor ke pasaran (Nurif & Mukhtar, 2010). Ketika harga beras meningkat, konsumen langsung menyerap produksi beras dari petani dan tidak sempat masuk ke gudang bulog sehingga stok beras yang ada di gudang hanya beras impor. Pada saat masa simpan beras di gudang habis maka beras impor tersebut harus dilepas ke pasar sehingga terkadang ditemui keadaan beras impor yang telah rusak tapi beredar di masyarakat. Sedangkan bagi pengimpor beras, melepas beras impor ke pasar adalah untuk mencari keuntungan semata dengan bermodal surat ijin impor beras baik resmi atau tidak. Beras impor yang dijual di pasar dalam negeri harganya lebih mahal di banding luar negeri di samping itu pajak impor sangat rendah. Dibukanya kran impor beras biasanya diikuti dengan diturunkannya pajak impor.

Perbedaan harga beras impor dengan beras lokal dan kualitas yang hampir sama membuat masyarakat lebih memilih membeli beras impor. Akibatnya petani menjadi rugi dan sangat terpukul karena harga beras lokal lebih mahal dibandingkan beras impor. Mahalnya beras lokal ditingkat petani diakibatkan oleh mahalnya biaya produksi petani dari persiapan lahan hingga menjadi beras. Seharusnya kelangkaan beras di masyarakat membuat harga menjadi tinggi. Dengan harga yang tinggi, petani menjadi senang karena ongkos produksi dapat ditutup dan terdapat revenue tambahan (Hariadi, 2011).

Mekanisme pasar yang seharusnya bisa menguntungkan petani ketika terjadi kelangkaan beras ternyata 'diinterupsi' sehingga tidak berjalan normal. Interupsi tersebut dilakukan oleh pemerintah melalui kebijakan impor beras. Mekanisme pasar dibiarkan berjalan hanya ketika panen raya dimana stok yang melimpah berakibat pada menurunnya harga beras. Petani merugi karena harga penjualan tidak mampu untuk menutup ongkos produksi. Kondisi ini menyebabkan petani selalu berada pada keadaan merugi terus-menerus.

Multiplier effect yang terjadi adalah petani semakin miskin. Untuk memenuhi ongkos produksi, petani biasanya menerapkan sistem 'yarnen' (Elizabeth, 2017). Petani berharap pada saat panen dan dengan harga yang disesuaikan ongkos produksi dapat meraup keuntungan, lebih-lebih ketika harga tinggi. Namun akibat beras impor, turunnya harga saat panen raya akan mendatangkan kerugian. Apabila gagal panen, kondisi yang dihadapi petani lebih memprihatinkan. Petani akan dililit hutang dan jumlahnya semakin lama semakin besar. Dampaknya adalah semakin banyaknya petani miskin di Indonesia. Pada 2003, sektor pertanian menyumbang kemiskinan hingga 56 juta orang, jumlah petani miskin mencapai 13,7 juta rumah tangga (Iskandar , 2006).

Pada dekade 70-an, konflik politik yang berkepanjangan di Indonesia menimbulkan kemerosotan ekonomi yang tajam dengan ditandai melemahnya nilai mata uang rupiah mencapai 1000%. Kebijakan pemotongan nilai mata uang ternyata tidak efektif dan tetap melemahkan daya beli masyarakat. Hal ini berakibat pada ketidakmampuan sebagian masyarakat untuk memenuhi

kebutuhan pokok sehingga membeli bahan pangan yang kurang layak untuk dikonsumsi. Beras sebagai bahan makanan pokok sebagian besar masyarakat merupakan barang langka dan membutuhkan biaya besar untuk memperolehnya.

Untuk mengatasi kelangkaan beras, Pemerintah Orde Baru melalui Rencana Pembangunan Lima Tahun (repelita) I mengupayakan untuk menciptakan pembangunan dengan fokus utama pada ketersediaan pangan. Ketersediaan pangan terutama makanan pokok merupakan prasyarat untuk merambah kepada langkah pembangunan selanjutnya. Mengingat Indonesia adalah negara agraris dimana sebagian besar masyarakat memiliki mata pencaharian sebagai petani, maka wajar apabila sektor pertanian menjadi primadona dalam pembangunan. Kebijakan pertanian yang dicanangkan pemerintah sekaligus mengakomodir gerakan revolusi hijau yang menjadi gelombang besar di dunia pada dekade 50-an hingga 80-an.

Gerakan revolusi hijau di Indonesia dilaksanakan secara terencana melalui program-program, antara lain: bimbingan masyarakat (bimas), intensifikasi khusus (insus), dan ekstensifikasi yang didalamnya diterapkan Panca Usahatani (PUT) (Iskandar, 2006). Program bimas adalah kegiatan pendampingan kepada para petani melalui aktivitas penyuluhan pertanian. Petugas penyuluh pertanian langsung datang ke daerah-daerah yang secara kultural merupakan lumbung padi bagi lingkungan di sekitarnya.

Inventaris permasalahan yang dihadapi oleh para petani dilakukan dan kemudian dibantu pemecahannya dengan tujuan untuk meningkatkan produksi pertanian. Insus merupakan program untuk meningkatkan kapasitas produksi pertanian khususnya padi melalui pengembangan tata kelola lahan.

Dengan jumlah lahan yang terbatas, petani diharapkan bisa tetap meningkatkan produksinya melalui penerapan teknologi pertanian yang lebih baik. Berbeda dengan insus yang cenderung mengembangkan pertanian secara kualitatif, ekstensifikasi pertanian adalah program pengembangan yang bersifat kuantitatif. Perluasan lahan pertanian didorong oleh pemerintah khususnya pada daerah-daerah yang memiliki lahan luas. Ketiga kegiatan tersebut bermuara pada program Panca Usaha Tani (PUT). PUT merupakan program yang dikenalkan oleh pemerintah kepada petani untuk menciptakan tata kelola pertanian yang lebih baik.

Kegiatan yang dilaksanakan dalam PUT mencakup keseluruhan aspek yang berhubungan dengan pertanian, yakni mulai dari penyiapan dan pengolahan lahan, pemilihan dan penanaman bibit, pemeliharaan tanaman, pemberian pupuk, penanganan hama dan penyakit tanaman, dan mekanisme pasca panen. Program PUT yang dilaksanakan sempat menyebabkan kinerja pertanian meningkat. Produksi padi berkembang dari 2,5 menjadi 10 ton gabah, kedelai 0,6 menjadi 1,6 ton, jagung 1,6 ton menjadi 6,8 ton hektar/musim tanam (Samhadi, 2006). Keberhasilan dalam meningkatkan kinerja pertanian memuncak pada tahun 1984 dimana Indonesia menjadi negara swasembada beras.

Bahkan Indonesia memperoleh penghargaan dari *Food and Agriculture Organization* (FAO) sebagai Negara yang berhasil menjalankan pembangunan di bidang pertanian dan menjadi percontohan negara lain.

Setelah swasembada pangan tercapai, sektor pertanian lambat laun ditinggalkan dan semakin termarginalkan secara sistematis sehingga mulai tahun 1986 Indonesia menjadi pengimpor beras (Samhadi, 2006). Tidak hanya beras, pengadaan pangan seperti kedelai, jagung, dan gula terpuruk terus dan ketagihan impor sampai sekarang (Iskandar, 2006). Program PUT yang dijalankan petani semakin lama memperlemah posisi petani dan pendapatan petani ternyata mengalami kemerosotan yang luar biasa.

Program PUT ternyata menyebabkan pertanian sebagai kegiatan yang padat modal atau biaya tinggi dan bukan lagi kegiatan padat karya. Setiap tahapan dalam PUT membutuhkan ongkos produksi yang tinggi. Petani biasanya sudah kehabisan modal ketika mulai penyiapan dan pengolahan lahan, membeli benih, dan ongkos tanam. Penyiapan dan pengolahan lahan intensif agar efisiensi maka digunakan traktor dan pupuk penyubur lahan. Pemanfaatan traktor memang mempercepat proses pembalikan permukaan tanah tapi roda traktor mengakibatkan tanah menjadi lebih keras dan akar tumbuhan padi sulit menembus permukaan tanah. Akibatnya pertumbuhan tanaman tidak maksimal dan semakin lama kepadatan tanah berakibat menurunnya kualitas tanah untuk ditanami padi. Petani mengoperasikan traktor dengan menyewa sehingga mengeluarkan

ongkos produksi tambahan. Pemberian pupuk penyubur juga membutuhkan ongkos produksi cukup besar terlebih lagi harga pupuk cenderung tinggi pada masa tanam. Tata niaga pupuk diatur oleh pemerintah tapi banyak pelaku pasar yang mempermainkan harga sedangkan pemerintah tidak menindak secara tegas keadaan tersebut. Varitas benih sebagai hasil teknologi budidaya pertanian memiliki harga yang tinggi dan hanya bisa untuk sekali tanam. Kemudian ongkos tambahan diperlukan ketika lahan siap ditanami. Kebutuhan akan pupuk maupun pertisida untuk pemeliharaan tanaman memperbanyak biaya sehingga petani yang mau tidak mau menambah ongkos produksi. Ketika tidak memiliki dana maka berhutang.

Petani bisa sedikit bernafas -walaupun serak- ketika panen memang berhasil. Tapi posisi petani lemah apabila panen raya. Harga gabah turun, dan terkadang dari pada merugi petani menjual gabah dibawah Harga Pembelian Pemerintah (HPP) sebesar Rp 1.230/kg. Persoalan klasik yang muncul ketika menentukan HPP adalah mempertahankan harga yang baik di tingkat produsen, tetapi pada saat yang sama juga tidak memberatkan konsumen (Irham & Mariyono, 2001). Namun berdasarkan data BPS rata-rata harga transaksi di tingkat petani adalah Rp 900/kg (Djoni & Rohman, 2010). HPP sangat merugikan karena harga gabah tertinggi dibatasi tapi biaya produksi tingkat kesediaannya tidak dijamin tapi melalui mekanisme pasar.

Kebijakan pertanian pada umumnya dan beras pada khususnya ternyata menempatkan petani sebagai pemain utama sektor ini dalam posisi yang sangat menyedihkan. Petani sebagai tulang punggung pertanian berada pada kondisi yang sangat memprihatinkan. Para petani bukan orang yang malas sehingga menjadi miskin. Namun sekeras apapun bekerja, pendapatan yang diperoleh sangat kecil dan hanya mampu untuk memenuhi kebutuhan subsisten. Sedangkan untuk membiayai ongkos produksi periode berikutnya, satu-satunya cara adalah berhutang.

Apakah kondisi ini akan terus dibiarkan berlarut-larut? Atau memang profesi petani sudah tidak layak lagi ada di Indonesia karena yang terjadi adalah penindasan, bahkan pembunuhan, secara pelan-pelan. Atau mungkin pemerintah berencana untuk menjadikan Indonesia menjadi pengimpor utama beras di dunia. Kondisi ini bisa jadi terwujud ketika profesi petani benar-benar hilang di Indonesia.

Kebijakan pembangunan yang dijalankan oleh pemerintah Orde Baru sejak tercapai swasembada pangan adalah dengan menggeser pusat pertumbuhan dari desa ke kota. Gerakan Revolusi Hijau telah berhasil di Indonesia tapi belum mampu untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dengan cepat. Sektor yang dapat dengan cepat mendorong pertumbuhan ekonomi adalah industri khususnya manufaktur karena menyerap tenaga kerja dengan jumlah banyak dan modal dalam jumlah besar. Industri dapat berkembang apabila infrastrukturnya memadai dan itu hanya ada di perkotaan. Sejak itulah sektor pertanian yang berbasis di pedesaan dilirik sebelah mata oleh pemerintah.

Michael Lipton dalam bukunya *Why Poor People Stay Poor* mengungkapkan teori tentang *Urban Bias* (Nuraedah, 2018). Bias Perkotaan (*Urban Bias*) ditandai dengan: 1) Adanya kebijakan politik pangan murah (*rice premium policy*) yang dibayar oleh urban areas dalam wujud subsidi harga pangan bagi wilayah perkotaan. 2) Adanya gejala “*price twists*”; yaitu kecenderungan “*cost of living*” yang meningkat di *countryside* dan pengembalian (*remittance*) yang lebih rendah pada mereka, sementara pada saat yang sama tetap menjaga biaya rendah untuk *urban dwellers* (penduduk kota). 3) Adanya strategi investasi yang tidak seimbang pada sektor publik antara desa-kota dan penyediaan infrastruktur sosial yang terbatas di wilayah pedesaan. 4) Adanya arus “*brain-skill drain*” dari wilayah pedesaan yang mengalir ke wilayah perkotaan.

Keempat tanda bias perkotaan yang diungkapkan oleh Lipton tampak dalam pembangunan di Indonesia. Penentuan HPP adalah salah satu bukti bahwa urban bias terjadi. HPP mengakibatkan keseragaman harga baik di kota maupun desa dan ongkos ketika digiling menjadi beras, harga ditingkat konsumen bisa ditekan dan yang untung adalah masyarakat perkotaan. Pemerintah membeli dalam bentuk gabah sehingga nilai tambah ketika berubah menjadi beras tidak diperoleh oleh petani tapi pengusaha yang berasal dari kota. Pembangunan infrastruktur perkotaan berkembang sangat cepat berbeda dengan di desa. Banyak tenaga kerja dari desa yang berpindah ke kota untuk mencari pekerjaan. Walaupun urbanisasi di perkotaan adalah

masalah tapi menjadi konsekuensi logis dari adanya industrialisasi.

Industrialisasi di sektor pertanian yang terjadi di Indonesia memiliki logika yang keliru. Hal ini disebabkan karena industrialisasi menggusur capaian prestasi bidang pertanian. Seharusnya pertanian yang telah ada di dorong untuk mendukung industrialisasi yang terjadi bukan sebaliknya. Pertanian dijadikan material dasar bagi industrialisasi sehingga menjadi semakin mantap dan memiliki nilai tambah.

Pemerintah harus berani membuat lompatan untuk menyelamatkan sebagian besar rakyatnya yang menjadi petani. Pekerjaan ini tidak mudah tapi harus dilakukan dan bertahap. Tujuannya adalah untuk mengembalikan keberhasilan Indonesia sebagai negara swasembada beras di satu sisi dan di sisi lain tetap menjalankan roda industrialisasi yang lebih bumi dan sesuai dengan kapasitas masyarakat. Industrialisasi yang terjadi harus mengakar kepada masyarakat. Teknologi maju dalam pertanian perlu diraih tapi pertanian rakyat juga harus diperhatikan.

Ketercapaian dari program ini adalah mengembalikan profesi petani pada tempat yang terhormat. Industrialisasi pertanian diarahkan pada penciptaan produk-produk pertanian yang dapat diserap oleh masyarakat dan nilai tambah yang ada dapat dibagi secara merata. Nilai tambah selama ini diterima oleh penduduk perkotaan bukan para petani. Ketika petani bisa menikmati nilai tambah dari produk-produk pertanian yang dihasilkan, maka pemberdayaan akan terjadi dan tidak rentan terhadap kemiskinan.

3.4 Ringkasan

Indonesia adalah negara agraris tapi sektor pertanian justru menjadikan para petani sebagai buruh di lahan sendiri. Saat ini petani menjadi pekerjaan yang dipandang sebelah mata dan profesi kelas dua di masyarakat Indonesia. Kondisi tersebut berakibat pada semakin ditinggalkannya sektor pertanian oleh angkatan kerja karena memiliki masa depan kurang menguntungkan. Masalah pertanian di Indonesia disebabkan oleh kebijakan pertanian yang lebih memfokuskan pada peningkatan produksi pertanian dan kurang memperhatikan kualitas hidup para petani. Keberpihakan pada petani sangat kurang dan nilai tambah pertanian justru tidak dinikmati para petani. Alih-alih meningkatkan produksi yang terjadi justru semakin terpuruknya sektor pertanian maupun petani.

Nilai tambah pertanian harus dinikmati oleh petani sehingga kehidupannya menjadi semakin baik dan proses produksi tetap berlanjut. Petani semakin terberdayakan karena aktivitasnya bukan lagi bersifat subsisten tapi menjadi lebih maju. Kebijakan ini tidak akan berhasil apabila tidak ada political will dari pemerintah untuk memperbaiki kehidupan petani. Faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan ini mencakup lintas wilayah, sektor, dan pelaku.

Pihak yang paling dirugikan oleh kebijakan pertanian khususnya beras adalah petani sendiri. Petani berada pada posisi diambang kemiskinan. Ketika telah menjadi miskin, petani semakin terpuruk karena kemiskinan menjadikan petani rentan, tidak berdaya dan voiceless (SMERU, 2002). Kondisi ini

disebabkan oleh ketidakmampuan petani untuk memperoleh nilai tambah atas produk yang dihasilkannya. Nilai tambah dari pertanian diambil oleh pengusaha dan dunia industri.

Nilai tambah pertanian harus dinikmati oleh petani. Dengan nilai tambah tersebut, petani dapat membiayai hidupnya di samping proses produksi pertanian yang menjadi mata pencahariannya. Petani semakin terberdayakan karena aktivitasnya bukan lagi bersifat subsisten tapi menjadi lebih maju. Oleh karena itu rekomendasi kebijakan pertanian khususnya beras adalah memberikan nilai tambah produk pertanian khususnya padi kepada petani.

Untuk melaksanakan kebijakan yang memberikan nilai tambah produk pertanian kepada petani adalah tidak mudah. Kejadian yang paling merugikan petani adalah ketika peluang untuk memperoleh nilai tambah tersebut diinterupsi oleh pemerintah melalui impor beras. Pemerintah harus betul-betul mempertimbangkan keputusan untuk mengimpor beras. Kontraksi pasar terhadap kenaikan harga akibat kelangkaan dapat diukur sehingga tidak terburu-buru membuat keputusan. Memang terdapat indikasi bahwa keputusan untuk impor beras adalah tekanan dari pihak asing (donatur bantuan). Namun seiring lunas utang ke beberapa donatur, Indonesia harus berani mengambil sikap dan mandiri dalam membuat kebijakan. HPP dalam bentuk gabah sebagai patokan harus diubah dalam bentuk beras. Ketetapan HPP setiap daerah juga bisa berbeda. Dalam hal ini Bulog harus membeli langsung dari petani atau koperasi petani. Yang sering terjadi, Bulog membeli dari pengepul (tengkulak).

Pada saat panen raya, seharusnya Bulog menarik persediaan pasar yang melimpah sesuai HPP. Namun yang terjadi, Bulog cenderung bermain sebagai pengusaha dan menekan harga di tingkat petani.

Bulog harus mengambil peran penting dalam memantau dan mengawasi tata niaga beras. Selama ini posisi Bulog ambigu yakni sebagai regulator dan pemain. Sebagai regulator, Bulog seharusnya tidak diperkenankan menjadi pemain. Dalam sepakbola akan sangat sulit mengalahkan tim yang bermain tapi merangkap sebagai wasit. Kebijakan ini tidak akan berhasil apabila tidak ada *political will* dari pemerintah untuk memperbaiki kehidupan petani. Faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan ini mencakup lintas wilayah, sektor, dan pelaku. Perbedaan kepentingan antar faktor pasti terjadi dan hal itu sangat alamiah. Ketika setiap faktor tidak bisa duduk bersama maka realisasi kebijakan ini akan semakin sulit terwujud.



BAB 4

ASPEK PEMASARAN PERTANIAN



4.1 Pemasaran Pertanian

Aktivitas pemasaran merupakan hal yang paling penting dalam sistem agribisnis mulai dari penyediaan sarana produksi pertanian (subsistem input), usaha tani (*on farm*), pemasaran dan pengolahan hasil pertanian, serta subsistem penunjang (penelitian, penyuluhan, pembiayaan/kredit, intelijen pemasaran atau informasi pemasaran, kebijakan pemasaran) (Ayu, Prahastha, & Budi, 2014). Tujuan dari pemasaran yaitu menjembatani apa yang diinginkan produsen dan konsumen dalam melengkapi proses produksi. Hampir semua aktivitas pemasaran membantu produsen dalam memahami keinginan konsumen. Jadi, pemasaran membantu menemukan berbagai jawaban dari lima pertanyaan kunci dalam setiap sistem ekonomi, antara lain (Husaini, 2012):

1. Apa yang seharusnya diproduksi ?
2. Berapa banyak produk yang seharusnya diproduksi ?
3. Kapan seharusnya produk diproduksi ?
4. Siapa yang memproduksi ?
5. Siapa yang membuat pasar untuk produk tersebut ?

Ketika pemasaran dilakukan secara efisien dan adil, pemasaran secara keseluruhan dapat meningkatkan efisiensi ekonomi, peningkatan keuntungan produsen dan peningkatan kepuasan konsumen (Dewani, Boer, & Jannah, 2014). Adanya perdagangan, *central markets*, *money*, dan perantara telah meningkatkan efisiensi dalam evolusi sistem pemasaran.

Pengertian pemasaran atau tata niaga (*marketing*) dapat didekati melalui dua pendekatan yaitu pendekatan ekonomi dan manajerial. Pendekatan ekonomi merupakan pendekatan keseluruhan pemasaran (pendekatan makro) dari petani atau aliran komoditi setelah di tingkat usahatani sampai komoditi/produk diterima/konsumsi oleh konsumen akhir. Dengan demikian, pendekatan ekonomi melibatkan banyak perusahaan (pendekatan kelembagaan), kegiatan produktif dan nilai tambah (pendekatan fungsi), dan pendekatan sistem (*input-output sistem*). Pendekatan yang dapat dilakukan pada analisis pemasaran perspektif makro antara lain pendekatan fungsi, kelembagaan, sistem, dan struktur-perilaku-kinerja pasar (*structure, conduct, performance market-SCP*) (Nuraedah, 2018).

Pendekatan fungsi merupakan pendekatan studi pemasaran dari aktivitas-aktivitas bisnis yang terjadi atau perlakuan yang ada pada proses dalam sistem pemasaran yang akan meningkatkan dan menciptakan nilai guna untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Pendekatan kelembagaan merupakan berbagai organisasi bisnis, kelompok bisnis yang melaksanakan atau mengembangkan aktivitas bisnis (fungsi-fungsi pemasaran). Pendekatan sistem menekankan pada keseluruhan sistem yang kontinyu dan efisien dari seluruh sub-sub sistem yang ada didalam aliran produk/jasa mulai dari petani produsen primer sampai ke konsumen akhir.

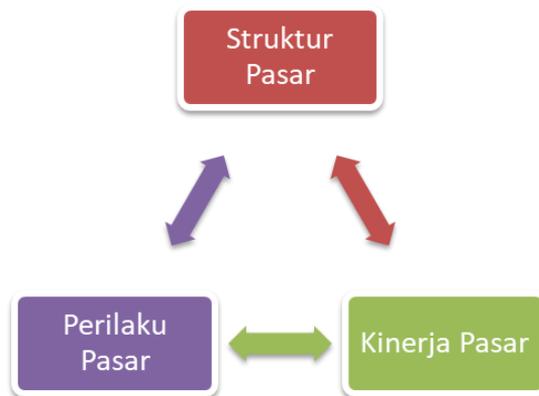
Pendekatan struktur-perilaku-kinerja pasar (SCP, pendekatan industri) merupakan keseluruhan kajian yang menganalisis keseluruhan sistem dari aspek makro mulai dari pendekatan fungsi, kelembagaan, pengolah/ pabrikan, dan

organisasi fasilitas yang terlibat dari sistem pemasaran. Talundu (2015), pemasaran merupakan sebuah fungsi organisasi dan kumpulan sebuah proses yang dirancang dalam rangka untuk merencanakan, menciptakan, mengkomunikasikan, dan mengantarkan nilai-nilai (*values*) kepada pelanggan.

Philips dalam Rijanta (2013) mengajukan konsep yang bersifat dinamis, keterkaitan hubungan dua arah yang bersifat timbal balik dan sifat hubungan endogenous diantara variabel-variabel SCP serta memperhitungkan waktu. Pendekatannya menunjukkan bahwa *structure (S)*, *conduct (C)*, dan *performance (P)* dalam suatu waktu berada pada sistem dimana S dan C adalah faktor penentu dari P, dilain waktu S dan C ditentukan oleh P. Hal ini menunjukkan suatu sistem dinamis yang mengembangkan respon penyesuaian dari perusahaan terhadap kondisi pasar dan keadaan yang memungkinkan. Struktur pasar yang tercipta dalam suatu pasar akan menentukan bagaimana pelaku industri berperilaku.

Akibat dari terbentuknya suatu struktur dan perilaku pasar yaitu adanya penilaian terhadap suatu sistem pemasaran yang disebut sebagai kinerja pasar. Jika struktur pasar yang terjadi adalah pasar persaingan sempurna yang dicirikan dengan banyaknya jumlah pedagang, barang relatif homogen, mudah untuk keluar masuk pasar, dan konsentrasi pasar tidak terletak pada satu orang, maka perilaku pasar yang terjadi adalah akan mencerminkan struktur pasar yang berlaku. Artinya, penetapan harga yang berlaku yaitu berdasarkan mekanisme pasar. Adanya perbedaan harga di tingkat produsen dan konsumen akan

menentukan seberapa besar margin pemasaran, *farmer share*, dan integrasi pasar yang merupakan indikator dari kinerja pasar (Asmin, 2018).



Gambar 4.1. Struktur, Perilaku, Kinerja Pasar

(Ulfani, Martianto, & Baliwati, 2011)

Adapun hubungan antara struktur, perilaku, dan kinerja pasar dapat dilihat pada Gambar 4.1. Kasto (2015) mengemukakan bahwa pemasaran produk pertanian bertujuan menganalisis berbagai aktivitas bisnis yang terjadi dalam komoditas pertanian setelah produsen primer hingga sampai ke konsumen akhir. Pada kondisi ekonomi global saat ini, produk-produk pertanian yang dipasarkan tidak hanya merupakan produk primer pertanian, tetapi juga produk setengah jadi atau produk jadi dari pertanian.

Berdasarkan hal tersebut, konsep dan pengertian pemasaran pertanian (*marketing of agricultural*) menjadi lebih luas yaitu pemasaran produk-produk *agrobisnis* (*marketing of agribusiness products*) atau *agrimarketing*. *Agrimarketing is the sum of the processes, functions, and services performed in connection with food and fiber from the farms on which they are*

produced until their delivery into the hands of the consumer (Ricketts, C dan Omri Rawlins 2001). Pemasaran dilihat dari aspek ilmu ekonomi menurut Asmarantaka (2012) merupakan suatu proses dari satu pergerakan, serangkaian atau tahapan aktivitas dan peristiwa dari fungsi-fungsi yang juga akan melibatkan beberapa tempat.

Selain itu, pemasaran merupakan bentuk koordinasi yang diperlukan dari serangkaian (tahapan) aktivitas atau dalam pergerakan mengalirnya produk dan jasa dari tangan produsen primer hingga ke tangan konsumen akhir. Pengertian lain pemasaran dari aspek ilmu ekonomi yaitu serangkaian fungsi yang diperlukan dalam menggerakkan input atau produk dari tingkat produksi primer hingga konsumen akhir. Marketing channel merupakan aliran atau saluran pemasaran mulai *dari farm input processing, wholesalers, retailers, dan consumers* yang menciptakan nilai.

Dengan demikian, pemasaran pertanian merupakan suatu sistem yang terdiri dari sub-sub sistem dari fungsi-fungsi pemasaran (fungsi pertukaran, fungsi fisik, dan fungsi fasilitas) merupakan kegiatan produktif yang pelaksana fungsi tersebut dilakukan oleh lembaga-lembaga pemasaran (Asmarantaka, Atmakusuma, Muflikh, & Rosiana, 2017a). Rangkaian fungsi-fungsi tersebut merupakan aliran produk/jasa pertanian dalam saluran pemasaran (*marketing channel*) yang juga merupakan aktivitas bisnis dan kegiatan produktif karena proses meningkatkan atau menciptakan nilai (*value-added process*). Nilai tersebut yaitu nilai guna bentuk (*form utility*), tempat (place

utility), waktu (*time utility*) dan kepemilikan (*possession utility*) yang dilakukan oleh lembaga-lembaga pemasaran atau perusahaan-perusahaan (Ayu et al., 2014).

Dari pendekatan sistem agrobisnis, pemasaran agrobisnis merupakan salah satu sub-sistem dari sistem tersebut. Sistem agrobisnis terdiri dari sub-sistem: sarana produksi pertanian (*subsistem input*), usahatani (*on farm*), pemasaran dan pengolahan hasil pertanian, serta subsistem penunjang (penelitian, penyuluhan, pembiayaan/kredit, intelijen pemasaran atau informasi pemasaran, kebijakan pemasaran).

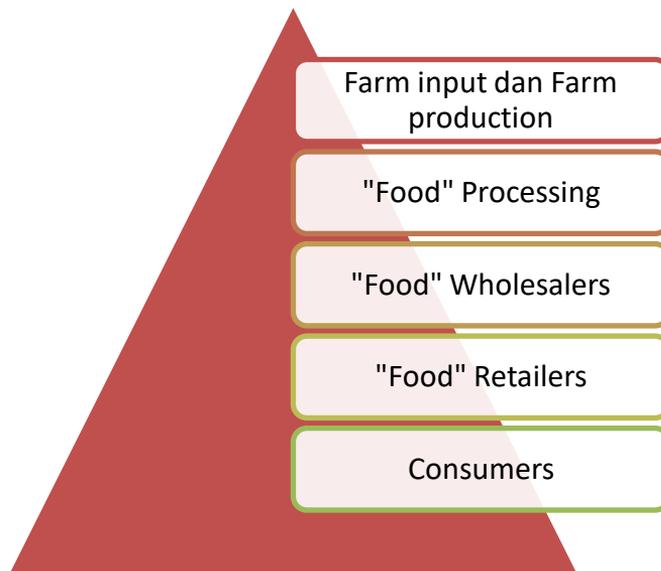
Kondisi yang global untuk pemasaran produk pertanian menyebabkan tingkat kompetisi yang tinggi diantara perusahaan-perusahaan yang terlibat, sehingga untuk memenangkan persaingan perusahaan dapat melakukan kerjasama atau koordinasi oleh satu perusahaan pengelola (perspektif mikro) dalam jejaring yang sama untuk meningkatkan kepuasan konsumen akhir dan meningkatkan persaingan diantara unit entitas. Pendekatan ini dapat dilakukan melalui strategi bisnis antara lain *supply chain* management. Pendekatan ini merupakan salah satu strategi bisnis perusahaan melalui strategi pemasaran (*price, place, product, promotion*), mengidentifikasi segmen pasar dan memilih pasar sasaran dan preferensi konsumen untuk meningkatkan kepuasan konsumen dan keuntungan. Saat ini dikenal pendekatan pendekatan manajerial antara lain *supply chain*, *value chain*, dan *global value chain*.

Jelaslah bahwa mempelajari pemasaran produk dapat didekati melalui pendekatan mikro atau manajemen pemasaran (perspektif manajerial dan pendekatan makro sebagai keseluruhan sistem (perspektif ekonomi). Pendekatan tersebut tergantung dari tujuan yang dicapai dalam melakukan analisis pemasaran sehingga konsekuensi terhadap metode dan hasil analisis berbeda pula (Dewani et al., 2014). Lalu muncul istilah *Supply Chain* (SC), *Value Chain* (VC), *Supply Chain Management* (SCM) dan *Value Chain Analysis* (VCA) dan timbul pertanyaan ‘Sejauhmana letak perbedaannya dan apa kaitannya dengan saluran pemasaran (*marketing channel*) dan SCP (*Structure-Conduct-Performance*)?’ Hal tersebut masih sering diperdebatkan, namun paling tidak melalui tulisan ini dapat ditarik benang merah untuk dapat didiskusikan lebih lanjut. Mari kita mulai dari konsep SCM dan VCA yang telah banyak ditulis oleh berbagai ahli.

Banyak penulis yang tidak membedakan istilah tersebut seperti Ulfani et al (2011) yang mendefinisikan supply chain sebagai “*a sequence of (decision making and execution) processes and (material, information and money) flows that aim to meet final customer requirements, that take place within and between different stages along a continuum, from production to final consumption*”. Berdasarkan definisi tersebut SC dideskripsikan sebagai serangkaian aktivitas mengalirnya produk, informasi dan finansial yang bertujuan untuk memenuhi keinginan konsumen akhir dari produsen hingga ke konsumen akhir. Definisi tersebut juga senada dengan pengertian SC yang dikemukakan Asmarantaka et al (2017) dan serupa dengan pengertian marketing

channel (*input marketing channel dan output marketing channel*) atau rantai pemasaran yang menggambarkan kumpulan aktivitas mengalirnya produk dari produsen primer hingga ke konsumen akhir (Raka, 2016).

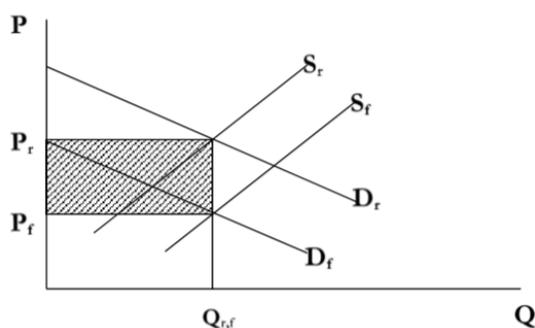
Marketing channel menggambarkan seluruh aktivitas yang memberikan kontribusi terhadap produksi pangan. Saluran yang menekankan pada kebutuhan-kebutuhan dari kepentingan perusahaan yang terlibat dalam lembaga pemasaran dalam produksi pangan dan serat. Sehingga menimbulkan nilai guna atau nilai tambah (*form utility, time utility, place utility, possession utility*) (Olivya & Ilham, 2018). *Marketing channel* dapat dilihat pada Gambar 4.2. Dalam analisis marketing channel untuk peningkatan nilai-nilai tambah banyak dianalisis melalui pendekatan analisis margin pemasaran dan *farmer share*.



Gambar 4.2 Marketing Channel

(Maulidah, 2018)

Konsep margin dalam pemasaran (perspektif ekonomi) merupakan perbedaan harga di tingkat petani produsen dengan harga di tingkat konsumen akhir atau di tingkat retail. Pengertian margin ini adalah pendekatan keseluruhan dari sistem pemasaran produk pertanian, mulai dari tingkat petani sebagai produsen primer sampai produk tersebut sampai di tangan konsumen akhir. Oleh sebab itu sering dikatakan Margin Pemasaran Total (MT). Pengertian lebih luas margin dalam produk agribisnis menunjukkan nilai tambah (*added value*) yang terjadi selepas komoditi dari tingkat petani sebagai produsen primer, sampai produk yang dihasilkan diterima konsumen akhir. Konsep margin ini merupakan kumpulan balas jasa akibat kegiatan produktif (menambah atau menciptakan nilai guna) dalam mengalirnya produk-produk agribisnis mulai dari tingkat petani sampai ke tangan konsumen akhir. Margin digunakan sebagai salah satu indikator efisiensi pada sistem pemasaran produk agribisnis yang setara (equivalen).



Gambar 4.3 Margin Pemasaran
(Maulidah, 2018)

Keterangan :

- Dr = Permintaan di tingkat konsumen akhir (*primary demand*)
- Df = Permintaan di tingkat petani (*derived demand*)
- Sf = Penawaran di tingkat petani (*primary supply*)
- Sr = Penawaran di tingkat konsumen akhir (*derived supply*)

Marjin pemasaran (dari perspektif makro atau sistem pemasaran) menggambarkan kondisi pasar ditingkat lembaga-lembaga yang berbeda, minimal ada dua tingkat pasar yaitu pasar di tingkat petani dan pasar di tingkat konsumen akhir. Pada Gambar 4.3 struktur pasar di setiap tingkat adalah pasar kompetitif (pasar persaingan sempurna) sehingga kurva supply dan demand di setiap tingkat pasar mempunyai slope yang sama dan jumlah transaksi di setiap tingkat pasar juga sama. *Farmer share* merupakan rasio antara harga di tingkat petani terhadap harga di tingkat retail (Syahza, 2013). *Farmer share* merupakan bagian harga dari biaya produksi yang dikeluarkan oleh petani ditambah keuntungan yang diterimanya. Besarnya *farmer share* dipengaruhi oleh: tingkat pemrosesan, biaya transportasi, keawetan produk, biaya transportasi, dan jumlah produk (Sumastuti, 2004). Semakin tinggi *farmer share* menyebabkan semakin tinggi pula bagian harga yang diterima petani. Melalui analisis marjin atau *farm retail price spread* dan *farmer share* dapat diketahui saluran-saluran pemasaran yang efisien.

Efisiensi pemasaran harus memperhitungkan fungsi-fungsi pemasaran yang ada, biaya-biaya dan atribut produk. Keseluruhan sistem yang ada ini, meskipun rantai pemasarannya panjang apabila akan meningkatkan kepuasan konsumen dan konsumen puas maka sistem pemasaran tersebut efisien. Dengan demikian kajian efisiensi pemasaran dapat dilakukan secara relatif antar sistem atau antar tingkat lembaga pemasaran dari sistem pemasaran produk yang setara (*equivalen*) (Asmarantaka, Atmakusuma, Muflikh, & Rosiana, 2017b); (Olivya & Ilham, 2018).

4.2 Tata Niaga Pertanian

Istilah tata niaga sering juga disebut pemasaran yang bersumber dari kata marketing. Kegiatan tata niaga adalah sebagian dari kegiatan distribusi. Distribusi menimbulkan suatu kesan seolah-olah orang-orang yang bergerak di dalam bagian ini bersifat statis, menunggu saja apa yang akan mereka peroleh dari produsen untuk dibagi-bagikan lagi kepada konsumen. Sedangkan marketing (tata niaga) sebaliknya bersifat dinamis karena tata niaga mencakup semua persiapan, perencanaan dan penelitian dari segala sesuatu yang bersangkutan dengan perpindahan, peralihan milik atas sesuatu barang atau jasa serta pelaksanaan perpindahan dan peralihan tersebut. Oleh sebab itu sering terjadi “perbedaan” penggunaan istilah dengan maksud yang sama (Setiawan, Satria, & Tjitropranoto, 2019).

Agar pengertian tata niaga itu semakin jelas berikut ini disajikan beberapa batasanbatasan (defenisi) yang diberikan oleh beberapa para ahli. Sedangkan beberapa batasan tata niaga (marketing) dari beberapa sumber sebagai berikut: yahza (2013); Marketing adalah bagian daripada kegiatan usaha dan dengan mana kebutuhan manusia dapat dipenuhi, yakni dengan tukar menukar barang-barang dan jasa jasa untuk sesuatu yang dianggap perlu dan berharga. Raka, (2016); Marketing adalah semua kegiatan aktivitas untuk memperlancar arus barang/jasa dari produsen ke konsumen secara paling efisien dengan maksud untuk menciptakan permintaan efektif. Menurut Limbong dan Soitorus (1987, dalam Asmin, 2018) pada dasarnya tataniaga memiliki pengertian yang sama dengan pemasaran.

Para ahli telah mendefinisikan pemasaran atau tataniaga sebagai sesuatu yang berbeda- beda sesuai sudut pandang mereka. Pemasaran atau tataniaga dapat didefinisikan sebagai suatu proses manajerial dimana individu atau kelompok di dalamnya mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan menciptakan, menawarkan, mempertukarkan produk yang bernilai dengan pihak lain. Tataniaga dapat juga diartikan sebagai suatu tempat atau wahana dimana ada kekuatan supply dan demand yang bekerja, ada proses pembentukan harga dan terjadinya proses pengalihan kepemilikan barang maupun jasa (Dahl dan Hammond, 1987), sedangkan menurut Kohls dan Uhl (1990, dalam Kertawati, 2008) tataniaga adalah semua kegiatan bisnis yang terlibat dalam arus barang dan jasa dari titik produksi hingga barang dan jasa tersebut ada di tangan konsumen. Setelah menelaah batasan-batasan tata niaga yang telah diutarakan di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa tata niaga atau marketing itu meliputi kegiatan-kegiatan yang sangat luas sekali, di antaranya: kegiatan pembelian (*buying*), kegiatan menjual (*selling*), kegiatan pembungkusan (*packing*), kegiatan pemindahan (*transport*), kelancaran arus barang dan jasa dan lain sebagainya.

Lebih singkat tataniaga itu adalah segala kegiatan yang bersangkutan paut dengan semua aspek proses yang terletak di antara fase kegiatan sektor produksi barang-barang dan jasa-jasa sampai kegiatan sektor konsumen. Jadi, marketing ini merupakan sesuatu kegiatan moving process atau moving activities. Akan tetapi dengan adanya kemajuan teknologi, baik dalam berproduksi, kelancaran komunikasi dan perhubungan, teknik pembungkusan,

handling dan sebagainya, tidak mustahil akan merubah strategi dan kebijakan tata niaga, sehingga batasan-batasan tersebut di atas akan mengalami penyempurnaan atau perubahan secara dinamis pada masa-masa mendatang. Perkembangan dunia usaha pada dewasa ini ditandai dengan makin tajamnya persaingan. Oleh karena itu, peranan pemasaran semakin penting dan merupakan ujung tombak setiap perusahaan.

Keberhasilan usaha suatu perusahaan ditentukan oleh keberhasilan pemasarannya. Pemasaran merupakan kunci keberhasilan usaha perusahaan. Dalam pemasaran komoditi pertanian terdapat pelaku-pelaku ekonomi yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung. Proses pemasaran merupakan proses yang sedang dan terus berlangsung dan membentuk suatu sistem. Suatu sistem pemasaran tersusun atas beberapa sub-sistem yang saling berinteraksi satu sama lain, yang sangat menentukan hasil akhir dari suatu sistem itu sendiri.

Dalam membahas pemasaran pertanian tidak terlepas dari konsep pasar, pemasaran dan pemasaran pertanian. Adapun pemasaran pertanian merupakan bagian dari ilmu pemasaran pada umumnya, tetapi dianggap sebagai suatu ilmu yang berdiri sendiri. Anggapan ini didasarkan pada karakteristik produk pertanian serta subyek dan obyek pemasaran pertanian itu sendiri. Dalam mendefinisikan pasar, perlu diperhatikan adanya pihak-pihak yang terlibat dalam aktivitas pemasaran. Pasar secara sempit didefinisikan sebagai lokasi geografis, dimana penjual dan pembeli bertemu untuk mengadakan transaksi faktor produksi, barang, dan jasa (Sudiyono, 2004).

Pasar dalam arti modern berarti suatu proses aliran barang dari produsen ke konsumen yang disertai penambahan guna barang baik guna tempat, waktu, bentuk dan kepemilikan. Berdasarkan beberapa definisi di atas, pasar dapat didefinisikan sebagai tempat ataupun terjadinya pemenuhan kebutuhan dan keinginan dengan menggunakan alat pemuas yang berupa barang ataupun jasa, dimana terjadi pemindahan hak milik antara penjual dan pembeli. Secara umum pemasaran dianggap sebagai proses aliran barang yang terjadi dalam pasar.

Dalam pemasaran ini barang mengalir dari produsen ke konsumen akhir yang disertai penambahan guna bentuk melalui proses pengolahan, guna tempat melalui proses pengangkutan dan guna waktu melalui proses penyimpanan. Dalam mendefinisikan proses pemasaran ini sangat tergantung posisi seseorang yang terlibat dalam proses pemasaran. Ada beberapa definisi pemasaran yang dikemukakan oleh beberapa para ahli, antara lain :

- Menurut King; Pemasaran merupakan pengambilan keputusan dan pelaksanaan, termasuk perencanaan dan penetapan aktivitas untuk memenuhi kebutuhan konsumen yang berupa barang.
- Menurut Fisk; Pemasaran ialah segala usaha bisnis sehingga dapat memenuhi kebutuhan barang dan jasa yang diinginkan oleh semua konsumen.
- Menurut Schewe dan Smith; Pemasaran adalah aktivitas-aktivitas dimana badan usaha melakukan promosi untuk menyampaikan barang dan jasa antara perusahaan dan masyarakat.

- Menurut Downey dan Erikson; Pemasaran merupakan ilmu yang menelaah terhadap aliran produk secara fisik dan ekonomis dari produsen melalui lembaga pemasaran kepada konsumen.

Dengan melihat beberapa definisi pasar dan pemasaran seperti di atas, maka dapat dikemukakan definisi dari pemasaran pertanian itu sendiri, yaitu sebagai berikut :

1. Menurut FAO (1958)

Pemasaran pertanian adalah serangkaian kegiatan ekonomi berturut-turut yang terjadi selama perjalanan komoditi hasil-hasil pertanian mulai dari produsen primer sampai ke tangan konsumen.

2. Menurut Breimeyer (1973)

Pemasaran pertanian adalah kegiatan-kegiatan yang terjadi diantara usahatani dan konsumen. Definisi ini menegaskan bahwa pemasaran pertanian terjadi setelah usaha tani (*marketing post the farm*) dan produksi terjadi pada usahatani (*production on the farm*).

3. Menurut John Philips (1968)

Pemasaran pertanian adalah semua aktivitas perdagangan yang meliputi aliran barang-barang dan jasa-jasa secara fisik dari pusat produksi pertanian ke pusat konsumsi pertanian. Tataniaga merupakan salah satu cabang aspek pemasaran yang menekankan bagaimana suatu produksi dapat sampai ke tangan konsumen (distribusi).

Tataniaga dapat dikatakan efisien apabila mampu menyampaikan hasil produksi kepada konsumen dengan biaya semurah-murahnya dan mampu mengadakan pembagian keuntungan yang adil dari keseluruhan harga yang dibayar konsumen kepada semua pihak yang ikut serta dalam kegiatan produksi dan tataniaga (Setiawan et al., 2019). Definisi tataniaga di atas didasarkan pada konsep inti tataniaga sebagai berikut:

1. Kebutuhan, keinginan, dan permintaan
2. Produk
3. Utilitas, nilai dan kepuasan
4. Pertukaran, transaksi, dan hubungan
5. Pasar

Pemasaran dan pemasar. Tataniaga sayuran, sebagai salah satu produk pertanian, masih kurang efisien, yaitu kurang adilnya pembagian keuntungan. Hal ini tergambar dari sangat rendahnya harga produk sayuran di tingkat pengusaha produsen sayuran, terutama pengusaha sayuran skala kecil (petani). Untuk menanggulangi masalah itu perlu diketahui mata rantai distribusi beserta permasalahannya. Dalam bisnis sayuran terdapat tiga pendukung yang memegang peranan penting dalam sistem distribusinya.

Ketiganya adalah konsumen, petani, dan pengusaha perantara. Konsumen adalah orang terakhir atau pembeli terakhir suatu produksi sayuran. Petani adalah pengusaha yang langsung berhubungan dengan proses produksi sayuran. Sedangkan pengusaha perantara adalah pengusaha yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi sayuran, melainkan sebagai

penyalur produksi sayuran. Berikut ini beberapa pengusaha perantara sayuran :

1. Pedagang pengumpul, yaitu pedagang yang mengumpulkan barang-barang hasil pertanian dari petani produsen, dan kemudian memasarkannya kembali dalam partai besar kepada pedagang lain.
2. Pedagang besar, yaitu pedagang yang membeli hasil pertanian dari pedagang pengumpul dan atau langsung dari produsen, serta menjual kembali kepada pengecer dan pedagang lain dan atau kepada pembeli untuk industri, lembaga, dan pemakai komersial yang tidak menjual dalam volume yang sama pada konsumen akhir.

Pedagang pengecer, yaitu pedagang yang menjual barang hasil pertanian ke konsumen dengan tujuan memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen dalam partai kecil. (Talundu, 2015). Kebutuhan adalah suatu keadaan dirasakannya ketiadaan kepuasan dasar tertentu. Kebutuhan merupakan kekuatan dasar yang mendorong pelanggan untuk ambil bagian dan terlibat dalam pertukaran. Keinginan adalah kehendak yang kuat akan pemuas yang spesifik terhadap kebutuhan yang lebih mendalam. Keinginan mencerminkan hasrat atau preferensi seseorang terhadap cara-cara tertentu dalam memuaskan kebutuhan dasar.

Permintaan adalah keinginan akan produk yang spesifik yang didukung oleh kemampuan dan kesediaan untuk membeli. Oleh karena itu, keinginan akan berubah menjadi permintaan, bilamana didukung dengan daya beli. Produk adalah sesuatu yang dapat ditawarkan kepada seseorang untuk memuaskan suatu

kebutuhan atau keinginan. Dengan demikian, para produsen harus mencurahkan perhatian baik terhadap produk maupun jasa (pelayanan) yang diberikan oleh produk tersebut.

Pelanggan membeli produk karena produk tersebut memuaskan suatu kebutuhan. Makin dekat letak suatu produk aktual dengan produk ideal menunjukkan tingkat utilitas (nilai kegunaan) yang semakin tinggi. Seorang yang rasional pasti akan berusaha memaksimalkan utilitas, artinya ia akan memilih produk yang menghasilkan utilitas yang paling besar per rupiah yang dikeluarkannya. Nilai merupakan fungsi dari tampilan produk, jasa dan harga instrinsik. Kepuasan adalah manfaat yang diberikan sesuatu produk sesuai dengan yang diharapkan atau didambakan pelanggan, baik secara fungsional dan emosional.

Pelanggan membeli manfaat, bukan produk. Pertukaran adalah tindakan untuk memperoleh produk yang dikehendaki dari seseorang dengan menawarkan suatu yang lain sebagai balasannya. Pertukaran merupakan cara seseorang untuk memuaskan kebutuhan dan keinginannya. Pertukaran terjadi di dalam pasar yang terdiri dari semua pelanggan potensial yang mempunyai kebutuhan atau keinginan tertentu yang mungkin bersedia dan mampu melibatkan diri dalam suatu pertukaran guna memuaskan kebutuhan dan keinginan tersebut.

Dengan adanya pertukaran, maka muncul pemasaran. Pemasaran adalah pengidentifikasian calon mitra pertukaran, mengembangkan penawaran, mengkomunikasikan informasi, mengirimkan produk dan mengumpulkan pembayaran. Pemasar

adalah seseorang yang mencari sumberdaya dari orang lain dan bersedia menawarkan sesuatu yang bernilai sebagai imbalannya.

4.3 Pemasaran Pertanian Berbasis Sistem Informasi

Peranan sektor pertanian dalam pembangunan ekonomi di Indonesia sangat penting. Hal ini disebabkan oleh sebagian besar masyarakat Indonesia masih menggantungkan hidupnya pada sektor tersebut, terutama sebagai penyedia bahan kebutuhan pokok. Kebutuhan pokok dalam kehidupan meliputi 3 hal, yaitu sandang, pangan dan papan. Dalam perjalanannya, ketiga kebutuhan pokok manusia tersebut menjadi bertambah dan bahkan tidak tergantikan, yakni kebutuhan informasi. Bahkan kebutuhan informasi di era globalisasi ini telah menambah anggaran biaya kehidupan manusia untuk memperoleh informasi terbaru maupun saling bertukar informasi. Minimnya informasi di sektor pertanian merupakan penghambat proses memperoleh informasi di era teknologi dan informasi yang semakin berkembang saat ini. Sehingga saat ini masih banyak hasil pertanian tidak terdistribusi dengan baik dan terjadinya permainan harga yang dilakukan oleh tengkulak yang tidak bertanggung jawab.

Sistem informasi yang membahas mengenai harga barang di sektor pertanian bagian pangan sangatlah jarang. Terutama sistem informasi mengenai harga penjualan hasil pertanian. Atas dasar itulah, penyusun ingin membangun sistem informasi pemasaran hasil pertanian khususnya di bidang pangan dengan tujuan petani dapat memasarkan hasil produksinya ke seluruh Indonesia tanpa campur tangan tengkulak yang tidak bertanggung

jawab. Berdasarkan permasalahan di atas dan semakin berkembangnya teknologi secara pesat, maka diperlukan suatu media yang dapat memandu dan memberikan informasi dengan cepat. Android adalah sistem operasi mobile yang akhir-akhir ini menjadi populer di kalangan smartphone. Android adalah sistem operasi berbasis open source sehingga pengguna bisa membuat aplikasi baru di dalamnya. Dengan demikian, diharapkan dapat mengatasi kerugian dari para petani akibat permainan harga pasar.

4.4 Contoh Kasus

Perkembangan sektor pertanian di daerah Riau sampai saat ini cukup menggembirakan. Namun tingkat pendapatan masyarakat dari usaha pertanian belum meningkat seperti yang diharapkan. Karena itu Pemerintah Daerah Riau mencanangkan sasaran pembangunan Daerah Riau harus mengacu kepada Lima Pilar Utama, yaitu: (1) pembangunan ekonomi berbasis kerakyatan; (2) pembinaan dan pengembangan sumberdaya manusia; (3) pembangunan kesehatan/olahraga; (4) pembangunan/kegiatan seni budaya; dan (5) pembangunan dalam rangka meningkatkan iman dan taqwa. Pembangunan ekonomi kerakyatan akan difokuskan kepada pemberdayaan petani terutama di pedesaan, nelayan, perajin; dan pengusaha industri kecil.

Setiap pembangunan di daerah tidak terlepas dari kelima pilar utama pembangunan daerah Riau. Karena pembangunan daerah sangat ditentukan oleh potensi yang dimiliki oleh suatu daerah, maka kebijaksanaan yang dibuat oleh pemerintah daerah

harus mengacu kepada potensi daerah yang berpeluang untuk dikembangkan, khususnya sektor pertanian. Potensi tersebut antara lain: (1) tanaman hortikultura; (2) tanaman perkebunan; (3) usaha perikanan; (4) usaha peternakan; (5) usaha pertambangan; (6) sektor industri; dan (7) potensi keparawisataan.

Pengembangan sektor pertanian dalam arti luas harus diarahkan kepada sistem agribisnis dan agroindustri, karena pendekatan ini akan dapat meningkatkan nilai tambah sektor pertanian, yang pada hakikatnya dapat meningkatkan pendapatan bagi pelaku-pelaku agribisnis dan agroindustri di daerah. Faktor yang mendukung prospek pengembangan agribisnis dan agroindustri di Riau adalah (Almasdi Syahza, 2001a) : (1) penduduk yang makin bertambah sehingga kebutuhan pangan juga bertambah; (2) meningkatnya pendapatan masyarakat akan meningkatkan kebutuhan pangan berkualitas dan beragam (diversifikasi). Keragaman produk menuntut adanya pengolahan hasil (agroindustri). Di samping itu perkembangan agribisnis dan agroindustri juga akan berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, meningkatkan pendapatan petani yang pada akhirnya diharapkan akan mengurangi ketimpangan pendapatan masyarakat.

Untuk mewujudkan tujuan pengembangan ekonomi kerakyatan, terutama di sektor pertanian maka perlu dipersiapkan kebijakan strategis untuk memperbesar atau mempercepat pertumbuhan sektor pertanian, khususnya peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Salah satu cara untuk mencapai tujuan tersebut adalah pengembangan agribisnis dan agroindustri

yang terencana dengan baik dan terkait dengan pembangunan sektor ekonomi lainnya. Dalam upaya penguatan ekonomi rakyat, industrialisasi pertanian merupakan syarat keharusan (*necessary condition*), yang menjamin iklim makro yang kondusif bagi pengembangan ekonomi rakyat yang sebagian besar berada pada kegiatan ekonomi berbasis pertanian.

Untuk penguatan ekonomi rakyat secara nyata, diperlukan syarat kecukupan (*sufficient condition*) berupa pengembangan organisasi bisnis petani yang dapat merebut nilai tambah yang tercipta pada setiap mata rantai ekonomi dalam industrialisasi pertanian (Bungaran Saragih, 2001a). Organisasi bisnis di pedesaan ini berfungsi sebagai lembaga pemasaran produk pertanian. Sistem pemasaran pertanian merupakan satu kesatuan urutan lembaga-lembaga pemasaran. Tugasnya melakukan fungsi-fungsi pemasaran untuk memperlancar aliran produk pertanian dari produsen awal ke tangan konsumen akhir. Begitu pula sebaliknya memperlancar aliran uang, nilai produk yang tercipta oleh kegiatan produktif yang dilakukan oleh lembaga-lembaga pemasaran, baik dari tangan konsumen akhir ke tangan produsen awal dalam suatu sistem komoditas (Gumbira Sa'id, E. dan A. Harizt Intan, 2001).

Sistem pemasaran pertanian mencakup banyak lembaga, baik yang berorientasi laba maupun nirlaba, baik yang terlibat dan terkait secara langsung maupun yang tidak terlibat atau terkait langsung dengan operasi sistem pemasaran pertanian. Sistem pemasaran yang kompleks tersebut diharapkan dapat memainkan peranan penting dalam upaya memaksimalkan tingkat konsumsi

kepuasan konsumen, pilihan konsumen, dan mutu hidup masyarakat (Downey, W David dan Steven P. Erickson, 1987).

4.5 Ringkasan

Dalam pengembangan sektor pertanian ke depan masih ditemui beberapa kendala, terutama dalam pengembangan sistem pertanian yang berbasis agrobisnis dan agroindustri. Kendala yang dihadapi dalam pengembangan pertanian khususnya petani skala kecil, antara lain:

Pertama, lemahnya struktur permodalan dan akses terhadap sumber permodalan. Salah satu faktor produksi penting dalam usahatani adalah modal. Besar-kecilnya skala usaha tani yang dilakukan tergantung dari pemilikan modal. Secara umum pemilikan modal petani masih relatif kecil, karena modal ini biasanya bersumber dari penyisihan pendapatan usahatani sebelumnya. Untuk memodali usaha tani selanjutnya petani terpaksa memilih alternatif lain, yaitu meminjam uang pada orang lain yang lebih mampu (pedagang) atau segala kebutuhan usahatani diambil dulu dari toko dengan perjanjian pembayarannya setelah panen. Kondisi seperti inilah yang menyebabkan petani sering terjerat pada sistem pinjaman yang secara ekonomi merugikan pihak petani.

Kedua, ketersediaan lahan dan masalah kesuburan tanah. Kesuburan tanah sebagai faktor produksi utama dalam pertanian makin bermasalah. Permasalahannya bukan saja menyangkut makin terbatasnya lahan yang dapat dimanfaatkan petani, tetapi juga berkaitan dengan perubahan perilaku petani dalam

berusahatani. Dari sisi lain mengakibatkan terjadinya pembagian penggunaan tanah untuk berbagai subsektor pertanian yang dikembangkan oleh petani.

Ketiga, pengadaan dan penyaluran sarana produksi. Sarana produksi sangat diperlukan dalam proses produksi untuk mendapatkan hasil yang memuaskan. Pengadaan sarana produksi itu bukan hanya menyangkut ketersediaannya dalam jumlah yang cukup, tetapi yang lebih penting adalah jenis dan kualitasnya. Oleh karena itu pengadaan sarana produksi ini perlu direncanakan sedemikian rupa agar dapat dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan dan dipergunakan pada waktu yang tepat.

Keempat, terbatasnya kemampuan dalam penguasaan teknologi. Usaha pertanian merupakan suatu proses yang memerlukan jangka waktu tertentu. Dalam proses tersebut akan terakumulasi berbagai faktor produksi dan sarana produksi yang merupakan faktor masukan produksi yang diperlukan dalam proses tersebut untuk mendapatkan keluaran yang diinginkan. Petani yang bertindak sebagai manajer dan pekerja pada usaha tani harus memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam penggunaan berbagai faktor masukan usaha tani, sehingga mampu memberikan pengaruh terhadap peningkatan produktivitas dan efisiensi usaha yang dilakukan.

Kelima, lemahnya organisasi dan manajemen usaha tani. Organisasi merupakan wadah yang sangat penting dalam masyarakat, terutama kaitannya dengan penyampaian informasi (top down) dan panyaluran inspirasi (bottom up) para anggotanya. Dalam pertanian organisasi yang tidak kalah pentingnya adalah

kelompok tani. Selama ini kelompok tani sudah terbukti menjadi wadah penggerak pengembangan pertanian di pedesaan. Hal ini dapat dilihat dari manfaat kelompok tani dalam hal memudahkan koordinasi, penyuluhan dan pemberian paket teknologi.

Keenam, kurangnya kuantitas dan kualitas sumberdaya manusia untuk sektor agribisnis. Petani merupakan sumberdaya manusia yang memegang peranan penting dalam menentukan keberhasilan suatu kegiatan usahatani, karena petani merupakan pekerja dan sekaligus manajer dalam usahatani itu sendiri. Ada dua hal yang dapat dilihat berkaitan dengan sumberdaya manusia ini, yaitu jumlah yang tersedia dan kualitas sumberdaya manusia itu sendiri. Kedua hal ini sering dijadikan sebagai indikator dalam menilai permasalahan yang ada pada kegiatan pertanian.



BAB 5

ASPEK PRODUK PERTANIAN



5.1 Definisi Produksi Pertanian

Perjalanan pembangunan pertanian di Indonesia hingga saat ini belum menunjukkan hasil yang maksimal dilihat dari tingkat kesejahteraan petani dan kontribusinya pada pendapatan nasional. Penurunan kemampuan lahan yang drastis dan persaingan global menyebabkan petani terpuruk ditambah dengan beban ekonomi perkotaan dari sektor industri. Industri yang seharusnya mampu menampung luapan tenaga kerja sektor pertanian ternyata mandul apalagi PHK menjadi momok tiap perusahaan (Nirzalin & Maliati, 2017). Mengingat kondisi tersebut perlu kita renungkan kembali alternatif strategi pembangunan pertanian baru yang mampu menjawab berbagai tantangan tersebut. Kondisi pembangunan pertanian negara dunia ketiga sebenarnya tidak lepas dari pilihan strategi pembangunan yang ditawarkan oleh negara pemenang perang dunia II.

Pertumbuhan ekonomi dan modernisasi diterima begitu saja (*taken for granted*) tanpa dilihat kondisi dan kemampuan lokal apalagi budaya bangsa. Pemerataan tidak dapat tercapai bahkan memperburuk pondasi ekonomi sehingga berbuah krisis (Dewi, Utama, & Yuliarmi, 2017). Sekalipun *green revolution* telah sukses mengantarkan bangsa kita meraih predikat swasembada beras dan terbebas dari bahaya kelaparan, tetapi tidak sedikit pula kegagalan yang kita derita. Kondisi agroekosistem persawahan kita rusak, antara lain punahnya satwa dan serangga

non hama akibat penggunaan pestisida secara tidak rasional. Derajat kesuburan tanah semakin merosot dan produktivitas hasil panen semakin menurun, karena penggunaan pupuk kimia secara berlebihan. Akibatnya sekarang Indonesia bukan lagi sebagai negara swasembada pangan tetapi sudah menjadi negara yang terancam pangan, sampai-sampai pemerintah membentuk badan ketahanan pangan.

Dampak sosial psikologis masih menghantui banyak petani karena endapan pengalaman traumatik akibat arogansi aparat dan sikap ketergantungan petani kepada kebijakan pemerintah (Erviyana, 2014). Sejak beberapa tahun terakhir ini, muncul kerisauan atas menurunnya kemampuan kita untuk memenuhi sendiri kebutuhan pangan bagi rakyat Indonesia. Dunia pun diliputi kekhawatiran itu, karena penduduk bertambah menurut deret ukur sedangkan produksi pangan bertambah menurut deret hitung. Menurut FAO, pada waktu ini di dunia terdapat \pm 200 juta orang kekurangan pangan.

Penduduk Indonesia pada tahun 2035 diperkirakan akan bertambah menjadi 2 kali lipat dan jumlahnya sekarang, menjadi \pm 400 juta jiwa. Dengan meningkatnya pendidikan dan kesejahteraan masyarakat, terjadi pula peningkatan konsumsi/kapita untuk berbagai pangan. Akibatnya, dalam waktu 35 tahun yang akan datang Indonesia memerlukan tambahan ketersediaan pangan yang lebih dari 2 kali jumlah kebutuhan saat ini (Purwanto, 2009). Ketahanan pangan tidak hanya mencakup pengertian ketersediaan pangan yang cukup, tetapi juga kemampuan untuk mengakses (termasuk membeli) pangan dan

tidak terjadinya ketergantungan pangan pada pihak manapun. Dalam hal inilah, petani memiliki kedudukan strategis dalam ketahanan pangan : petani adalah produsen pangan dan petani adalah juga sekaligus kelompok konsumen terbesar yang sebagian masih miskin dan membutuhkan daya beli yang cukup untuk membeli pangan.

Petani harus memiliki kemampuan untuk memproduksi pangan sekaligus juga harus memiliki pendapatan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pangan mereka sendiri (Asaad, 2003). Upaya pemerintah dalam meningkatkan pendapatan masyarakat tani (terutama petani padi) merupakan masalah klasik dari pembangunan pertanian yang sampai saat ini belum terpecahkan. Bahkan kesenjangan pendapatan antara petani tanaman pangan dengan petani tanaman perkebunan kian hari semakin jauh.

Banyak pula upaya dan kebijakan pemerintah yang dilakukan bukan merupakan jalan keluar dari kesulitan yang hadapi, tetapi sebaliknya menimbulkan kesulitan baru bagi masyarakat petani itu sendiri. Misalnya kebijakan penghapusan subsidi pupuk yang tidak diikuti oleh kenaikan harga gabah, adanya kebijakan harga dasar dan harga atap gabah yang tidak berlaku, kurangnya peran bulog serta pemberian bantuan modal yang tidak dibarengi dengan pengawasan dan bimbingan teknologi yang intensif. Kondisi yang demikian semakin mempersulit masyarakat petani dan mereka semakin terbelenggu dalam lingkaran kemiskinan yang berkepanjangan dan tidak mampu keluar dari lingkaran tersebut (Zulnadi & Syafri, 2015). Salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan produktivitas petani dalam

memproduksi pangan adalah dengan program Pengelolaan Tanaman Terpadu (PTT).

Menurut Puslitbangtan Darwanto (2017), Model PTT ini mengacu kepada keterpaduan teknologi dan sumberdaya setempat yang dapat menghasilkan efek sinergis dan efisiensi tinggi, sebagai wahana pengelolaan tanaman dan sumberdaya spesifik lokasi. Prinsip yang dipergunakan adalah memprioritaskan pemecahan masalah setempat (petani dan lahannya) serta memadukan pengelolaan tanaman dan lingkungannya. Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah meningkatkan produktifitas, meningkatkan nilai ekonomi/keuntungan usaha tani melalui efisiensi input dan melestarikan sumberdaya untuk keberlanjutan sistem produksi.

Program ini dilaksanakan pada lokasi lahan sawah irigasi dengan satu hamparan minimal 50 ha, kelompok tani sudah ada dan berfungsi, serta dalam dua tahun terakhir belum diterapkan rekomendasi teknologi secara penuh. Petani yang menjadi peserta harus memenuhi persyaratan sebagian besar pemilik lahan, merupakan anggota kelompok tani dan berada dalam satu hamparan. PTT disesuaikan dengan kondisi sumber daya yang tersedia di setiap daerah, seperti tanah, air, tanaman, bahan organik, tenaga kerja, kelembagaan. Sumber daya tersebut dipadukan agar saling mendukung untuk meningkatkan hasil padi secara efisien. Penelitian yang dilakukan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Sumatera Utara menunjukkan adanya perbedaan antara produktivitas padi yang dihasilkan antara petani PTT dan non PTT.

Rata-rata hasil padi petani PTT dapat mencapai 8,06 ton/ha/mt GKP dan 7,03 ton/ha/mt GKG sedangkan hasil padi petani non PTT hanya mencapai 6,00 ton/ha/mt GKP dan 5,23 ton/ha/ mt GKG (Puslitbangtan 2003). Dari hasil survei awal dan wawancara peneliti kepada beberapa petani di desa Lubuk Bayas dan Lubuk Rotan, mereka membenarkan bahwa ada perbedaan hasil yang mereka peroleh dari sebelum dan sesudah mengikuti program PTT. Bahkan mereka mengakui selama ada PTT taraf hidup mereka lebih sejahtera dari sebelumnya. Peningkatan produksi dari penerapan pengelolaan tanaman terpadu spesifik lokasi memang sudah tidak diragukan lagi, hal ini sudah dibuktikan dengan penelitian BPTP dan diakui oleh masyarakat petani. Namun apakah usaha tani padi sawah PTT ini sudah efisien dalam penggunaan faktor produksi mengingat lahan yang dimiliki petani rata-rata dibawah satu hektar, bahkan ada yang di bawah 0,5 hektar serta letaknya terpencar-pencar.

Dari hasil survei awal yang dilakukan, petani yang mengikuti program PTT di desa Lubuk Bayas sebanyak 150 orang dengan luas lahan 90 ha, yang berarti rata-rata setiap petani memiliki luas lahan 0,6 ha dan di desa Lubuk Rotan sebanyak 76 orang dengan luas lahan 10 ha, yang berarti rata-rata setiap petani memiliki luas lahan 0,13 ha. Menurut Yusra, Irham, Hartono, & Waluyati (2018) luas pengusahaan lahan pertanian merupakan sesuatu yang sangat penting dalam proses produksi usaha pertanian. Dalam usaha tani pemilikan atau pengusahaan lahan sempit sudah pasti kurang efisien dibanding lahan yang lebih luas. Semakin sempit lahan usaha, semakin tidak efisien usaha tani yang

dilakukan. Tingkat efisiensi sebenarnya terletak pada penerapan teknologi. Karena pada luasan lahan yang lebih sempit, penerapan teknologi cenderung berlebihan dan menjadikan usaha tidak efisien.

Petani kurang perhitungan terutama dalam memberikan masukan seperti pupuk misalnya. Padahal sebenarnya pada lahan sempit justru seharusnya efisiensi usaha lebih mudah diterapkan, karena mudahnya pengawasan dan penggunaan masukan, kebutuhan tenaga kerja sedikit serta modal yang diperlukan juga sedikit dan lebih mudah diperoleh. Tetapi kenyataan di lapangan justru hal yang pertama yang lebih banyak dijumpai. Sedangkan menurut Susmiati (2018), faktor lain yang mempunyai pengaruh langsung pada efisiensi usaha tani adalah perpecahan (*division*) dan perpecahan (*fragmentasi*) petak-petak sawah. Ketahanan pangan merupakan bagian terpenting dari pemenuhan hak atas pangan sekaligus merupakan salah satu pilar utama hak asasi manusia. Ketahanan pangan juga merupakan bagian sangat penting dari ketahanan nasional.

Dalam hal ini hak atas pangan seharusnya mendapat perhatian yang sama besar dengan usaha menegakkan pilar-pilar hak asasi manusia lain. Kelaparan dan kekurangan pangan merupakan bentuk terburuk dari kemiskinan yang dihadapi rakyat, dimana kelaparan itu sendiri merupakan suatu proses sebab-akibat dari kemiskinan. Oleh sebab itu usaha pengembangan ketahanan pangan tidak dapat dipisahkan dari usaha penanggulangan masalah kemiskinan (Supuwingsih, 2018). Upaya peningkatan produksi pangan senantiasa mendapat perhatian karena kebutuhan

akan padi dan palawija terus meningkat. Upaya ini perlu diikuti dengan upaya peningkatan pendapatan petani agar termotivasi untuk lebih produktif. Pengelolaan tanaman dan sumberdaya terpadu (PTT) padi sawah merupakan suatu upaya pendekatan untuk meningkatkan dan menstabilkan program produksi padi melalui integrasi pendekatan teknologi sekaligus meningkatkan pendapatan petani.

Sumatera Utara merupakan produsen beras ke lima di Indonesia dan mempunyai prospek untuk mengembangkan pendekatan PTT. Bila secara bertahap pendekatan PTT diterapkan di lahan sawah di Sumatera Utara yang luasnya 561.196 ha (BPS 1999), maka diyakini pada lima tahun mendatang (2004 – 2009) Sumatera Utara akan menjadi sumber pertumbuhan produksi beras utama di Indonesia. Perkembangan perpadian ini juga akan memacu pertumbuhan sektor ekonomi lainnya di pedesaan. Pendekatan ini merupakan perbaikan dari pendekatan sebelumnya yang mengutamakan realisasi penggunaan input dan sinergismenya untuk mencapai efisiensi yang tinggi. Pengelolaan tanaman dan sumberdaya terpadu merupakan alternatif pengelolaan padi secara intensif pada lahan sawah irigasi.

Komponen-komponen PTT seperti pengelolaan hama terpadu, hara terpadu, air terpadu, dan gulma terpadu telah dipraktekkan. Namun demikian komponen-komponen tersebut dilaksanakan secara terpisah/parsial, sehingga hasilnya belum optimal. Keterpaduan PTT bukan hanya pada keterpaduan antara tanaman, sumber daya produksi dan teknologi, tetapi mencakup keterpaduan yang lebih luas yaitu: (1) keterpaduan antar institusi,

(2) keterpaduan antar disiplin ilmu pengetahuan, (3) keterpaduan analisis dan interpretasi, serta (4) keterpaduan program antar sub-sektor (Suwono, 2004). Menurut Sumarno (1997) dalam Mahfud, dkk. (2003) PTT bertujuan: (1) memperoleh kepastian keberhasilan panen dengan produktivitas optimal/maksimal, (2) penggunaan masukan efisien, (3) resiko gagal kecil dan mutu produk tinggi, serta (4) menjaga kelestarian lingkungan.

Menurut Sundari, Yusra, & Nurliza (2015) dalam usaha pertanian proses produksi tidak akan berjalan bila syarat yang dibutuhkan tanaman, ternak atau ikan tidak dapat dipenuhi. Persyaratan ini lebih dikenal dengan nama faktor produksi. Faktor produksi terdiri dari 4 komponen, yaitu ; tanah, modal, tenaga kerja dan skill atau manajemen. Dalam menggunakan faktor produksi harus mengikuti prinsip optimalisasi agar tercapai efisiensi dalam proses produksi. Prinsip optimalisasi penggunaan faktor produksi pada prinsipnya ialah bagaimana menggunakan faktor produksi tersebut secara seefisien mungkin.

Dalam terminologi ilmu ekonomi, maka pengertian efisiensi ini dapat digolongkan menjadi 3 macam, yaitu : 1) efisiensi teknis; 2) efisiensi alokatif (efisiensi harga); dan 3) efisiensi ekonomi. Suatu penggunaan faktor produksi dikatakan efisien secara teknis (efisiensi teknis) kalau faktor produksi yang dipakai menghasilkan produksi yang maksimum. Dikatakan efisiensi harga atau efisiensi alokatif kalau nilai dari produk marginal sama dengan harga faktor produksi yang bersangkutan, dan dikatakan efisiensi ekonomi kalau usaha pertanian tersebut

mencapai efisiensi teknis dan sekaligus juga mencapai efisiensi harga (Antu, 2016).

Seiring dengan meningkatnya tuntutan terhadap efisiensi penggunaan sumber daya diperlukan terobosan teknologi. Suatu teknologi yang mampu meningkatkan daya saing produk pertanian di pasar, di antaranya efisiensi penggunaan N, pengelolaan tanaman terpadu, dan teknik budi daya tanaman, menunjukkan hasil nyata di lapang (Departemen Pertanian, 2003). Data takaran pemupukan menunjukkan terjadinya perubahan perimbangan penggunaan pupuk pada paket teknologi introduksi. Secara total, taksiran pemberian pupuk tidak menunjukkan perbedaan nyata, tetapi dengan perimbangan kebutuhan hara NPKS untuk tanaman padi sawah yang lebih baik dibandingkan teknologi yang diterapkan petani non-koperator. Penghematan dalam penggunaan pupuk urea dan ZA sebagai akibat penggunaan alat bagan warna daun dapat dikompensasikan untuk meningkatkan biaya pembelian pupuk SP-36 dan KCl oleh petani untuk mendapatkan perimbangan penggunaan pupuk yang lebih rasional. Dengan peimbangan yang lebih rasional maka dapat diperoleh hasil yang lebih baik (Puslitbangtan 2003).

Dari hasil penelitian analisa usaha tani menggunakan gross margin analisis oleh Erythrina, dkk., (2003), menunjukkan terdapat peningkatan pendapatan bersih usaha tani padi sawah sebesar Rp. 1.963.174 – Rp. 976.148 = Rp. 987.026 per hektar per musim tanam pada penggunaan paket teknologi introduksi. Peningkatan pendapatan ini sebagian disebabkan adanya kenaikan produktivitas sekitar 1 ton/ha. Jarak tanam yang optimal dan

peningkatan populasi tanaman dalam sistem legowo 4 : 1 dapat meningkatkan produktivitas padi dengan nyata. Peningkatan pendapatan petani sangat dipengaruhi oleh harga gabah yang berlaku ditingkat petani. Masalah harga gabah dan pasokan sarana produksi sebenarnya lebih banyak berkaitan dengan dukungan kelembagaan.

Kurangnya dukungan lembaga menyebabkan posisi tawar petani menjadi lemah, sehingga tidak berdaya dalam penetapan harga jual. Petani selalu harus menerima harga yang ditetapkan secara sepihak oleh pedagang. Bila ada kolaborasi antara petani, petugas, pengusaha dan pedagang, masalah ini diyakini dapat diatasi, sehingga motivasi petani akan lebih tinggi dan berdampak pada penerapan teknologi dan pencapaian produksi. Penerapan teknologi petani harus dapat membedakan pengetahuan yang sifatnya teknis (*technological knowlege*) dan pengetahuan yang sifatnya organisatoris atau managerial (*managerial knowlege*).

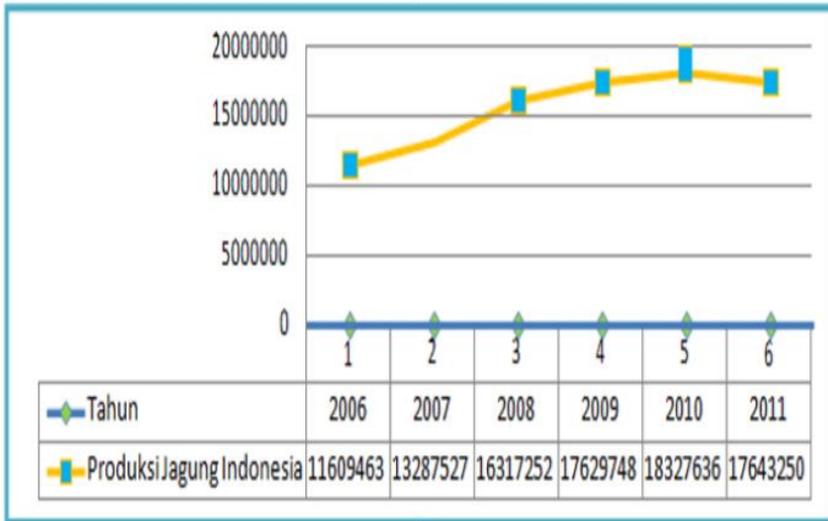
Technological knowlege terjelma sebagai modal fisik dan managerial knowlege terjelma sebagai modal manusiawi (*human capital*). Dalam hubungan ini timbul perbedaan para ahli mengenai efisiensi usahatani. Sekelompok ahli berpendapat bahwa produksi pertanian hanya dapat naik apabila ada penambahan satu atau lebih faktor produksi. Kelompok ahli lain seperti (Prihadi, 2000) berpendapat produksi dan pendapatan pertanian di Indonesia sebenarnya dapat dinaikkan dengan tidak perlu menambah faktor-faktor produksi yg sudah ada, yang diperlukan hanyalah perubahan-perubahan dalam pola penggunaan faktor-faktor produksi yang bersangkutan (Maswadi,

2017). Dalam hal ini berarti ada pengaruh faktor sosial untuk meningkatkan produksi dan pendapatan petani.

5.2 Unsur-Unsur Penting Produksi Pertanian

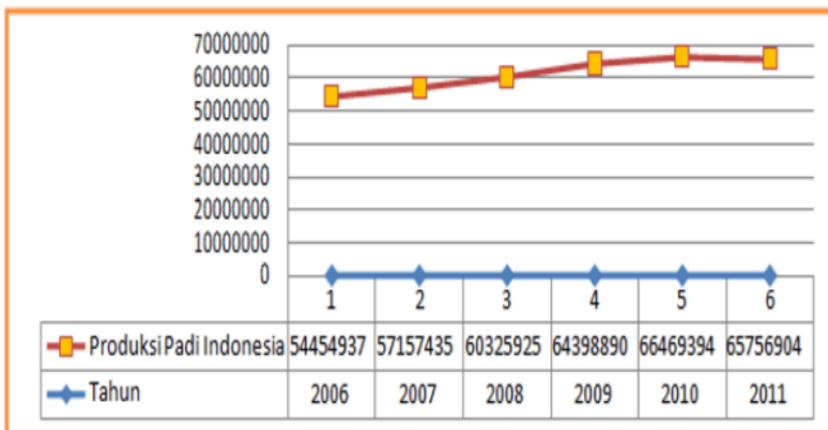
Indonesia, negara dengan kondisi sumberdaya alam yang subur nan melimpah, terletak di bentangan Khatulistiwa membuatnya menjadi indah menghijau dari Sabang sampai Merauke. Karena kesuburannya, Ibu Pertiwi Indonesia dijuluki sebagai negara agraris dimana sebagian besar penduduknya bermatapencaharian sebagai petani. Berdasarkan data Departemen Pertanian, luas lahan sawah Indonesia mencapai 7,6 juta Ha. Lahan yang subur sangat berpotensi untuk ditanami tanaman pangan, seperti padi dan jagung. Tanaman pangan dibutuhkan sebagai bahan makanan pokok bagi seluruh penduduk. Ketersediaanya harus diperhatikan guna memenuhi kebutuhan makanan pokok secara berkelanjutan dan memenuhi syarat gizi (Purnama, Hadayati, & Setyowati, 2015).

Di Indonesia sendiri rata-rata penduduknya mengkonsumsi beras (berasal dari padi) sebagai makanan pokok sehari-hari, padahal di Indonesia dapat ditanami berbagai macam tanaman pangan seseuai kearifan lokal masingmasing daerah seperti jagung, ketela dan sagu. Tanaman pangan jagung dapat menjadi alternatif kedua bahan makanan pokok utama setelah beras. Gambar 5.1 merupakan perkembangan produksi jagung dan padi di tahun 2006 – 2011.



Gambar 5.1 Perkembangan Produksi Jagung Indonesia Tahun 2006—2011 (Sumber: BPS, 2006-2012)

Gambar 5.1 menunjukkan perkembangan produksi jagung yang cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Kenaikan tertinggi terjadi tahun 2010 meski sempat mengalami penurunan pada tahun 2011.



Gambar 5.2 Perkembangan Produksi Padi Indonesia 2006-2011 (Sumber: BPS, 2006-2011)

Berdasarkan Gambar 5.2 dapat dikatakan bahwa pola perkembangan jagung dan padi adalah sama. Terlihat pada saat padi mengalami kenaikan. Sebaliknya ketika produksi padi juga mengalami penurunan, produksi jagung juga mengalami penurunan. Jagung berpotensi untuk menjadi bahan makanan pokok utama selain jagung, produksi jagung yang masih rendah dibandingkan dengan padi dapat menjadi permasalahan tersendiri. Tidak dapat dipungkiri bahwasanya produksi jagung lebih rendah daripada padi karena pemerintah memberikan insentif lebih terhadap padi, dimana secara tidak langsung padi sudah menjadi menjadi bahan makanan pokok Indonesia.

Selain faktor tersebut masih rendahnya produksi jagung daripada padi dikarenakan luas lahan jagung di Indonesia yang masih sedikit. Luas lahan merupakan komponen penting untuk meningkatkan produksi jagung. Ini disebabkan karena hubungan antara produksi dengan luas lahan sebagai input produksi (Widiatningrum & Pukan, 2010). Produksi adalah hubungan antara faktor- faktor produksi yang disebut input dengan hasil produksi yang disebut output. Dari input yang tersedia, termasuk didalamnya sektor pertanian, ingin memperoleh hasil maksimum sesuai dengan tingkat teknologi yang ada pada saat itu. Suatu fungsi produksi dapat memberi gambaran bahwa produksi yang efisien secara teknis, artinya semua penggunaan input dalam produksi serba minimal atau serba efisien (Nirzalin & Maliati, 2017).

Sedangkan menurut Erviyana (2014) dari input yang tersedia setiap perusahaan ingin memperoleh hasil yang maksimal sesuai dengan tingkat teknologi yang tertinggi pada saat itu. Untuk meningkatkan produksi dapat dilakukan dengan cara (Zulnadi & Syafri, 2015). a). Menambah jumlah salah satu dari input yang digunakan; b). Menambah beberapa input (lebih dari input yang digunakan). Dalam bidang pertanian, produksi fisik dihasilkan oleh bekerjanya beberapa faktor produksi sekaligus, antara lain tanah, benih, pupuk, obat hama dan tenaga kerja.

Didalam Yusra et al (2018) disebutkan bahwa produksi pada dasarnya tergantung pada dua variabel yaitu luas panen dan hasil per hektar, dengan pengertian bahwa produksi dapat ditingkatkan jika luas panen mengalami peningkatan atau produktifitas per satuan luas yang harus ditingkatkan. Produktivitas dari faktor-faktor produksi dapat dicerminkan dari produk marginal. Produk marginal adalah tambahan produksi yang diperoleh sebagai akibat dari adanya penambahan kuantitas faktor produksi yang dipergunakan. Meskipun merupakan salah satu faktor penting dalam produksi, namun efisien atau tidaknya sangat tergantung dari bagaimana penggunaannya.

Terdapat berbagai macam faktor yang mempengaruhi keputusan untuk menggunakan lahan pertanian di suatu daerah. Adapun faktor tersebut dapat berupa faktor fisik maupun non fisik yang terbentuk pada daerah tersebut:

- 1) Faktor fisik yang mempengaruhi kemungkinan penggunaan lahan pertanian adalah:
 - a. Iklim; temperatur (panas) dan curah hujan;
 - b. Topografi; relief dan batuan ;
 - c. Tanah; unsur hara/kesuburan dan sifat fisik tanah;
 - d. Air; potensi air, kedalaman (Supuwingsih, 2018):
- 2) Faktor Manusia:

Budaya dan Sejarah:Tenaga kerja; tingkat keterampilan dan kemampuan teknologi petani (pendidikan, ilmu, pengalaman dan pengelolaan) Adanya kemampuan jumlah tenaga kerja (baik tenaga kerja keluarga maupun non keluarga).

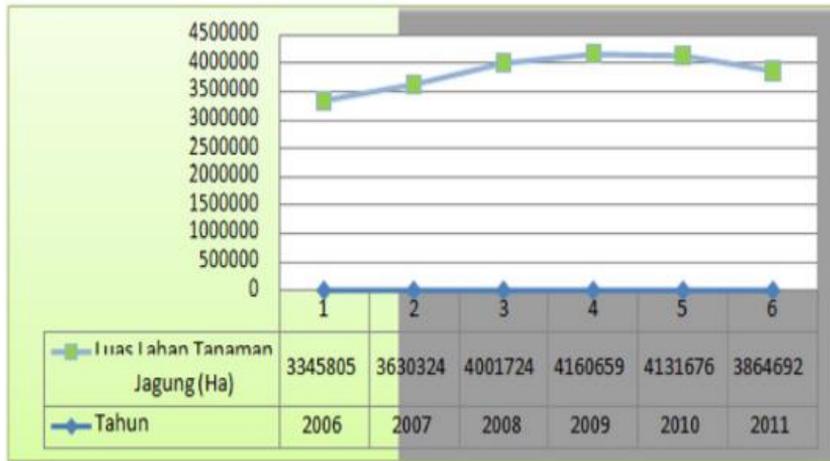
Kondisi teknologi transportasi yang diperbaiki (fasilitas jalan dan sarana transportasi) untuk pengembangan pertanian. Faktor Ekonomi antara lain: Modal; kemampuan memiliki modal, peralatan, gedung dan uang; Penawaran produksi pertanian, besarnya jumlah produksi yang ditawarkan dari petani; Permintaan, besarnya jumlah permintaan produk pertanian oleh konsumen atau pasar. Harga; harga input (sarana produksi) dan harga produksi hasil pertanian.

- 3) Faktor Politik meliputi:

Termasuk partisipasi petani dalam praktek dan kebijakan pemerintah yang menyangkut pembangunan pertanian, seperti harga, pajak, penilaian impor/ ekspor dan sebagainya; Larangan

untuk menanam suatu jenis tanaman, misalnya ganja dan sebagainya; Pembatasan dalam perdagangan, misalnya sesuai dengan kuota yang disepakati.; Bantuan pemerintah berupa modal, bibit, pupuk dan sebagainya. Dalam pengambilan keputusan untuk melakukan usaha tani tersebut selain dipengaruhi oleh aspek fisik dan manusia juga dipengaruhi oleh sikap manusia (*behavioral element*) dan kesempatan lain dari petani (*chance element*), yang akan berpengaruh langsung terhadap pola usahatani. Dalam hal ini akan menentukan besarnya stok, bibit, pupuk, organisasi usahatani, tenaga kerja, mesin dan gudang sebagai tempat penyimpanan produk.

Pada dasarnya hasil dari usaha tani adalah pendapatan yang diterima petani. Jika hasil usaha tani mampu meningkatkan pendapatan petani maka petani akan sejahtera dan ini merupakan feedback yang positif. Sebaliknya jika hasil usaha tani bersifat stagnasi atau tidak dapat mengubah pendapatan petani yang lebih baik atau petani tetap miskin maka feedback hasil usaha tani bersifat negatif. Meskipun merupakan salah satu faktor penting dalam produksi, namun efisien atau tidaknya sangat tergantung dari bagaimana penggunaannya.



Gambar 5.3 Perkembangan Luas Lahan di Indonesia

Dalam hal ini akan menentukan besarnya stok, bibit, pupuk, organisasi usahatani, tenaga kerja, mesin dan gudang sebagai tempat penyimpanan produk. Pada dasarnya hasil dari usaha tani adalah pendapatan yang diterima petani. Jika hasil usaha tani mampu meningkatkan pendapatan petani maka petani akan sejahtera dan ini merupakan feedback yang positif. Sebaliknya jika hasil usaha tani bersifat stagnasi atau tidak dapat merubah pendapatan petani yang lebih baik atau petani tetap miskin maka feedback hasil usaha tani bersifat negatif. Dilihat dari perkembangan luas lahan Indonesia, ternyata ada kecenderungan bahwa luas lahan tanaman jagung mengalami peningkatan dari tahun 2006-2011 (Gambar 5.3).

Kondisi tersebut sangat menguntungkan, dengan catatan, jika dikelola secara efisien, maka persediaan jumlah jagung akan dapat meningkat. Apabila jumlah jagung meningkat, maka pendapatan petani juga akan dapat meningkat. Ini terbukti dari dari penelitian Prihadi (2000) yang menemukan bahwa komoditi

jagung berpengaruh positif terhadap pendapatan petani di Kecamatan Tanah Pinem sebesar 85,9%. Sedangkan produksi dan harga jagung berpengaruh signifikan terhadap pendapatan masyarakat.

Sarana produksi pertanian tersedia sangat banyak, mulai dari berbagai macam benih, pupuk, pestisida, insektisida, dan alat-alat sarana produksi tanaman.

1. Pupuk

Pupuk adalah material yang ditambahkan pada media tanam atau tanaman untuk mencukupi kebutuhan hara yang diperlukan tanaman sehingga mampu berproduksi dengan baik. Material pupuk dapat berupa bahan organik atau anorganik (mineral). Pupuk berbeda dari suplemen, pupuk mengandung bahan baku yang diperlukan tumbuhan dan perkembangan tanaman, sementara suplemen seperti hormon tumbuhan membantu kelancaran proses metabolisme. Meskipun demikian, ke dalam pupuk, khususnya pupuk buatan, dapat ditambahkan sejumlah material suplemen. Dalam pemberian pupuk perlu diperhatikan kebutuhan tumbuhan tersebut, agar tumbuhan tidak mendapat terlalu banyak zat makanan. Terlalu sedikit atau terlalu banyak zat makanan dapat berbahaya bagi tumbuhan. Pupuk dapat diberikan lewat tanah ataupun disemprotkan ke daun. Beberapa pupuk yang kami deskripsikan adalah pupuk urea putih, pupuk NPK, dan Nasa (Nusantara subur alami). Pupuk ini dideskripsikan dan kemudian dicatat apa saja fungsi dan kandungannya.

2. Pestisida

Pestisida adalah bahan yang digunakan untuk mengendalikan, menolak, memikat, atau membasmi organisme pengganggu. Nama ini berasal dari pest ("hama") yang diberi akhiran cide ("pembasmi"). Sasarannya bermacam-macam, seperti serangga, tikus, gulma, burung, mamalia, ikan, atau mikrobia yang dianggap mengganggu. Tergantung pada sarannya, pestisida dapat berupa :insektisida (serangga), fungisida (fungi/jamur), rodentisida (hewan pengerat/Rodentia), herbisida (gulma), akarisida (tungau), bakterisida (bakteri). Insektisida yang kami deskripsikan yaitu Crowen 113 EC, Kejora 15 EC, Dangke 40 MP, Furadan, dan Sidador 30 EC. Fungisida yang kami deskripsikan yaitu Root-up, Dithane M-45 80 WP. Sedangkan Bakterisida yang kami deskripsikan yaitu Agrept 20 WP. Masing-masing mempunyai fungsi, bahan aktif dan karakter bahan. Pada setiap nama bahan pestisida terdapat EC, MP, dan WP. EC merupakan kepanjangan dari Emulsifiable Concentrate atau berbentuk cairan pekat. WP merupakan kepanjangan dari Wettable Powder yang memiliki arti pestisida berbentuk tepung yang basah, sehingga jika dicampur dengan air tepung tidak mengambang pada permukaan atau tepung yang dapat disuspensikan atau dipastakan dalam air.

3. Alat Saprotan

Alat saprodi adalah alat yang dapat digunakan secara terus menerus dan sebagai alat pendukung dalam menjalankan tahapan pelaksanaan usaha pertanian. Alat saprotan yang kami deskripsikan yaitu cangkul dan alat penyemprot tanaman. Cangkul berfungsi untuk membantu pengolahan lahan, berwujud padat dan

komponen unsur utamanya adalah kayu dan besi. Sedangkan alat penyemprot tanaman digunakan untuk menyemprot pestisida, berwujud padat, dan komponen unsur utamanya adalah plastik dan besi.

5.3 Permasalahan Produksi Pertanian

Menurut proyeksi para ahli kependudukan, pada tahun 2035 sekalipun program Keluarga Berencana (KB) sukses, penduduk kita akan mencapai sekitar 350 juta jiwa. Dengan tingkat konsumsi per kapita seperti sekarang ini, 139 kg per kapita per tahun, pada 2035 dibutuhkan sekitar 50 juta ton beras. Untuk menghasilkan 50 juta ton beras, dibutuhkan sawah dengan produktivitas rata-rata 5 ton GKG (Gabah Kering Giling) per ha seluas sekitar 11 juta ha. Data menunjukkan, sekarang Indonesia hanya mempunyai sekitar 6,5 juta hektar sawah, sehingga sangat sulit membayangkan mendapatkan areal baru untuk mencapai 11 juta ha tadi. Masalah pertambahan permintaan lebih besar daripada kemampuan berproduksi, harus segera menjadi fokus perhatian pemerintah. Perlu upaya serius dari pemerintah dalam menghadapi kondisi saat ini di sektor pertanian.

1. Petani Masih Miskin

Berdasarkan data BPS, 29 juta jiwa penduduk Indonesia masih berada di bawah garis kemiskinan dimana 18 juta jiwa tersebut berada di pedesaan. Selain itu, Nilai Tukar Petani sekitar 100-105 sejak 2010, dibandingkan dengan target batas bawah RPJMN, yaitu 115-120.6 Hal ini menunjukkan petani (nelayan, peternak, perkebun) Indonesia belum sejahtera. Penyebab

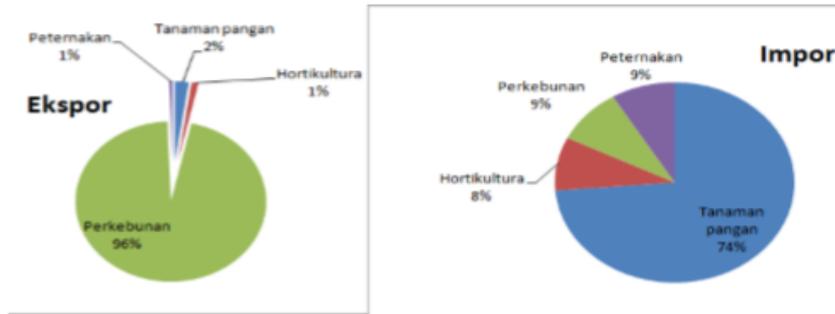
lemahnya NTP dapat dilihat dari IT atau IB. Dari segi IT, sulitnya diversifikasi konsumsi pangan karena budaya masyarakat Indonesia yang makan nasi/kebutuhan pokok tertentu yang sulit berubah atau dengan kata lain, ketergantungan konsumsi pangan masih tinggi. Dari segi IB, keterlambatan bantuan input usaha pertanian seperti benih dan pupuk sering terjadi. Biasanya anggaran belum bisa dicairkan dengan mudah pada awal-awal tahun, padahal petani harus segera memulai penanaman di awal tahun.

Petani tetap hidup miskin karena petani tidak punya hak untuk menetapkan kebijakan pertanian pada semua level. Asosiasi pertanian yang ada di Indonesia tidak memihak petani. Di India sudah diberlakukan Farmer Jury. Ini berdampak pada gerakan kedaulatan pangan di India. Dengan 1,2 miliar penduduk masih bisa ekspor 4,5 juta ton beras, 2,2 juta ton jagung, dan 4,2 juta ton tepung kedelai tahun 2011. Bandingkan dengan Indonesia yang penduduknya hanya 240 juta tapi banyak impor berbagai komoditas.

2. Ketergantungan Impor

Impor tanaman pangan menempati 74% dari total impor yang dilakukan pemerintah. Sedangkan impor peternakan, holtikultura, dan perkebunan sebesar 8 – 9%. Pada Desember 2013, ekspor perkebunan meliputi minyak sawit, kelapa, karet dan gula tebu sebesar 96%. Namun produk perkebunan yang diekspor merupakan bahan mentah dan sebagian impor merupakan bahan jadi. Impor dilakukan sebagian besar untuk konsumsi, bukan untuk

proses produksi. Hal ini menunjukkan sangat tergantungnya pemenuhan konsumsi domestik terhadap impor.



Sumber: BPS, diolah

Gambar 5.4 Ekspor dan Impor Sektor Pertanian Desember 2013

3. Banyak Usia Produktif Meninggalkan Pertanian

Grafik berikut menunjukkan penurunan jumlah rumah tangga usaha pertanian dari 2003 ke 2013. Hal ini dapat disimpulkan bahwa usia produktif di Indonesia berkurang, mereka lebih tertarik bekerja pada non pertanian dikarenakan kurangnya dukungan pemerintah pada sektor pertanian. jika sektor pertanian menjadi kurang menarik bagi usia produktif, maka 10 tahun lagi, sektor pertanian Indonesia makin terpuruk.

4. Aspek Geografis

Penyebab penurunan produktivitas pertanian bisa disebabkan force majeure atau dengan kata lain diluar kendali manusia seperti seperti bencana alam dll. Indonesia terletak di ring of fire, sehingga Indonesia akan lebih sering terkena dampak bencana alam.

Menurut Zulnadi & Syafri (2015), yang dilakukan oleh CRED (*Centre for Research on the Epidemiology of Disaster*), Indonesia menempati posisi ke-4 untuk negara-negara yang sering mengalami bencana alam. Pada 2012, Indonesia mengalami 4 kejadian Geophysical (gempa bumi, gunung meletus, kekeringan), 9 kejadian hydrological (banjir) dan 2 kejadian meteorological (badai). Upaya yang dapat dilakukan pemerintah adalah bekerja sama dengan lembaga lain seperti BNPB, BMKG dll untuk memitigasi potensi kerugian yang harus ditanggung petani akibat terjadinya bencana alam dan anomali cuaca. Selain itu, pemerintah dapat mendorong penelitian dan pengembangan benih yang berpotensi yang lebih adaptif dan lebih berumur pendek yang disesuaikan dengan perubahan iklim.

5. Aspek Kebijakan Pemerintah

Selama ini, Pemerintah berupaya membuat berbagai kebijakan Pertanian namun program dan kebijakan yang telah digulirkan masih belum sepenuhnya berjalan secara terpadu, efisien dan efektif. Hal ini dapat terlihat dari tidak pernah tercapainya target di sektor pertanian di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014.

Salah satu kebijakan terbaru yang tidak pro-petani adalah Keputusan MA No.70 Tahun 2014 yang membatalkan Perpres No 31/2007. Aturan yang mulai berlaku 22 Juli 2014, menyatakan semua produk pertanian segar yang dihasilkan petani dikenai PPN sebesar 10% untuk produk segar pertanian, perkebunan, hortikultura dan hasil hutan. Selain berlaku bagi barang impor, aturan itu juga berlaku bagi barang lokal. Barang-barang yang

dikenai PPN dari Pengusaha Kena Pajak meliputi produk perkebunan, yakni kakao, kopi, kelapa sawit, biji mete, lada, biji pala, buah pala, bunga pala, cengkeh, getah karet, daun the, daun tembakau, biji tanaman perkebunan dan sejenisnya.

Komoditas hortikultura yakni pisang, jeruk, mangga, salak, nanas, manggis, durian dan sejenisnya. Tanpa PPN saja, produk pertanian Indonesia sudah kalah bersaing dengan produk impor apalagi ditambah kewajiban PPN. Upaya yang dapat dilakukan pemerintah adalah membebaskan pajak yang dikenakan ke petani dan memberi tarif tinggi kepada produk impor. Hal ini tidak melanggar ketentuan peraturan perdagangan Internasional dan dapat melindungi produk pertanian dalam negeri. Jepang sudah mengimplementasikan hal ini untuk meningkatkan produksi pertaniannya. Kebijakan pertanian harus jangka panjang untuk memastikan keberlangsungannya. Kebijakan domestik hendaknya disertai dengan kebijakan perdagangan luar negeri untuk melindungi produksi dalam negeri.

5.4 Contoh Kasus

Diskusi tentang hubungan tingkat produksi dan kesejahteraan petani di Indonesia, menarik pula dibahas Aceh didalamnya. Pada kenyataannya, Aceh merupakan wilayah Indonesia yang memiliki lahan pertanian cukup luas. Sehingga jika terkelola dengan baik dapat mendukung kesejahteraan masyarakatnya. Kesuburan tanah, dukungan iklim dan kegigihan petaninya menjadi modal kunci dalam mewujudkan swasembada pertanian didaerah ini. Jika didaerah lain di Indonesia seperti di

Jawa tenaga kerja disektor pertanian mengalami kemerosotan di Aceh relatif tidak menjadi soal, sebab bertani merupakan pekerjaan dan sumber nafkah yang mentradisi. Tradisi bertani didaerah ini dipertahankan melalui pola pewarisan secara turuntemurun. Realitas ini, membentuk kebudayaan bertani di Aceh sehingga menjadi fondasi ekonomi dalam menjalani kehidupan. Kuatnya hubungan orang Aceh dengan pertanian tampak nyata dalam produktivitas hasil pertanian yang meningkat signifikan dari tahun ke tahun seperti yang tercermin pada FSVA (Food Security and Vulnerability Atlas) Aceh 2010.

Studi, FSVA (Food Security and Vulnerability Atlas) 2010 menunjukkan bahwa dari sisi ketersediaan pangan, produksi padi, jagung, ubi kayu dan ubi jalar meningkat, pada umumnya daerah di Aceh merupakan daerah swasembada/surplus pangan dalam hal produksi sereal. Produksi padi pada tingkat kabupaten di Aceh selama 8 tahun terakhir (2002-2009) menunjukkan bahwa produksi tersebut mengalami peningkatan terutama pada 11 kabupaten, yaitu di Kabupaten Simeulue, Aceh Tenggara, Aceh Timur, Aceh Barat, Aceh Besar, Bireuen, Aceh Utara, Gayo Lues, Aceh Tamiang, Nagan Raya, dan Aceh Jaya.

Produksi pertanian yang tinggi di Aceh Utara tidak berbanding lurus dengan kesejahteraan para petani. Hasil Sensus Pertanian 2013 menunjukkan bahwa produksi padi tertinggi di Provinsi Aceh dihasilkan di wilayah Kabupaten Aceh Utara, yaitu sebesar 277.749 ton padi atau sebesar 14,19% dari seluruh produksi padi di Aceh (1.956.939 ton) yang ditanam pada lahan seluas 69.286 hektar (17,41% dari total luas tanam padi di Provinsi

Aceh) dengan produktivitas padi sebesar 4,80 ton per hektar (BPS Aceh, 2017). Akan tetapi, berdasarkan Indeks Ketahanan Pangan Komposit yang digunakan untuk memetakan 251 kecamatan yang memiliki data lengkap untuk 9 indikator terkait kerawanan pangan kronis, ditemukan bahwa di antara 251 kecamatan tersebut gampong-gampong (desa) yang ada di Kabupaten Aceh Utara tergolong rentan pangan. Tingkat kerentanan terhadap kerawanan pangan terutama disebabkan

Karena tingginya angka kemiskinan yang mencapai 20 % di wilayah ini (BPS: 2013). Menyadari realitas tersebut, maka pemerintah Aceh mengembangkan berbagai program yang dapat membantu masyarakat, khususnya komunitas petani di perdesaan untuk dapat mengatasi dan mengantisipasi berbagai persoalan yang berkaitan dengan produksi, ketersediaan, dan akses terhadap pangan.

Program-program tersebut, gencar dilakukan pemerintah salah satunya di gampong Meunasah Pinto, Kecamatan Muara Batu, Aceh Utara. Namun, program-program pemerintah tersebut meskipun berhasil meningkatkan produktivitas pertanian namun relatif gagal dalam meningkatkan kesejahteraan petani disana. Realitas ini menarik untuk dikaji lebih lanjut, utamanya untuk memahami mengapa petani tidak mengalami perubahan kesejahteraan ditengah-tengah meningkatnya hasil panen mereka. Jika sebelum menggunakan teknologi pertanian yang diintroduksi oleh pemerintah, hasil panen yang diperoleh petani sebesar 2 ton per hektar, maka dengan menggunakan teknologi pertanian seperti

bibit unggul, pupuk dan obat pemberantas hama, maka rata-rata hasil panen petani bisa mencapai 7 ton per hektar¹

Eksistensi petani dalam menjalani dinamika kehidupannya dapat dilihat dengan beberapa perspektif. Menurut Scott (1976), petani susah menerima perubahan, sebab mereka lebih mengutamakan selamat (*safety first*) dan takut pada resiko (*risk averse*). Petani sulit mengubah cara bertaninya karena dengan perubahan itu dapat mengancam subsistensinya. Begitu pula dalam merespon perubahan kelembagaan, misalnya dengan kehadiran koperasi di pedesaan, petani kecil sulit terlibat agar hubungannya dengan patron tidak terputus, berhubung keamanan subsistensinya dipelihara oleh patron. Memutuskan hubungan dengan patron berarti menciptakan kerawanan subsistensial.

Perspektif berbeda diutarakan oleh Popkin (1975). Menurut Popkin, petani pada dasarnya berperilaku rasional, mereka tidak sepenuhnya bergantung pada moral kolektivitas desa. Bila mereka berhubungan dengan pasar, terdapat kemampuan untuk melakukan adaptasi, sehingga perilaku ekonominya bisa kondusif dengan prinsip ekonomi pasar, seperti dilakukannya tindakan menabung, investasi, dan cari laba. Asumsi tentang hubungan patron-klien dan kegotong-royongan yang menciptakan harmoni dan jaminan subsistensi komunitas desa dianggapnya terlalu romantik.

Teori pilihan rasional yang dipelopori oleh James S. Coleman mengusulkan sebuah analisis tindakan kolektif yang bahkan dapat diperluas ke dalam analisis, seperti norma sosial, marriage markets, sistem status, dan pencapaian tingkat

pendidikan. Untuk merumuskan definisi pilihan rasional dalam sosiologi, fokus studi diarahkan pada penjelasan fenomena sosial makro berdasarkan pilihan yang dibuat aktor sosial pada tingkat mikro. Pemusatan perhatiannya pada tindakan rasional individu ini dilanjutkan dengan memusatkan perhatian pada masalah hubungan mikro-makro atau bagaimana cara gabungan tindakan individual menimbulkan perilaku sistem sosial. Selanjutnya, Coleman juga memperhatikan hubungan sebaliknya, yaitu hubungan makro-mikro atau bagaimana sistem memaksa orientasi aktor (Haryanto, 2012).

Meskipun teori pilihan rasional fokus pada para aktor yang mempunyai tujuan dari pilihan tindakan mereka, namun pilihan itu harus memperhitungkan setidaknya dua pembatas utama pada tindakan itu. Yang pertama adalah kelangkaan sumberdaya. Para aktor mempunyai sumber daya yang berbeda 1. Wawancara dengan Ramli Ketua Kelompok Tani Gampoeng Meunasah Pinto, 13 Juni 2016 dan juga akses yang berbeda kepada sumber daya lainnya. Bagi yang menguasai sumber daya, pencapaian tujuan menjadi lebih mudah. Sumber pembatas kedua adalah lembaga-lembaga sosial yang memberikan sanksi positif dan negatif yang membantu mendorong tindakan-tindakan tertentu dan menghalangi untuk melakukan tindakan yang lain (Ritzer, 2014).

Struktur sosial desa persawahan sebelum revolusi hijau umumnya berciri homogen. Berlaku nilai kesederhanaan dan kebersamaan dalam pranata yang pro-homogenik. Saat tekanan penduduk meningkat pada sebuah desa, sehingga homogenitas mengarah pada diferensiasi, komunitas akan menempuh ekspansi

statis (static expansion) agar homogenitas tetap terpelihara (Boeke dalam Salman, 2012). Permukiman dan pertanian baru dibuka secukupnya untuk memenuhi subsistensi, dan bila komunitas baru itu telah terisi penuh karena penambahan populasi, maka ekspansi statis serupa akan berulang. Dengan pola itu, lahan baru yang dibuka selalu terbatas, sekedar mencukupi hidup sederhana bagi kelebihan populasi, dan batas daya dukung cepat tercapai setiap kali tekanan penduduk mendesak. Maka, desa persawahan dengan cepat terpenuhi persebaran komunitas yang masing-masing berstruktur homogenik.

Setelah ekspansi statis memenuhi desa, sementara penduduk terus bertambah, adaptasi untuk memelihara homogenitas diarahkan ke dinamika internal desa. Geertz (1963) menemukan bahwa dengan penduduk yang terus bertambah dan sumber daya yang terbatas, masyarakat desa bukannya terbelah atas tuan tanah dan petani tak bertanah, melainkan mempertahankan homogenitasnya dengan cara membagi-bagikan kue ekonomi yang ada, sehingga bagian yang diperoleh masing-masing makin lama makin sedikit. Fenomena itulah yang disebutnya sebagai proses “berbagi kemiskinan” (*shared poverty*).

Berbagi kemiskinan demi lestarnya homogenitas merupakan implikasi lebih jauh dari nilai pro-kesederhanaan dan pro-kebersamaan yang dianut warga desa. Budidaya padi sawah sebagai inti kebudayaan, dibiarkan menampung sejumlah pencari nafkah yang terus bertambah, sehingga struktur dan kultur yang tercipta semakin kompleks ke dalam. Akibatnya, meski dari segi

produksi persatuan luas desa persawahan terlihat makin produktif, tetapi bila diukur per jumlah orang yang berkontribusi dalam produksi itu, sebenarnya peningkatan produksi tidak nyata tercapai. Telah berlangsung involusi pertanian (Agricultural Involution) (Geertz, 1963): ibarat orang berenang, tangan dan kaki memang terkapak serta air riuh terkepak, tetapi posisi tidak berpindah (Salman, 2012).

Berbagi kemiskinan dan involusi pertanian selain merupakan akibat dari nilai pro-kesederhanaan dan pro-kebersamaan juga dapat dilihat sebagai respons atas dinamika perubahan. Hal ini merupakan pilihan sadar akan strategi adaptasi terhadap tekanan penduduk yang ditempuh petani dalam keniscayaan memelihara homogenitas. Perspektif Geertz di Indonesia nampaknya masih relevan. Namun, perlu dipertanyakan apakah statis (involusi) nya kesejahteraan petani di Indonesia hanya disebabkan oleh bertambahnya jumlah penduduk sehingga menyempitkan lahan produksi semata.

Disisi lain, perspektif *livelihood* (mata pencaharian) menawarkan lensa penting untuk melihat pertanyaan pembangunan pedesaan yang kompleks. Pendekatan mata pencaharian yang berkelanjutan telah mendorong refleksi yang lebih dalam dan kritis. Hal ini timbul terutama dari melihat konsekuensi dari upaya pembangunan dari perspektif tingkat lokal, yang membuat hubungan dari tingkat mikro, menjadi ciri khas mata pencaharian orang miskin terhadap perampasan kelembagaan dan kebijakan yang lebih luas di tingkat kabupaten, provinsi, nasional dan bahkan tingkat internasional. Oleh karena

itu, refleksi semacam itu memberi keyakinan yang tajam tentang pentingnya pengaturan kelembagaan dan tata kelola yang kompleks, dan hubungan kunci antara mata pencaharian, kekuasaan dan politik (Scoones, 2009). Kemiskinan petani tetap terjadi meskipun produktivitas meningkat dapat dipicu pula oleh realitas lainnya yang diantaranya hubungan kekuasaan petani dengan elite desa yang menguasai modal aktivitas pertanian mereka.

5.5 Ringkasan

Pertanian merupakan soko guru bagi perekonomian bangsa Indonesia. Hal ini tidak terlepas dari keberadaan Indonesia sebagai negara agraris. Maka, hubungan antara sektor pertanian dengan pembangunan nasional dan kesejahteraan petani merupakan hubungan yang bersifat timbal balik. Sebab, kesejahteraan masyarakat Indonesia pada dasarnya terletak pada hasil yang diperoleh dari hasil bertani. Hasil pertanian yang melimpah dimungkinkan hanya apabila lahan pertanian yang dimiliki mencukupi. Namun, dalam tataran empiris, meskipun Indonesia merupakan negara agraris, hasil Susenas bulan September 2012 menunjukkan sebagian besar rumah tangga miskin adalah rumah tangga pertanian yaitu sebesar 48,8 persen.

Hal ini terkait dengan pendapatan petani dan buruh tani yang rendah dibandingkan upah di sektor lainnya. Upah buruh tani perhari pada tahun 2012 sebesar Rp. 40,302, lebih rendah jika dibandingkan upah buruh bangunan yaitu sebesar Rp. 65.148,-

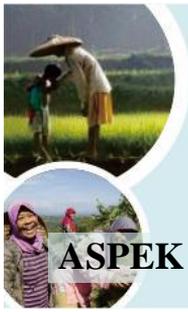
Besarnya jumlah rumah tangga usaha pertanian di Indonesia, tidak sebanding dengan tingkat usahanya.

Hal ini terlihat dari penguasaan lahan pertanian oleh petani di Indonesia yang relatif kecil atau identik dengan petani gurem yang didefinisikan sebagai rumah tangga usaha pertanian pengguna lahan yang menguasai lahan kurang dari 0,5 hektar. Pada tahun 2013, jumlah rumah tangga petani gurem di Indonesia mencapai 14,25 juta atau 55,33 persen dari jumlah rumah tangga usaha pertanian pengguna lahan. Mereka tidak memiliki lahan yang cukup luas untuk mampu menghasilkan pendapatan sesuai kebutuhan hidupnya. Sejatinya realitas tersebut tidak perlu terjadi, jika pelbagai kebijakan politik pembangunan pertanian diarahkan pada peningkatan kesejahteraan petani. Secara empiris, perwujudan kesejahteraan Indonesia dapat dilakukan melalui pembangunan ekonomi dan industri berbasis pertanian. Hal ini merupakan pilihan tepat, sebab sebagai negara agraris sumber daya alam dan sumberdaya manusiacukup tersedia. Tambahan pula, tradisi bertani dikalangan masyarakat Indonesia merupakan tradisi yang sudah mengakar. Pemerintah tinggal membangun infrastruktur yang memadai, teknologi dan industri yang tepat guna serta pemasaran hasil pertanian yang kompetitif .

Terobosan pembangunan pertanian di Indonesia antara lain dilakukan oleh pemerintah melalui kebijakan Revolusi Hijau. Namun, kebijakan ini tidak cukup sukses. Kegagalan kebijakan Revolusi Hijau antara lain dipicu oleh pelaksanaannya yang bersifat terlalu mengedepankan pemerintah sebagai pusat kebijakan dan peningkatan produksi sebagai panglima. Perubahan

di pedesaan akibat modernisasi pertanian (Revolusi Hijau) ini tercermin pada statisnya tingkat kesejahteraan masyarakatnya.

“Pendekatan mata pencaharian” telah menjadi populer dalam perdebatan mengenai pengentasan kemiskinan di Indonesia selama satu dekade terakhir. Profesor Ellis telah menerbitkan sejumlah artikel dan makalah tentang mata pencaharian dan diversifikasi selama beberapa tahun terakhir. Sistem penghidupan (*livelihood system*) adalah kumpulan dari strategi nafkah yang dibentuk oleh individu, kelompok maupun masyarakat di suatu lokalitas.



BAB 6

ASPEK MANAJEMEN KEUANGAN PERTANIAN



6.1 Manajemen Keuangan Pertanian

Anda pasti pernah mendengar atau membaca mengenai kalimat-kalimat yang menggunakan kata “manajemen”. Sekarang perhatikan contoh kalimat berikut ini: “Keberhasilan perusahaan agribisnis sangat ditentukan oleh manajemen perusahaan yang baik”. Berdasarkan kalimat tersebut, muncul pertanyaan apa yang dimaksud dengan manajemen?. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, maka uraian di bawah ini akan menjelaskan konsep manajemen yang dimulai dengan pengertian manajemen, unsur manajemen dan fungsi manajemen (Ismail, 2011).

Ahli manajemen Terry (dalam Janor, H., Rahim, R. A., Yaacob & Ibrahim, 2012) telah menjelaskan mengenai pengertian manajemen, yaitu suatu proses yang terdiri dari perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), penggerakan (*actuating*) dan pengendalian (*controlling*) terhadap sumber daya dengan melibatkan orang-orang untuk mencapai tujuan perusahaan yaitu memaksimalkan keuntungan. Ahli lain Daft (2010) menyatakan bahwa manajemen didefinisikan sebagai pencapaian tujuan-tujuan secara efisien dan efektif melalui perencanaan, pengelolaan, kepemimpinan dan pengendalian sumber daya-sumber daya organisasi. Jika Anda ingin mengetahui lebih mendalam, Anda dapat membaca kedua buku yang ditulis

Terry (1977) dan Daft (2010) tersebut atau membaca buku-buku lain tentang ilmu manajemen.

Berbagai kegiatan yang berbeda akan membentuk manajemen sebagai suatu proses yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain dan mempunyai hubungan yang sangat erat. Ilustrasi mengenai pengertian manajemen sebagai suatu proses dapat Anda lihat pada Gambar 6.1 (Nachrowi & Usman, 2006). Jika Anda perhatikan Gambar 6.1, berbagai sumber daya pokok dari manajemen harus dikaitkan dengan keempat fungsi manajemen agar tujuan perusahaan yang telah ditetapkan dapat terwujud. Tentu Anda akan bertanya sumber daya pokok apa saja yang harus diperhatikan dalam pengelolaan kegiatan usaha? Berikut ini akan diuraikan mengenai sumber daya pokok manajemen atau dinamakan juga dengan unsur-unsur manajemen.



Gambar 6.1 Pengertian Manajemen Sebagai Suatu Proses
(Sumber: Terry, 1977 dalam (Janor et.al, 2012))

Pengelolaan suatu perusahaan membutuhkan sumber daya pokok atau unsur-unsur manajemen. Unsur-unsur manajemen terdiri dari enam (6) atau dikenal dengan 6M yaitu sebagai berikut.

1. Men (manusia). Manusia merupakan unsur manajemen yang sangat penting dalam pengelolaan suatu kegiatan usaha atau perusahaan. Tanpa ada manusia maka perusahaan tidak akan berjalan karena penggerak aktivitas perusahaan adalah manusia. Kondisi tersebut dapat menyebabkan tujuan perusahaan tidak tercapai.
2. Money (uang). Unsur manajemen yang kedua adalah uang. Aktivitas perusahaan dapat dilakukan jika ada sumber daya uang untuk membiayai semua kebutuhan perusahaan mulai dari aktivitas produksi sampai pemasaran produk. Tanpa adanya uang, maka kegiatan usaha tidak akan dapat dilaksanakan seperti yang diharapkan untuk mencapai tujuan perusahaan.
3. Materials (material). Unsur manajemen ketiga adalah material atau bahan-bahan kebutuhan produksi. Jika material tidak ada maka kegiatan perusahaan tidak akan berjalan, karena material merupakan bahan-bahan yang sangat dibutuhkan bagi perusahaan dalam menghasilkan barang atau jasa. Coba Anda perhatikan contoh berikut: bahan-bahan yang diperlukan untuk menghasilkan produksi padi yaitu benih padi, pupuk, dan obat-obatan. Jadi, benih padi, pupuk, dan obat-obatan itu termasuk unsur material. Sekarang silakan Anda cari contoh lain.

4. Machines (mesin). Pada perusahaan, khususnya yang bergerak pada usaha manufaktur (usaha pengolahan), mesin atau peralatan merupakan unsur keempat yang diperlukan dalam manajemen. Jika semua kebutuhan mesin atau peralatan tidak ada, otomatis akan berpengaruh terhadap kegiatan perusahaan karena aktivitas produksi menjadi terhambat.
5. Methods (metode). Metode merupakan unsur ke lima dalam manajemen. Metode merupakan sumber daya yang sangat penting untuk diperhatikan oleh perusahaan. Penggunaan metode yang tepat sangat berhubungan dengan peningkatan efisiensi usaha yang selanjutnya akan berpengaruh terhadap keuntungan perusahaan. Metode mencakup cara-cara atau teknik yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan perusahaan. Pernahkah Anda mendengar istilah “pertanian hidroponik”, “pertanian aeroponik” atau istilah lainnya? Hidroponik dan aeroponik tersebut merupakan metode atau cara dalam menghasilkan produk pertanian.
6. Markets (pasar). Pasar merupakan unsur keenam dalam manajemen. Dalam menjalankan kegiatan bisnis, pasar menjadi pertimbangan utama bagi pelaku bisnis. Apakah Anda tahu apa yang dimaksud pasar? Pasar adalah tempat atau media yang diperlukan untuk terjadinya transaksi antara penjual dan pembeli. Para pembeli akan meminta atau mencari barang yang diperlukan, dikenal dengan “permintaan”. Sebaliknya, para penjual akan

menyediakan barang yang diperlukan oleh pembeli, itulah yang disebut “penawaran”. Dengan demikian, permintaan dan penawaran merupakan komponen penting dalam unsur pasar. Seandainya pelaku bisnis menjalankan kegiatan usaha tetapi tidak ada permintaan dalam pasar tersebut maka kerugian yang akan dihadapi oleh pelaku bisnis. Sementara itu dari sisi penawaran, pelaku bisnis dihadapkan dengan pesaing yang menghasilkan produk yang sama atau produk substitusi (pengganti).

Selanjutnya Daft (2010) menyebutkan bahwa sumber daya-sumber daya organisasi terdiri dari manusia, keuangan, bahan baku, teknologi dan informasi. Jika dicermati satu per satu sumber daya yang disampaikan oleh Daft relatif sama dengan Terry. Daft menggunakan istilah “teknologi” yang maksudnya sama dengan unsur metode menurut Terry. Demikian juga istilah “informasi” menurut Daft dapat dimaknai sama dengan unsur pasar menurut Terry, mengingat pasar mengindikasikan adanya informasi permintaan, penawaran dan harga (Bacidore, J.M., Boquist, J.A., Milbourn & Thakor, 2017).

Sekarang Anda sudah dapat memahami mengenai konsep manajemen berdasarkan uraian sebelumnya. Selanjutnya, bagaimana konsep manajemen keuangan pertanian? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, Anda perlu memahami tiga kata kunci yang melekat pada konsep manajemen keuangan pertanian yaitu (Harney & Tower, 2013): (1) manajemen; (2) keuangan; dan

(3) pertanian. Dari ketiga kata kunci tersebut, konsep manajemen seharusnya sudah Anda kuasai karena telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, sehingga pada bagian ini akan dibahas secara khusus mengenai konsep keuangan, konsep pertanian, dan konsep manajemen keuangan pertanian.

Menurut Bacidore et.al (2017), keuangan adalah kata yang menggambarkan ketersediaan sumber daya uang baik untuk pemerintah, perusahaan atau individu maupun manajemen dari semua sumber daya. Dalam pembahasan ini, perhatian secara khusus ditujukan pada aspek kedua yaitu manajemen keuangan. Lebih lanjut dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan manajemen keuangan yaitu pengelolaan dan pembiayaan (*financing*) sumber daya untuk perusahaan dengan menggunakan uang dan menganggap harga sebagai faktor eksternal yang ditentukan oleh pasar. Aktivitas keuangan juga telah melibatkan banyak fungsi yang saling terkait satu sama lain, seperti yang disampaikan Ali & Afzal (2012), meliputi:

1. Mendapatkan dana
2. Menggunakan dana
3. Memantau kinerja
4. Memecahkan masalah yang terjadi, baik pada masa sekarang maupun pada masa yang akan datang.

Menurut Chen & Dodd (2017), keuangan berhubungan dengan hal berikut.

1. Permintaan modal
2. Penawaran modal
3. Pengaturan dan Pemakaian modal
4. Pengontrolan modal.

Kedua konsep keuangan yang telah dijelaskan oleh Ali & Afzal (2012) maupun Chen & Dodd (2017) di atas mempunyai makna yang sama. Intinya kedua konsep keuangan yang disampaikan mencakup mencari menggunakan, dan mengawasi dana yang digunakan untuk membiayai kegiatan perusahaan. Secara ringkas kegiatan dalam keuangan disajikan pada Gambar 6.2.



Gambar 6.2 Kegiatan dalam Keuangan

Pada teori keuangan modern telah menggunakan asumsi atau persyaratan bahwa sasaran utama dalam bisnis adalah memaksimalkan kekayaan pemegang saham atau surat utang yang diterbitkan perusahaan, yang berarti memaksimalkan harga saham perusahaan. Sasaran keuangan lainnya yang disebutkan di atas juga mempengaruhi kebijakan perusahaan tetapi prioritasnya lebih rendah dibandingkan memaksimalkan harga saham. Semakin tinggi harga saham maka kekayaan pemegang saham semakin meningkat. Dalam pandangan tradisional, sasaran keuangan lebih ditekankan oleh para ekonom yaitu dengan memaksimalkan laba.

Namun demikian, saat ini sasaran memaksimalkan laba saja tidak cukup, khususnya perusahaan berskala besar dan perusahaan yang sudah go public. Sasaran memaksimalkan laba harus diikuti dengan sasaran memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham (pemilik) dengan cara memberikan imbalan yang memadai dari bagian laba yang dihasilkan. Dengan demikian, keputusan penting yang harus dilakukan dalam manajemen keuangan ada tiga, yaitu keputusan investasi, keputusan pembiayaan, dan keputusan pendistribusian laba atau keuntungan.

Keputusan investasi menyangkut keputusan pengadaan aset-aset yang sesuai kebutuhan perusahaan, dalam hal ini terkait dengan keputusan mengalokasikan modal atau dana untuk pengadaan aset-aset yang diperlukan dalam rangka mencapai sasaran maksimisasi laba. Keputusan pembiayaan meliputi keputusan pemenuhan kebutuhan dana. Keputusan pembiayaan merupakan konsekuensi dari adanya keputusan investasi. Oleh karena itu, keputusan pembiayaan harus mengacu dan memperhatikan hasil keputusan investasi, baik yang terkait dengan besar, waktu, maupun sumber pembiayaan (Hayati & Nugroho, 2018).

Keputusan pendistribusian laba (disebut juga kebijakan deviden) menunjukkan bahwa setelah manajemen mampu mengalokasikan sumber daya dalam bentuk investasi untuk mencapai laba yang maksimum, maka penting untuk menetapkan alokasi laba tersebut secara tepat kepada pemegang saham. Kemampuan menghasilkan laba maksimal yang tidak diikuti

dengan kemampuan mendistribusikan laba kepada pemegang saham akan mengakibatkan pemegang saham menarik diri dari perusahaan.

Dalam mempelajari manajemen keuangan pertanian atau dalam mengelola kegiatan usaha, Anda perlu sekali menguasai perbendaharaan istilah-istilah keuangan. Menurut Putri, Pandjaitan, Dharmawan, & Amalia (2016), manfaat yang dapat Anda peroleh dengan menguasai istilah-istilah keuangan yaitu dapat:

1. Mengerti mengenai informasi keuangan
2. Mengetahui cara memanfaatkan informasi tersebut secara efektif
3. Mengkomunikasikan secara jelas tentang aspek kuantitatif kinerja dan hasilnya.

Pengetahuan tentang keuangan dan cara menerapkannya dengan berhasil merupakan salah satu yang penting bagi Anda dalam mempelajari manajemen keuangan secara umum. Pengetahuan mengenai keuangan sangat membantu Anda dalam melakukan perencanaan, pemecahan masalah, dan pengambilan keputusan (Maulida & Yunani, 2017). Para manajer keuangan rata-rata menghabiskan waktu untuk merencanakan, menetapkan sasaran, dan mengembangkan arah tindakan untuk mencapai sasaran perusahaan.

Jika Anda sebagai manajer keuangan maka Anda harus menangani dan menguasai rencana yang lebih luas baik rencana produksi, pemasaran, keuangan, dan personalia (sumber daya manusia). Masing-masing rencana tersebut membutuhkan

pengetahuan keuangan, sehingga memungkinkan terjadinya komunikasi yang lebih baik di antara bagian yang terdapat dalam perusahaan. Sebagai contoh, anggaran perusahaan, dalam hal ini rencana keuangan, mengkomunikasikan tujuan perusahaan secara menyeluruh kepada para pimpinan dalam perusahaan yaitu manajer sehingga dapat diketahui sesuatu yang diharapkan perusahaan terhadap dirinya dan parameter keuangan yang menjadi pedoman dalam perusahaan. Anda harus mampu mengidentifikasi masalah dalam anggaran yang diusulkan sebelum disahkan dan mampu memberikan saran atau rekomendasi terhadap anggaran-anggaran yang disusun (Widiana & Annisa, 2017). Kegagalan Anda dalam memahami anggaran menunjukkan bahwa Anda akan gagal dalam mencapai tujuan perusahaan.

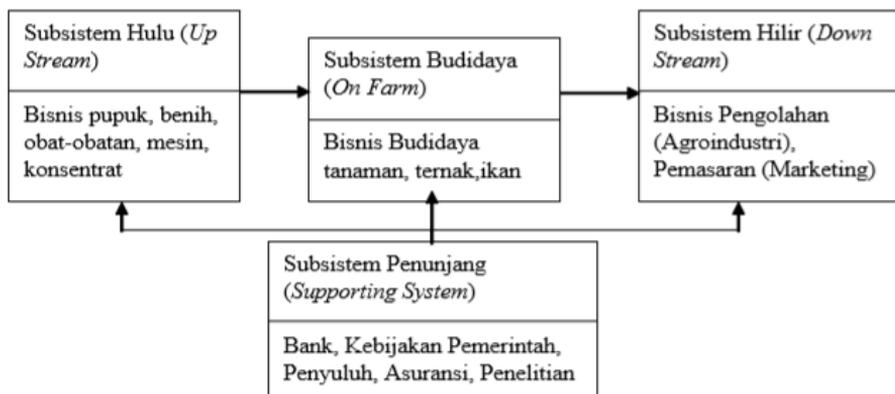
Setelah Anda mengetahui mengenai konsep keuangan maka selanjutnya konsep mengenai pertanian. Pertanian yang dimaksud mengacu pada pertanian dalam arti luas yang mencakup pertanian (tanaman), peternakan, kehutanan dan perikanan. Mengapa pertanian dalam arti luas penting untuk dibahas? Jawabannya dapat Anda peroleh dengan menyimak uraian berikut ini. Di negara-negara berkembang, sektor pertanian merupakan salah satu sektor dalam pembangunan ekonomi yang mempunyai peran yang cukup besar. Anda mungkin akan bertanya bagaimana mengukur peran sektor pertanian dalam pembangunan ekonomi? Untuk mengukur peran sektor pertanian dalam pembangunan ekonomi dapat dilihat dari kontribusi Produk Domestik Bruto (PDB) sektor pertanian terhadap total PDB (Kurniadi, Achsan, & Sasongko, 2014).

Selanjutnya, manajemen keuangan pertanian diartikan pengelolaan keuangan pada kegiatan usaha yang berhubungan dengan sektor pertanian yang mencakup perencanaan, penggunaan, dan pengawasan modal yang digunakan untuk membiayai kegiatan usaha sektor pertanian. Sementara itu, Putri et al (2016) menambahkan bahwa manajemen keuangan pertanian juga mencakup perusahaan di luar sektor pertanian tetapi dalam kegiatannya melibatkan sektor pertanian seperti agroindustri, agrowisata, dan lembaga ekonomi yang menunjang kegiatan sektor pertanian seperti bank. Hal tersebut merupakan subsistem dalam sistem agribisnis. Secara khusus perlu disampaikan bahwa contoh-contoh dan ilustrasi dalam modul ini meliputi semua subsistem dalam agribisnis.

Menurut Widiana & Annisa (2017) sistem agribisnis merupakan suatu rangkaian yang saling terkait di antara subsistem-subsistem yaitu subsistem hulu, usaha tani dan hilir serta pendukung. Agribisnis merupakan konsep dari suatu sistem yang integratif yang terdiri dari subsistem. Agribisnis terdiri dari kumpulan unit/pelaku bisnis yang terdapat pada masing-masing subsistem. Di bawah ini akan dijelaskan masing-masing subsistem sebagai berikut (Kurniadi et al., 2014).

1. Subsistem agribisnis hulu (*up-stream agribusiness*): kegiatan ekonomi yang menghasilkan (agroindustri hulu) dan perdagangan sarana produksi pertanian primer. Contoh: industri pupuk, obat-obatan, benih/bibit, alat mesin pertanian, dan lain-lain.

2. Subsistem usaha tani (*on-farm agribusiness*): sektor pertanian primer, sektor budidaya pertanian.
3. Subsistem hilir (*down-stream agribusiness*): kegiatan ekonomi yang mengolah hasil pertanian primer menjadi produk olahan baik dalam bentuk yang siap untuk dimasak/siap disaji (*ready to cook/ready for used*), siap dikonsumsi serta kegiatan perdagangannya di pasar domestik dan internasional. Contoh: pascapanen, pengemasan, penyimpanan, pengolahan, distribusi, pemasaran, eceran.
4. Subsistem jasa layanan pendukung: kelembagaan dan kegiatan penunjang (*supporting institution and activities*) Contoh: bank dan lembaga keuangan, transportasi, penyuluhan dan layanan informasi agribisnis, penelitian dan pengembangan, asuransi, dan lain lain. Gambar 6.3 menjelaskan mengenai keterkaitan diantara subsistem-subsistem dalam sistem agribisnis.



Gambar 6.3 Keterkaitan Subsistem dalam Sistem Agribisnis

(Sumber: Kurniadi et al., 2014)

6.2 Kegiatan dalam Manajemen Keuangan Pertanian

Pihak yang mempunyai hubungan erat dengan manajemen keuangan secara umum yaitu manajer keuangan. Tanggung jawab manajer keuangan akan menggambarkan kegiatan-kegiatan dalam manajemen keuangan. Tanggung jawab yang paling utama bagi manajer keuangan yaitu merencanakan pengadaan dan penggunaan dana guna memaksimalkan keuntungan perusahaan (Weston and Brigham, 1990). Hal tersebut menunjukkan bahwa seorang manajer keuangan sangat menentukan dalam pengadaan dana untuk perusahaan dengan melihat berbagai alternatif sumber-sumber pendanaan yang tersedia. Selain mencari sumber-sumber pendanaan, seorang manajer keuangan juga sangat menentukan dalam penggunaan dana sehingga tujuan perusahaan tercapai.

Selanjutnya, Hermawan & Andrianyta (2016) menjelaskan mengenai beberapa rincian kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan manajemen keuangan yaitu sebagai berikut.

1. Peramalan dan perencanaan keuangan.

Manajer keuangan harus berinteraksi dengan manajer lainnya dalam memperkirakan masa depan perusahaan dan menetapkan rencana bersama untuk menentukan posisi masa depan perusahaan.

2. Pengambilan keputusan dalam investasi dan pembiayaan.

Sesuai dengan rencana jangka panjang, manajer keuangan harus menyediakan modal guna mendukung pertumbuhan. Perusahaan yang berhasil biasanya memperoleh tingkat

penjualan yang tinggi, yang membutuhkan penambahan investasi lahan, bangunan (pabrik), peralatan dan aktiva (aset) lancar yang perlu untuk menghasilkan barang dan jasa. Manajer keuangan harus membantu penentuan tingkat pertumbuhan penjualan yang optimal dan pengambilan keputusan atas investasi spesifik yang akan dilaksanakan serta penentuan jenis dana yang akan digunakan untuk membiayai investasi tersebut. Seorang manajer keuangan harus mempertimbangkan keputusan tentang penggunaan dana internal atau eksternal, seperti dari utang.

3. Pengkoordinasian dan pengendalian keuangan.

Manajer keuangan harus bekerja sama dengan manajer bidang lainnya agar perusahaan beroperasi seefisien mungkin. Semua keputusan bisnis mempunyai implikasi keuangan dan semua manajer baik bidang keuangan maupun bidang lainnya, harus memperhitungkan hal ini. Seperti misalnya keputusan pemasaran akan mempengaruhi pertumbuhan penjualan yang selanjutnya menyebabkan perubahan-perubahan kebutuhan akan investasi. Dengan demikian, pengambil keputusan pemasaran harus mempertimbangkan dengan cara bagaimana tindakan manajer mempengaruhi dan dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti ketersediaan dana, kebijakan mengenai persediaan dan pemanfaatan kapasitas perusahaan (pabrik).

4. Interaksi dengan pasar modal.

Manajer keuangan harus berhubungan dengan pasar uang dan pasar modal. Seperti yang telah diketahui bahwa setiap perusahaan sering kali membutuhkan tambahan dana. Sebagai

contoh, perusahaan mungkin perlu membangun pabrik baru atau memperluas lahan pertanian agar mampu memenuhi permintaan pasar, atau mungkin melakukan perluasan ke bidang usaha lain. Jika perusahaan ingin mengembangkan usahanya dan membutuhkan dana sebesar Rp 200 juta tetapi modal sendiri yang tersedia hanya Rp 50 juta sehingga perlu pendanaan dari sumber lain.

Kebutuhan tambahan dana tersebut dapat dipenuhi dari dana milik sendiri (pemilik perusahaan) atau mencari dari sumber lain di luar perusahaan. Umumnya dana milik sendiri tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan investasi sehingga pasar uang atau pasar modal menjadi suatu alternatif sumber pendanaan yang perlu diperhatikan. Uraian mengenai sumber-sumber pendanaan akan dibahas secara mendetail pada modul yang membahas sumber pendanaan.

Seperti yang dijelaskan oleh Fariyanti (2016) mengenai kegiatan dalam manajemen keuangan, menurut Hermawan & Andrianyta (2016) ada lima faktor yang harus menjadi dasar pemikiran khusus di bidang manajemen keuangan. Keputusan-keputusan yang berhubungan dengan bidang keuangan yaitu sebagai berikut.

1. Menentukan besarnya jumlah modal yang diperlukan oleh perusahaan.
2. Menentukan arus investasi modal yang mempunyai banyak alternatif pemakaian.
3. Menentukan sumber dan komposisi keuangan yang akan dipakai.

4. Menentukan strategi dalam menghilangkan dan mengurangi risiko keuangan perusahaan dan faktor ketidakpastian.
5. Menentukan bentuk badan hukum perusahaan.

6.3 Contoh Kasus

Uraian mengenai peran penting manajemen keuangan pertanian dalam pengambilan keputusan perusahaan akan dijelaskan berdasarkan teori dasarnya yaitu manajemen keuangan secara umum. Manajemen keuangan mempunyai peran yang sangat penting dalam pengambilan keputusan bisnis, termasuk pada bisnis atau usaha pertanian. Bagaimana peran penting manajemen keuangan pada usaha pertanian, khususnya dalam pengambilan keputusan? Untuk memperoleh jawaban terhadap pertanyaan tersebut, Anda dapat mencermati contoh berikut ini.

Dua perusahaan yang bergerak dalam bisnis pertanian pada contoh berikut dapat digunakan untuk menggambarkan bagaimana pentingnya manajemen keuangan pada usaha pertanian dan pengaruh keputusan keuangan terhadap keberlanjutan bisnis. Perusahaan pertanian A merupakan salah satu perusahaan yang mempunyai perkembangan bisnis yang sangat cepat, sedangkan perusahaan pertanian B merupakan salah satu perusahaan yang sedang mengalami penurunan bisnis bahkan mendekati kondisi kebangkrutan. Sekarang kita lihat dari segi pengelolaan keuangan pada kedua perusahaan tersebut. Pertama sekali kita lihat sumber pendanaan untuk membiayai kegiatan usahanya.

Secara singkat yang perlu Anda ketahui mengenai sumber pendanaan adalah ada dua sumber pendanaan yang dapat digunakan perusahaan untuk mengelola kegiatan bisnis yaitu sumber dana internal dan sumber dana eksternal. Sumber dana internal merupakan sumber dana yang berasal dari modal sendiri pemilik perusahaan sedangkan sumber dana eksternal merupakan sumber dana yang berasal dari luar perusahaan seperti lembaga pembiayaan (perbankan, pegadaian, dan lembaga keuangan bukan bank lainnya).

Pada perusahaan pertanian A dalam mengelola kegiatan bisnisnya hanya sedikit menggunakan dana yang bersumber dari luar perusahaan atau dikenal juga dengan dana pinjaman atau hutang. Perusahaan tersebut lebih banyak menggunakan dana yang bersumber dari modal sendiri. Sementara itu, pada perusahaan pertanian B sebagian besar menggunakan dana dari luar untuk membiayai kegiatan usaha perusahaan. Akibatnya, perusahaan harus mengeluarkan dana rutin untuk membayar bunga pinjaman. Gambaran tersebut menunjukkan bahwa kedua perusahaan memiliki perbedaan dalam membiayai kegiatan bisnisnya. Analisis selanjutnya adalah jika terjadi peningkatan tingkat suku bunga pinjaman dari lembaga pembiayaan (bank dan lainnya), bagaimana pengaruh perubahan tingkat suku bunga pinjaman terhadap perkembangan bisnis kedua perusahaan pertanian, dengan kondisi lainnya tetap (*ceteris paribus*)?.

Dengan adanya peningkatan suku bunga pinjaman maka perusahaan pertanian B harus membayar angsuran, yang terdiri dari pokok pinjaman dan tingkat bunga pinjaman, yang semakin besar. Kondisi angsuran terhadap pinjaman yang semakin besar karena tingkat bunga yang semakin besar, maka laba yang diperoleh perusahaan pertanian B semakin lama akan semakin menurun karena angsuran merupakan biaya yang harus dikeluarkan perusahaan. Jika perusahaan pertanian B tidak segera melakukan perubahan dalam pengelolaan keuangan maka perusahaan akan mengalami kebangkrutan (pailit).

Kondisi sebaliknya pada perusahaan pertanian A, karena pinjaman hanya sedikit sehingga biaya bunga pinjaman pun tidak terlalu membebani perusahaan dan penurunan keuntungan akibat peningkatan suku bunga tidak terlalu besar. Selain itu, keuntungan yang diperoleh perusahaan pertanian A dapat digunakan untuk pengembangan usaha yang semakin besar. Berdasarkan pada contoh tersebut dapat dinyatakan bahwa manajemen keuangan, khususnya manajemen keuangan pada usaha pertanian, menjadi sangat penting dalam pengambilan keputusan bisnis. Selanjutnya berdasarkan pada historisnya, peran manajemen keuangan telah mengalami perubahan besar selama bertahun-tahun. Menurut Weston and Brigham (1990) terdapat lima (5) periode yang dapat menggambarkan perkembangan peran manajemen keuangan. Uraian di bawah ini akan menjelaskan lima periode seperti yang dikemukakan oleh Weston and Brigham (1990). Pada periode tahun 1900-an, manajemen keuangan merupakan bidang ilmu tersendiri yang telah menekankan pada aspek hukum dari

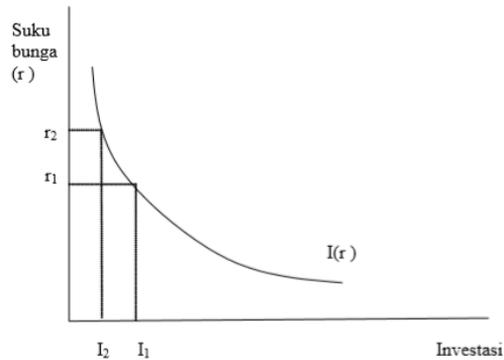
penggabungan perusahaan (merger), konsolidasi, pembentukan perusahaan baru dan berbagai jenis saham (sekuritas) yang merupakan surat berharga yang diterbitkan perusahaan untuk memperoleh modal.

Sebuah kasus di Amerika Serikat menunjukkan bahwa pada periode tersebut proses industrialisasi telah melanda negeri itu. Selain itu, perusahaan besar telah mengalami masalah besar yaitu terbatasnya jumlah modal untuk melakukan pengembangan usaha. Hal tersebut disebabkan banyak penanam modal yang enggan membeli saham atau surat berharga yang diterbitkan perusahaan, sehingga perusahaan kesulitan memperoleh modal untuk pengembangan usaha. Selanjutnya pada periode tahun 1930-an telah terjadi perubahan peran manajemen keuangan pada perusahaan, yang dengan penekanan tidak lagi pada pengembangan usaha tetapi pada upaya mempertahankan usaha. Pada periode tersebut ternyata banyak perusahaan yang mengalami kegagalan karena adanya depresi.

Apakah Anda mengetahui apa yang dimaksud dengan depresi? Depresi adalah periode kegiatan ekonomi sangat rendah dengan tingkat pengangguran yang tinggi dan kelebihan kapasitas yang tinggi (Lipsey et al., 1997). Selanjutnya, Mankiw (2000) menyatakan bahwa depresi merupakan kondisi resesi yang sangat menekan, yang ditunjukkan dengan pendapatan nasional atau Produk Domestik Bruto (Gross National Product) riil menurun sangat drastis. Pada kondisi tersebut perekonomian menghadapi masa-masa sulit sehingga berpengaruh terhadap keberlanjutan perusahaan.

Sementara itu, pada periode tahun 1940 hingga 1950-an telah terjadi perubahan pada konsep manajemen keuangan perusahaan. Pada periode tersebut manajemen keuangan sudah mulai mempertimbangkan konsep memaksimalkan laba atau keuntungan perusahaan. Hal tersebut menunjukkan bahwa fokus manajemen keuangan mulai berpindah dari sudut pandang pihak luar perusahaan ke pihak dalam perusahaan, karena lebih memperhatikan keuntungan perusahaan. Di samping hal tersebut, semua keputusan keuangan di dalam perusahaan telah diakui sebagai masalah penting dalam pengelolaan keuangan perusahaan. Pada periode ini analisis keuangan juga sudah mulai berkembang dengan penggunaan teknologi informasi seperti komputer. Pada tahun 1960 hingga 1970-an manajemen keuangan perusahaan telah dirancang kembali guna membantu manajemen umum mengambil tindakan untuk memaksimalkan laba atau keuntungan perusahaan dan kekayaan pemegang saham, dengan mengakui bahwa hasil keputusan keuangan perusahaan tergantung pada investor.

Hal tersebut menyebabkan teori investasi menjadi bagian dalam manajemen keuangan. Pada teori investasi, perusahaan membeli barang-barang investasi untuk menambah persediaan modal dan atau mengganti modal yang habis dipakai. Menurut Mankiw (2000), investasi sangat dipengaruhi oleh besar kecilnya tingkat suku bunga. Pengaruh tingkat suku bunga terhadap investasi menunjukkan pengaruh yang negatif. Adapun maksud dari pengaruh negatif yaitu semakin tinggi tingkat bunga maka investasi akan semakin menurun. Hubungan tingkat suku bunga dan investasi dapat dilihat pada Gambar 6.4.



Gambar 6.4 Hubungan Tingkat Suku Bunga dan Investasi

Berdasarkan Gambar 6.4, jika tingkat suku bunga pinjaman sebesar r_1 maka perusahaan akan meminjam dana untuk melakukan investasi sebesar I_1 . Investasi dilakukan untuk mengembangkan bisnis dengan melakukan pembelian aset baru. Bila suatu saat lembaga perbankan meningkatkan tingkat suku bunga pinjaman dari r_1 menjadi r_2 , maka perusahaan akan menurunkan investasi menjadi sebesar I_2 sehingga pengembangan usaha tidak dilakukan.

Penurunan investasi terjadi karena perusahaan yang akan meminjam dana dari bank akan membayar angsuran lebih besar jika tingkat suku bunga meningkat. Kondisi sebaliknya terjadi jika tingkat suku bunga pinjaman menurun dari r_2 menjadi r_1 , maka investasi akan mengalami peningkatan dari I_2 menjadi I_1 . Pada umumnya investasi berhubungan dengan nilai aset yang sangat besar dan periode waktunya jangka panjang. Periode selanjutnya yaitu pada periode tahun 1980-an peran manajemen keuangan telah berkembang dengan menekankan diantaranya pada lembaga keuangan, metode baru, dan inovatif dalam pembiayaan investasi jangka panjang.

Beberapa teknik pembiayaan muncul karena adanya kondisi perekonomian seperti saham yang berisiko tinggi dan berpenghasilan tinggi. Berdasarkan pada uraian di atas, yang lebih memfokuskan pada substansi, menunjukkan bahwa manajemen keuangan secara umum mempunyai peran yang semakin penting. Peran penting manajemen keuangan juga dapat dilihat dari peran pelaku manajemen. Jika dilihat dari peran manajer, menunjukkan bahwa dahulu manajer pemasaran berperan memproyeksikan penjualan, sedangkan manajer keuangan hanya berperan menyediakan uang untuk membeli pabrik, peralatan, dan persediaan yang diperlukan.

Namun demikian, dengan berkembangnya lingkungan dan waktu maka keputusan dalam perusahaan telah dikoordinasikan antarmanajer sehingga manajer keuangan pada umumnya mengemban tanggung jawab langsung tidak hanya menyediakan uang saja tetapi juga mengalokasikan uang dan mengendalikan uang. Selanjutnya Pinches (1995) menjelaskan mengenai manajemen keuangan yang sangat berarti.

Jika melihat pada tujuh (7) ide dalam manajemen keuangan maka salah satunya adalah mengenai tujuan perusahaan. Tujuan perusahaan salah satunya yaitu memaksimalkan nilai pasar (market value). Nilai pasar yang dimaksud yaitu harga saham perusahaan pada pasar modal atau saham. Tujuan memaksimalkan nilai pasar merupakan tujuan untuk memaksimalkan kekayaan pemegang saham. Seperti yang dikemukakan oleh Siegel and Shim (1991), Brigham and Houston (2007) serta Van Horne and Wachowicz (2001) yang menyatakan bahwa sasaran keuangan

pada konsep yang modern yaitu memaksimalkan kekayaan pemegang saham. Selain tujuan memaksimalkan nilai pasar, tujuan lain perusahaan diantaranya adalah memaksimalkan penjualan (sales), penerimaan (return), atau pendapatan bersih (net income).

Meskipun demikian, tujuan akhir manajemen keuangan tetap yaitu memaksimalkan nilai pasar perusahaan. Kekayaan pemegang saham yang dimaksimalkan merupakan sasaran keuangan jangka panjang karena para pemegang saham tertarik dengan laba masa depan maupun laba sekarang, sedangkan memaksimalkan laba merupakan sasaran keuangan jangka pendek. Para pemegang saham lebih banyak memilih untuk memaksimalkan kekayaan karena telah mempertimbangkan hal-hal berikut.

1. Kekayaan untuk jangka panjang
2. Risiko dan ketidakpastian yang dihadapi
3. Adanya penjadwalan hasil. Penjadwalan hasil merupakan hal yang penting karena hasil yang lebih cepat diterima akan mengurangi risiko dan ketidakpastian mengenai diterima tidaknya hasil dan uang yang diterima dapat ditanamkan kembali lebih cepat.
4. Pendapatan para pemegang saham.

6.4 Ringkasan

Modal merupakan penggerak pokok bagi pengembangan usaha. Dalam usaha tani, kredit pertanian merupakan salah satu faktor pelancar pembangunan pertanian. Manfaat modal bagi petani adalah: (1) membantu petani kecil dalam mengatasi keterbatasan modal dengan bunga relatif kecil, dan (2) mengurangi ketergantungan petani pada pedagang perantara dan pelepas uang. Ketersediaan modal bagi pelaku usaha pertanian merupakan keharusan. Fungsi modal tidak hanya sebagai salah satu faktor produksi, tetapi juga berperan dalam peningkatan kapasitas petani dalam mengadopsi teknologi seperti benih bermutu, pupuk, alat-alat pertanian, dan teknologi pasca panen.

Kondisi riil pada masyarakat perdesaan umumnya adalah bahwa sumber daya permodalan untuk usaha tani masih lemah dan cenderung seadanya. Hampir 90 persen petani mandiri menggunakan modal sendiri untuk membiayai usaha pertaniannya. Tiap musim tanam tiba, petani mengusahakan modal dari berbagai cara agar dapat menanam, termasuk menggunakan aset pribadi. Sementara pendapatan dan aset petani juga digunakan untuk berbagai keperluan keluarganya untuk konsumsi pangan, pakaian, sekolah anak, kesehatan, dan biaya sosial.

Kondisi tersebut disebabkan usaha pertanian yang sebagian besar berupa petani gurem dan kecil dihadapkan kepada keterbatasan akses layanan usaha, terutama permodalan. Ketidakmampuan masyarakat perdesaan dalam mengakses permodalan dari lembaga keuangan formal disebabkan oleh: (1)

keberadaan lembaga keuangan formal di perdesaan masih sangat terbatas, (2) prosedur dan persyaratan yang diminta oleh lembaga keuangan formal dinilai sulit dan berat, dan (3) petani tidak mampu mengakses kredit dengan aturan dan suku bunga seperti yang ditetapkan pada usaha komersial diluar agribisnis.

Keberadaan LKM-A menjadi salah satu solusi dalam pembiayaan sektor pertanian di perdesaan karena mempunyai peran strategis sebagai penghubung dalam aktifitas perekonomian masyarakat tani. LKM-A juga berperan menguatkan kelembagaan petani dalam pengembangan agribisnis yang tidak lepas dari lemahnya akses petani terhadap berbagai sumber daya produktif, yaitu: modal, teknologi, dan informasi pasar.

Tujuan umum pembentukan dan pengembangan LKM-A ialah untuk membantu memfasilitasi kebutuhan modal usahatani bagi petani. Secara khusus pembentukan LKM-A bertujuan untuk: (1) meningkatkan kemudahan akses petani terhadap skim pembiayaan yang disediakan pemerintah atau pihak lainnya, (2) meningkatkan produktivitas dan produksi usahatani dalam rangka mendorong tercapainya nilai tambah usaha tani, dan (3) mendorong pengembangan ekonomi perdesaan dan lembaga ekonomi perdesaan, utamanya Gapoktan.



BAB 7 SOSEK PERTANIAN DI ERA GLOBAL

7.1 Petani Modern (Industry 4.0)

Marphy & Priminingtyas (2019) dengan tegas menyatakan bahwa pelaku utama pembangunan pertanian di Indonesia pada dasarnya adalah: petani kecil, pekebun kecil, peternak skala kecil dan nelayan/petambak berlahan sempit. Tentang hal ini, sebuah kajian yang dilakukan oleh Tim Peneliti IPB pada 1981 melaporkan bahwa, pendapatan keluarga "petani kecil" yang berasal dari usaha taninya sendiri hanya sebesar 25% penghasilan keluarganya. Informasi seperti itu juga terungkap di Kabupaten Magelang (Junaedi, Setyawan, & Soepatini, 2016) dan propinsi Jawa Tengah pada umumnya (Prabowo, Wijayanti, & Saddaruddin, 2018).

Menghadapi kenyataan yang dihadapi petani-petani kecil tersebut, Djoni & Rohman (2010) menawarkan alternatif strategi untuk memperbaiki keadaan pertanian di Indonesia melalui "modernisasi pertanian". Melalui strategi ini, diyakini akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi, membuka peluang yang lebih baik untuk perubahan struktur ekonomi, perluasan kesempatan kerja, peningkatan pendapatan dan kesejahteraan serta pemerataan, dan kelestarian lingkungan hidup; yang merupakan ciri-ciri dari pelaksanaan pembangunan pertanian yang berkelanjutan.

Usaha tani modern, adalah suatu usaha tani yang memiliki ciri-ciri (Elizabeth, 2017);

1. Selalu dapat memperbaiki teknologinya
2. Selalu dapat menyesuaikan jenis tanaman dan ternak yang diusahakan dengan perubahan permintaan pihak konsumen dan dengan perubahan biaya produksi yang ditimbulkan oleh perubahan-perubahan teknologi.
3. Selalu dapat menyesuaikan perbandingan faktor-faktor produksi yang berupa tanah, modal, dan tenaga kerja yang digunakan, dengan perubahan jumlah penduduk, perubahan kesempatan kerja, dan perubahan teknologi.

Di pihak lain, Elizabeth (2017), menyatakan bahwa pertanian modern sebagai pertanian yang tangguh dan efisien yang dikelola secara professional dan memiliki keunggulan untuk memenangkan persaingan, baik di pasar domestik maupun di pasar global. Pertanian modern seperti itu, memiliki ciri-ciri:

1. Usahanya merupakan industri/perusahaan pertanian, memenuhi skala ekonomi, menerapkan teknologi maju dan spesifik lokasi, termasuk mekanisasi pertanian, menghasilkan produk segar dan olahan yang dapat bersaing di pasar global (lokal dan internasional), dikelola secara profesional, mampu tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan, memiliki “brand image” (citra nama/merk), berskala internasional dan mampu memproduksi di luar musim.
2. Petaninya mampu mengambil keputusan-keputusan yang rasional dan inovatif, memiliki jiwa kewirausahaan yang

tinggi, mempunyai kemampuan manajemen modern dan profesional, mempunyai jejaring (networking) yang luas, mempunyai akses informasi ke pasar global dan mempunyai posisi tawar yang kuat.

3. Organisasinya mempunyai organisasi/asosiasi di antara petani yang kuat (solid) dan berjenjang dari tingkat desa ke tingkat nasional, bisa mengakses lembaga keuangan dan lembaga bisnis lainnya.
4. Aturan mainnya, mencerminkan adanya kesadaran tingkat makro dan mikro serta secara operasional berpihak kepada petani, khususnya dalam konteks perdagangan global, tidak tumpang tindih, konsisten dengan meminimumkan inkonsistensi di antara berbagai kebijaksanaan yang ada.

Sedang pertanian modern, yang maju, efisien dan tangguh itu, mempunyai kemampuan (Sumastuti, 2004): 1. Memanfaatkan sumberdaya pertanian secara berkelanjutan, 2. Mengelola keterkaitan (linkages) ke belakang dan ke depan yang erat dengan kegiatan ekonomi lainnya, sehingga menjadi salah satu penentu dalam mendorong berkembangnya sektor ekonomi terkait. 3. Menyerap dan mendiversifikasikan tenaga kerja produktif di perdesaan, sekaligus sebagai media untuk pemerataan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di perdesaan. 4. Antisipatif menghadapi perubahan-perubahan lingkungan strategis baik di tingkat domestik, regional dan internasional. 5. Mengimplementasikan kesepakatan-kesepakatan dunia seperti GATT, WTO dan kesepakatan-kesepakatan lainnya. Jadi, usaha tani yang modern merupakan usaha tani yang sifatnya komersial,

yang selalu dinamis dan luwes (flexible) dan yang produktivitasnya selalu (terus menerus) meningkat.

Kehadiran revolusi genetika dalam pertanian melalui bioteknologi disambut gembira tidak hanya oleh peneliti, tetapi juga oleh praktisi pertanian. Bioteknologi merupakan teknologi yang memanfaatkan agen hayati (makhluk hidup) yang telah mengalami rekayasa genetika atau bagian-bagian untuk menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia dan lingkungannya.

Pada masa lalu gen ditransfer melalui persilangan biasa atau cara konvensional pada tanaman sekerabat. Misalkan padi atau jagung varietas yang satu dengan varietas padi atau jagung varietas yang lain. Perkembangan teknologi pertanian modern melalui bioteknologi dapat memindahkan gen dari spesies apa saja ke spesies lain melalui berbagai cara, antara lain dengan pemanfaatan vektor pemindah gen. Teknik semacam ini telah banyak dikembangkan untuk tanaman budidaya. Produk rekayasa genetika jagung, kedelai dan kapas telah dihasilkan dan dijual oleh perusahaan agrokimia multinasional seperti Novartis, Monsanto, Zeneca dan lain-lain. Melalui bioteknologi diharapkan muncul tanaman tahan terhadap hama dan penyakit, dapat tumbuh di lahan yang mempunyai kendala cekaman fisik (tanah garam, tanah masam, cekaman kekeringan dan lain-lain) sesuai dengan harapan peneliti/pemulia tanaman. Bioteknologi manusia mampu melewati batasan biologi, baik itu kelompok hewan, tumbuhan maupun mikroorganisme dalam memasukkan sifat yang diinginkan.

Bioteknologi dan industri bioteknologi dalam dasawarsa terakhir berkembang sangat pesat. Tercatat sampai dengan tahun 1997 tidak kurang dari 124 "organisme baru" terutama tanaman-tanaman transgenik (tanaman yang telah mengalami rekayasa genetik) telah dimintakan izin dan dipatenkan untuk dibudidayakan dan dipasarkan secara global (Setiawan, Satria, & Tjitropranoto, 2019). Ratusan ribu produk hayati termasuk di dalamnya makhluk tanaman, hewan dan mikroba telah dipaten oleh negara-negara maju, termasuk Amerika-Serikat, negara-negara Uni Eropa, dan Jepang.

Pengembangan bioteknologi melalui rekayasa genetika berlandaskan pada keanekaragaman hayati atau dapat dikatakan bahwa keanekaragaman hayati merupakan aset pengembangan bioteknologi. Indonesia merupakan negara dengan kekayaan keanekaragaman hayati terbesar di dunia, diikuti oleh Brazil, Zaire, dan negara-negara berkembang lainnya (Paungdrianagari, Setyowati, & Qonita, 2019). Dapat dipastikan bahwa negara-negara yang maju teknologinya adalah negara-negara miskin keanekaragaman hayati, sedang negara yang kaya keanekaragaman hayatinya terbatas kemampuan teknologinya. Diperkirakan di dunia ini terdapat 5 - 30 juta spesies (jenis makhluk hidup), dan hanya sekitar 1,4 juta yang telah teridentifikasi secara ilmiah

Di samping nilai tambah ekonomis, pemanfaatan tanaman dan hewan yang telah mengalami rekayasa mempunyai potensi merugikan terhadap keanekaragaman hayati dan kesehatan lingkungan termasuk kesehatan manusia dan ternak. Sebagai

contoh, padi yang toleran herbisida akan memacu peningkatan pemakaian pestisida. Padi yang diberi masukan berupa gen *Bacillus thuringensis* akan mengganggu keseimbangan ekologi. *Bacillus thuringensis* (Bt) adalah mikroorganisme yang menghasilkan racun yang menghalangi serangga hama secara alami. Bt merupakan pestisida alami karena dapat mengendalikan hama tertentu yang ditargetkan tanpa meninggalkan pengaruh pada mamalia, burung atau spesies serangga dan mikroorganisme yang menguntungkan (Paungdrianagari et al., 2019).

Produk rekayasa genetika ternyata semakin meluas. Di Amerika Serikat areal pertanaman yang menggunakan varietas rekayasa genetika telah meningkat dari enam juta are pada tahun 1996 menjadi 30 juta are pada tahun 1997. Pada tahun-tahun mendatang sekitar 40 persen tanaman kedelai di Amerika adalah kedelai yang dimodifikasi secara genetik. Bahkan beberapa perusahaan besar telah mempunyai berbagai varietas rekayasa genetika yang telah memperoleh hak paten.

Perusahaan multinasional bioteknologi Monsanto telah mengembangkan benih terminator, Novartis Swiss dengan Traitior dan Zeneca dengan Verminator yang intinya sama, benih tersebut akan membunuh turunannya, kecuali diberi pemicu bahan kimia yang diproduksi oleh perusahaan itu sendiri. Benih ini telah disusupi dengan gen "suicide seed/benih bunuh diri" sehingga petani tidak akan dapat lagi menyisihkan hasil panennya untuk dijadikan benih, karena turunan pertamanya tidak dapat tumbuh. Setiap kali menanam, petani harus membeli benih dari perusahaan/agen, sehingga ketergantungan petani terhadap benih tersebut makin besar.

Banyak negara menolak kehadiran benih hasil rekayasa genetika ini. Negara-negara Eropa jelas-jelas menolak produk transgenik. Padahal produk pertanian Amerika kebanyakan adalah hasil tanaman rekayasa genetika. Karena ditolak di negara-negara Eropa yang sangat ketat peraturannya, boleh jadi produk-produk tersebut dialihkan ke negara-negara sedang berkembang termasuk Indonesia yang peraturannya masih longgar dan belum banyak tahu mengenai bahaya pangan hasil tanaman transgenik. seperti dikemukakan oleh Geri Guidetti dari The Ark Institute bahwa: "tidak pernah sebelumnya manusia menciptakan bahaya yang sedemikian besar, jauh dari pencapaian dan merupakan rencana sempurna yang berpotensi untuk mengendalikan kehidupan, penyediaan pangan dan bahkan kehidupan seluruh manusia di planet ini". Organisasi nonpemerintah di seluruh dunia menolak keras suicide seeds yang dikenal sebagai teknologi terminator dan banyak yang meminta agar dilarang. Seperti dikemukakan oleh Hope Sand dan Pat Mooney dari RAFI (Rural Advancement Foundation International, Kanada)". Teknologi tersebut mengancam keamanan pangan dan keanekaragaman hayati".

7.2 Contoh Pertanian Modern

Porsi lahan pertanian Jepang hanya 25% dari total wilayahnya yang sebagian besar berupa pegunungan. Namun jumlah yang kecil tersebut mampu memberikan kontribusi yang besar terhadap perekonomian Jepang. Dilatar belakangi dengan sumberdaya alam yang miskin, Jepang menjadi bangsa yang

berpola pikir untuk selalu “berkreasi dan menciptakan” di segala bidang termasuk bidang pertaniannya.

Pasca kekalahan perang pada Perang Dunia II, Jepang mulai beralih pada pembangunan ekonomi dengan Pertanian sebagai prioritas utama saat itu. Kebijakan Pembangunan pertanian yang diambil telah diperhitungkan memiliki efek jangka panjang untuk keberlangsungan pertanian itu sendiri. Selain itu beberapa kebijakan saling mendukung untuk memunculkan impact yang besar.

Salah satu kebijakan yang diambil dan manfaatnya dirasakan sampai saat ini adalah Peraturan Nasional tentang Konsolidasi (Penyatuan) Lahan tahun 1961. Kebijakan ini diambil karena kepemilikan lahan pertanian saat itu terpecah-pecah dan luasannya kecil sehingga tidak efektif. Kebijakan konsolidasi lahan tersebut berlaku secara nasional dan wajib bagi seluruh petani di Jepang. Untuk mendukung kebijakan ini, pemerintah Nasional dan Pemerintah Lokal juga memprioritaskan pembangunan infrastruktur sekitar kawasan pertanian seperti jalan usahatani, saluran air, dll. Tidak heran bila saat ini kepemilikan lahan pertanian berkisar antara 10 – 30 hektar/KK dan berada sekitar jalan raya (yang notabene merupakan jalan usahatani). Dengan luas kepemilikan lahan yang besar dan terpusat pada satu lokasi, membuat produktivitas pertanian Jepang sangat tinggi. Hal ini sangat besar manfaatnya terutama karena pertanian hanya bisa dilakukan satu musim (Jepang memiliki 4 musim) yaitu pada musim panas. Produktivitas yang tinggi akan menutupi masa tidak produktif pada musim Dingin dan gugur.

Peran pemerintah dalam pembangunan pertanian secara umum semakin lama semakin berkurang. Saat ini pemerintah Jepang hanya berfungsi sebagai pembuat peraturan dan mengeluarkan kebijakan. Sementara berbagai aktivitas lapangan banyak diambil alih oleh Japan Agriculture Cooperative (JA Cooperative) atau sejenis koperasi pertanian di Indonesia. Sebenarnya terdapat beberapa organisasi pertanian di Jepang, namun yang paling dominant adalah JA Cooperative. JA Cooperative pada awalnya merupakan lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah Jepang sejak awal 1900 an, dan beranggotakan Petani-petani Jepang. Tujuannya adalah untuk membantu mengurangi kemiskinan dan meningkatkan pendapatan petani. Ini berarti bahwa harus terjadi mobilisasi massa petani, mengatur perusahaan pertanian dan aktivitas mereka, serta memperkuat perekonomian mereka. Agar berhasil menjalankan fungsinya, setiap petani wajib menjadi anggota JA cooperative. Keharusan ini sudah diterapkan sejak tahun 1931. Oleh karenanya saat ini seluruh petani di Jepang otomatis menjadi anggota JA Cooperative. Saat ini JA Cooperative telah benar-benar bebas dari Pemerintah dan merupakan lembaga swasta murni yang kepengurusannya terdiri dari para petani. Namun demikian kerjasama dengan pemerintah semakin meningkat.

Saat ini seluruh wilayah Jepang memiliki JA Cooperative yang secara umum tugas nya adalah sangat banyak yakni :

- Memberikan nasehat dalam mengelola usahatani, penguasaan teknologi, dan penyebaran informasi pertanian
- Mengumpulkan, mengangkut, dan mendistribusikan serta menjual produk pertanian
- Penyediaan sarana produksi
- Mengatur pengolahan produk pertanian dan penyimpanan produk
- Sebagai Bank
- Sebagai badan asuransi, dan
- Menyediakan sarana pelayanan kesehatan masyarakat khususnya petani.

Untuk menjalankan fungsi tersebut JA Cooperative memiliki jaringan kerjasama yang sangat besar dengan dengan pasar local khususnya supermarket, pasar internasional, dan pemerintah. Selain itu JA Cooperative juga memiliki berbagai fasilitas pertanian yang tersebar di seluruh Jepang seperti Packaging center, Processing center, Pasar Saprodi, Pasar penjualan langsung (direct sale market), supermarket, Gudang, Penggilingan beras, Fasilitas pembuat pupuk organic, dll.

Dengan adanya JA Cooperative beberapa peran penting dan crucial bagi petani telah diatasi terutama untuk pemasaran. JA Cooperative memberikan jaminan semua produk petani terjual dengan harga diatas rata-rata dan tentu saja ini memakmurkan petani.

Pada prinsipnya terdapat tiga alternative distribusi dan pemasaran produk yang ditawarkan JA Cooperative untuk para produser (petani), yaitu: 1) Produk dibeli langsung oleh JA Cooperative dengan harga di atas harga pasar (khususnya produk tertentu yang dianggap vital); 2) Petani dapat mendistribusikan sendiri namun melalui petunjuk (advise) dari JA Cooperative (biasanya petani ingin mencari buyer yang lebih tinggi lagi dari JA Coop.); 3) Petani dapat menitipkan produk mereka kepada JA Coop. untuk dijualkan oleh JA Coop. (biasanya perlu waktu agak lama dan hanya untuk produk-produk yang tidak terlalu penting).

7.3 Ringkasan

Usahatani yang modern, memerlukan teknologi yang selalu berkembang, yaitu teknologi yang dapat:

- a. Menaikkan produksi,
- b. Menurunkan biaya produksi,
- c. Mengurangi atau meniadakan kerugian-kerugian yang ditimbulkan oleh hama dan penyakit tanaman dan lain-lain gangguan, mengatasi kekurangan tenaga kerja yang terjadi pada musim-musim dan puncak-puncak pekerjaan-pekerjaan tertentu selama proses produksinya,
- d. Memperingan tugas-tugas petani, dan juga dapat membantu meringankan pekerjaan-pekerjaan yang biasanya sukar dilakukan.

Usahatani yang modern, memerlukan ketrampilan, sarana produksi, alat-alat pertanian, dan kredit untuk dapat menerapkan teknologi yang selalu berkembang itu di dalam usahataniya.

Usahatani yang modern, juga memerlukan informasi harga dan analisis pasar, supaya dapat menentukan dengan tepat jenis tanaman yang harus diusahakan dan perbandingan faktor-faktor produksi yang harus digunakan. Untuk mengembangkan usahatani modern, akan memerlukan bantuan dari pihak luar, memerlukan "agri support" yang berupa penyuluhan, penyediaan sarana dan prasarana yang professional di bidang teknologi pertanian.

DAFTAR PUSTAKA

- Achyani, Sutanto, A., & Faliyanti, E. (2018). Increasing The Value of Commodities Organic Coffee Farmes in Srimenanti Village West Lampung. *Ethos: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 6(1), 11–18.
- Ali, & Afzal. (2012). Impact of global financial crisis on stock markets. *E3 Journal of Business Management and Economics*, 3(7), 275–282.
- Antu, E. S. (2016). Studi eksperimental sistem pengering biji jagung dengan metode natural convection untuk peningkatan kualitas produksi pertanian di Gorontalo. *Jurnal Energi Dan Manufaktur*, 9(1), 102–104.
- Arvianti, E. Y., & Abin, S. (2018). Karakteristik Petani Muda Agribisnis dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Alih Fungsi Lahan di Malang. *Jurnal Sosial Ekonomi Dan Kebijakan Pertanian*, 7(1), 10–18.
- Asaad, M. (2003). Peningkatan Produksi dan Pendapatan Usahatani Padi Sawah Pada Program Pengelolaan Tanaman Terpadu. *Jurnal Adabiyah*, 3(1), 1–8.
- Asmarantaka, R. W., Atmakusuma, J., Muflikh, Y. N., & Rosiana, N. (2017a). Konsep Pemasaran Agribisnis: Pendekatan Ekonomi dan Manajemen. *Jurnal Agribisnis Indonesia*, 5(2), 151–172.
- Asmarantaka, R. W., Atmakusuma, J., Muflikh, Y. N., & Rosiana, N. (2017b). Konsep Pemasaran Agribisnis: Pendekatan Ekonomi dan Manajemen. *Jurnal Agribisnis Indonesia*, 5(2), 143–164.

- Asmin, F. (2018). Budaya dan Pembangunan Ekonomi : Sebuah Kajian terhadap Artikel Chavoshbashi dan Kawan-Kawan. *Jurnal Studi Komunikasi*, 2(7), 190–212. <https://doi.org/10.25139/jsk.v2i2.516>
- Ayu, K., Prahastha, N., & Budi, E. (2014). Pengembangan Komoditas Unggulan Sektor Pertanian Tanaman Pangan di Kabupaten Karangasem Melalui Pendekatan Agribisnis. *Jurnal Teknik Pomits*, 3(2), 184–189.
- Bacidore, J.M., Boquist, J.A., Milbourn, T. T., & Thakor, A. V. (2017). The Search for the Best Financial Performance Measure. *Financial Analysts Journal*, 1(1), 11–20.
- Chen, S., & Dodd, J. L. (2017). Economic Value Added (EVA): An Empirical Examination of New Corporate Measure. *Journal Managerial Issue (Fall)*, 3(2), 34–45.
- Daniar, G. R., Ali, B., & Nugroho, E. (2012). Persepsi dan minat pemuda terhadap agribisnis sapi Madura (Studi di Kecamatan Waru, Kabupaten Pamekasan). *Jurnal Ilmu-Ilmu Peternakan*, 24(3), 69–78.
- Darwanto, D. H. (2017). Peranan Irigasi Pertanian Dalam Peningkatan Produksi dan Pendapatan Petani (2nd ed.). Medan: CV Jejak.
- Dewani, A. P., Boer, R., & Jannah, N. (2014). Analisis Jejak Karbon Agribisnis Sawit Untuk Menyusun Arah Strategi dan Program Corporate Social Responsibility (CSR). *Jurnal Pengelolaan Sumber Daya Alam Dan Lingkungan*, 4(1), 96–104.
- Dewi, N. K., & Rudianto, I. (2013). Identifikasi Alih Fungsi Lahan Pertanian dan Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Daerah Pinggiran di Kecamatan Gunungpati Kota Semarang. *Jurnal Wilayah Dan Lingkungan*, 1(2), 175–188.

- Dewi, N. L. P. R., Utama, M. S., & Yuliarmi, N. N. (2017). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Produktivitas Usahatani dan Keberhasilan Program Simantri di Kabupaten Klungkung. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 6(2), 701–728.
- Djoni, & Rohman, M. (2010). Pemahaman Petani dalam Menerapkan Prinsip 5-C Kaitanya dengan Pengembalian Kredit Bidang Agribisnis. *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 14(2), 345–361.
- Elizabeth, R. (2017). Fenomena Sosiologis Metamorphosis Petani: Ke Arah Keberpihakan Pada Masyarakat Petani di Pedesaan yang Terpinggiran Terkait Konsep Ekonomi Kerakyatan. *Forum Penelitian Agro Ekonomi*, 25(1), 29–42.
- Erviyana, P. (2014). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Produksi Tanaman Pangan Jagung di Indonesia. *JEJAK: Journal of Economic and Policy*, 7(2), 195–202. <https://doi.org/10.15294/jejak.v7i1.3596>
- Fariyanti, A. (2016). Ruang Lingkup Manajemen Keuangan Pertanian. Jakarta Selatan: Basic Books.
- Hariadi, S. S. (2011). Development of Structural Equation Models in the Field of Agricultural Socio Economics. *Agro Ekonomi*, 2(1), 34–40.
- Harney, M., & Tower, R. (2013). Predicting Equity Returns Using Tobin's q and Price Earning Ratios. *The Journal of Investing*, 12(3), 58–70.
- Hayati, N., & Nugroho, T. R. D. A. (2018). Jurnal Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian. *Jurnal Sosial Ekonomi Dan Kebijakan Pertanian*, 7(1), 1–9.

- Hermawan, H., & Andrianyta, H. (2016). Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis: Terobosan Penguatan Kelembagaan dan Pembiayaan Pertanian di Perdesaan. *Jurnal Kebijakan Pertanian*, 10(2), 143–158. <https://doi.org/10.21082/akp.v10n2.2012.143-158>
- Husaini, M. (2012). Karakteristik Sosial Ekonomi Rumah Tangga dan Tingkat Ketahanan Pangan Rumah Tangga Petani di Kabupaten Barito Kuala. *Jurnal Agribisnis Pedesaan*, 02(4), 320–332.
- Indarti, S., Luthfi, A., & Kismini, E. (2016). Transformasi pertanian dan diferensiasi sosial ekonomi petani di desa kunir kecamatan sulang kabupaten rembang. *SOLIDARITY*, 5(1), 1–10.
- Irham, & Mariyono, J. (2001). Perubahan Cara Pengambilan Keputusan oleh Petani Pengendalian Hama Terpadu (PHT) dalam Menggunakan Pestisida Kimia Pada Padi. *Manusia Dan Lingkungan*, 8(2), 91–97.
- Ismail. (2011). The ability of EVA attributes in Predicting Company Performance. *African of Business Management*, 5(12), 4993–5000.
- Janor, H., Rahim, R. A., Yaacob, M. H., & Ibrahim. (2012). Stock Returns and Inflation with Supply and Demand Shocks: Evidence from Malaysia. *Jurnal Ekonomi Malaysia*, 4(4), 5–10.
- Junaedi, D., Setyawan, A. A., & Soepatini. (2016). Sikap Konsumen Terhadap Produk Bundling Agribisnis. *DAYA SAING: Jurnal Ekonomi Manajemen Sumber Daya*, 18(1), 1–9.

- Kasto. (2015). Karakteristik Demografi Sosial dan Ekonomi Sumber Daya Pemuda Indonesia. *Jurnal Populasi*, 6(1), 1–18.
- Kurniadi, A., Achsani, N. A., & Sasongko, H. (2014). Kinerja keuangan berbasis penciptaan nilai, faktor makroekonomi, dan return saham sektor pertanian. *Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan*, 16(2), 141–152. <https://doi.org/10.9744/jmk.16.2.141>
- Kurniati, E. D. (2014). Pengaruh Karakteristik Manajer-Pemilik Usaha, Karakteristik Organisasi dan Lingkungan Eksternal Terhadap Kapasitas Inovasi dan Kinerja Usaha. *Jurnal Organisasi Dan Manajemen*, 10(2), 124–135.
- Marphy, T. M., & Priminingtyas, D. N. (2019). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Partisipasi Petani Dalam Program Asuransi Usahatani Padi (AOTP) di Desa Watugede , Kecamatan Singosari , Kabupaten Malang
Analysis of Factors Affecting Level of Farmers Participation in Insurance For Paddy Farming (AOTP) Program in Watugede Village , Singosari Subdistrict of Malang Regency. 30(2), 62–70. <https://doi.org/10.21776/ub.habitat.2019.030.2.8>
- Maswadi. (2017). Analisis Hubungan Antara Luas Panen Produksi Tenaga Kerja Pertanian Terhadap PFRB Di Kota Pontianak. *Journal Social Economic of Agriculture*, 6(3), 9–15.
- Maulida, S., & Yunani, A. (2017). Masalah dan Solusi Model Pengembangan Pembiayaan Pertanian dari Aspek Keuangan Syari ' ah. *Cakrawala: Jurnal Studia Islam*, 12(2), 91–100.

- Maulidah, S. (2018). *Manajemen Pemasaran dan Distribusi Produk Agribisnis* (1st ed.). Malang: Universitas Brawijaya Press.
- Muta'ali, L. (2004). Kajian Eksistensi Wanita Tani di Daerah Perkotaan Studi Kasus Pengaruh Alih Fungsi Lahan Pertanian Terhadap Perubahan Kondisi Sosial Ekonomi dan Peran Wanita Tani di Kota Yogyakarta. *Majalah Geografi Indonesia*, 18(1), 15–30.
- Nachrowi, D., & Usman, H. (2006). *Ekonometrika Untuk Analisis Ekonomi dan Keuangan* (1st ed.). Depok: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Nirzalin, & Maliati, N. (2017). Produktivitas Pertanian dan Involusi Kesejahteraan Petani: Studi Kasus di Meunasah Pinto Aceh Utara. *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 8(2), 106–119.
- Nuraedah. (2018). Masyarakat dan perubahan sosial petani padi di kecamatan balinggi. *KINESIK*, 5(3), 98–105.
- Nurif, M., & Mukhtar, S. (2010). Pembangunan Ekonomi Berbasis Agribisnis Sebagai Wujud dari Pembangunan Ekonomi yang Berkelanjutan. *Jurnal Sosial Humaniorah*, 3(2), 124–138.
- Olivya, M., & Ilham. (2018). Sistem Informasi Pemasaran Hasil Pertanian Berbasis Android. *Jurnal Inspiraton*, 7(1), 60–69. <https://doi.org/10.35585/inspir.v7i1.2437>
- Padmaningrum, D., & Wibowo, A. (2010). Kajian Kelembagaan Agribisnis Wortel Untuk Mendukung Pengembangan Kawasan Agropolitan Suthomadansih Area Karanganyar Regency. *Cakra Tani*, 27(1), 87–94.

- Paungdrianagari, S. A., Setyowati, N., & Qonita, A. (2019). Strategi Pengembangan Agribisnis Buah Naga Organik. *Jurnal Adabiyah*, 8(2), 55–66.
- Prabowo, E. S., Wijayanti, T., & Saddaruddin. (2018). Analisis Hubungan Faktor Sosial Ekonomi Petani Terhadap Pengetahuan Budidaya Pertanian Organik Padi Sawah (*Oryza sativa* L.) di Kelurahan Makroman Kecamatan Sambutan. *Jurnal Pertanian Terpadu*, 6(2), 88–95.
- Prihadi, S. (2000). Kemampuan Produksi Sapi Jantan Friesian Holstein Sebagai Ternak Potong dengan Pakan Limbah Pertanian (1st ed.). Palangkaraya: Media Perkasa.
- Purnama, H., Hadayati, N., & Setyowati, E. (2015). Pengembangan Produksi Pestisida Alami Dari *Beauveria Bassiana* dan *Trichoderma* Sp. Menuju Pertanian Organik. *Jurnal WARTA*, 18(1), 1–9.
- Purwanto, H. (2009). Teknologi Hasil Pangan. *Mediagro*, 5(1), 15–19.
- Putri, E. I. K., Pandjaitan, N. K., Dharmawan, A. H., & Amalia, R. (2016). Dampak Variabelitas Iklim dan Mekanisme Adaptif Masyarakat Petani di Kawasan Beriklim Kering: Kasus Desa Boronubean dan Desa Taunbean Tumur, Kabupaten Timor Tengah Utara, NTT. *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 8(1), 1–6.
- Raharjo, A. E., Muta'ali, L., Hardoyo, S. R., Sudrajat, & Harini, R. (2014). Dampak Konservasi Lahan Terhadap Lingkungan Lahan Pertanian dan Strategi Adaptasi Petani di Kecamatan Mejayan, Madiun. *Majalah Geografi Indonesia*, 28(2), 103–113.
- Raka, I. G. N. (2016). Bahan Ajar Pengantar Ilmu Pertanian : Tata Niaga Pertanian (2nd ed.). Denpasar: Universitas Udayana.

- Rijanta. (2013). Perkembangan Kondisi Demografi dan Sosial-Ekonomi di Kotamadra Yogyakarta Beseta Implikasinya untuk Pengembangan Fasilitas Kota. *Forum Geografi*, 1(13), 42–52.
- Setiawan, I., Satria, A., & Tjitropranoto, P. (2019). Strategi Pengembangan Kemandirian Pelaku Muda Agribisnis “Brain Gain Actors” di Jawa Barat. *MIMBAR*, 31(2), 409–418.
- Sulistiyodewi Nur Wiyono, Utami, H. N., & Karyani, T. (2017). Penciptaan Nilai Fungsi Bisnis: Suatu Konsep Pemberdayaan Agribisnis. *Ethos: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 5(2), 327–336.
- Sumastuti, E. (2004). Prospek pengembangan agribisnis dalam mewujudkan ketahanan pangan. *Prospek Pengembangan Agribisnis*, 4(2), 154–161.
- Sundari, Yusra, A. H. A., & Nurliza. (2015). Peran Penyuluhan Pertanian Terhadap Peningkatan Produksi UsahaTani di Kabupaten Pontianak. *Journal Social Economic of Agriculture*, 4(April), 26–31.
- Supuwingsih, N. N. (2018). Peramalan Jumlah Produksi Hasil Pertanian di Denpasar Utara Menggunakan Bahasa Script Avenue GIS. *TELEMATIKA*, 15(01), 39–45.
- Suroso, A. I., Marimin, & Maharani, I. G. A. I. (2015). Pengembangan Terminal Agribisnis Virtual Berbasis Web. *Jurnal Manajemen & Agribisnis*, 2(1), 17–28.
- Susmiati, Y. (2018). The Prospect of Bioethanol Production from Agricultural Waste and Organic Waste. *Industria: Jurnal Teknologi Dan Manajemen Agroindustri*, 7(2), 67–80.

- Syahza, A. (2013). Paradigma Baru: Pemasaran Produk Pertanian Berbasis Agribisnis di Daerah Riau. *Jurnal Ekonomi*, 1(4), 1–11.
- Talundu, J. F. (2015). Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Petani Sawah di Desa Tanah Harapan Kecamatan Palolo Kabupaten Sigi. *E-Journal Profi Pendidikan Geografi FKIP UNTAD*, 1(1), 1–13.
- Ulfani, D. H., Martianto, D., & Baliwati, Y. F. (2011). Faktor-Faktor Sosial Ekonomi dan Kesehatan Masyarakat Kaitanya dengan Masalah Gizi Underweight, Stunted, dan Wasted di Indonesia: Pendekatan Ekologi Gizi. *Journal of Nutrition and Food*, 6(1), 59–65.
- Widiana, & Annisa, A. A. (2017). Menilik Urgensi Penerapan Pembiayaan Akad Salam pada Bidang Pertanian di Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 8(2), 88–101.
- Widiatningrum, T., & Pukan, K. (2010). Caulifl ower (*Brassica oleracea* var *botrytis*) Growth and Production by Organic Farming System at Lowland Climate. *Biosaintifika*, 2(2), 115–121.
- Wiranto, S. (2018). Aspek Sosoal Ekonomi Masyarakat Petani Bandung. *Jurnal Agribisnis*, 7(April), 30–40.
- Wonogiri, D. I. K. (2019). Strategi Pengembangan Agribisnis Buah Naga Organik. *Jurnal Adabiyah*, 8(2), 55–66.
- Yusra, A. H. A., Irham, Hartono, S., & Waluyati, L. R. (2018). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Produksi Padi dan Daya Dukung Lahan Pertanian di Kawasan Perbatasan Kabupaten Sambas. *Journal Social Economic of Agriculture*, 7(2015), 75–84.

Zulnadi, & Syafri, E. (2015). Upaya Peningkatan Produksi Kapur Pertanian Masyarakat Nagari Sitanang-Halaban Kabupaten Lima Puluh Kota. *Jurnal Teknologi Pertanian Andalas*, 19(2), 45–50.

GLOSARIUM

Alat Saprodi adalah alat yang dapat digunakan secara terus menerus dan sebagai alat pendukung dalam menjalankan tahapan pelaksanaan usaha pertanian.

Depresi adalah periode kegiatan ekonomi sangat rendah dengan tingkat pengangguran yang tinggi dan kelebihan kapasitas yang tinggi.

Kepuasan adalah manfaat yang diberikan sesuatu produk sesuai dengan yang diharapkan atau didambakan pelanggan, baik secara fungsional dan emosional.

Keuangan adalah kata yang menggambarkan ketersediaan sumber daya uang baik untuk pemerintah, perusahaan atau individu maupun manajemen dari semua sumber daya.

Marketing adalah semua kegiatan aktivitas untuk memperlancar arus barang/jasa dari produsen ke konsumen secara paling efisien dengan maksud untuk menciptakan permintaan efektif.

Nilai Intrinsik adalah nilai yang tidak memperhatikan manfaat dan bahayanya.

Padi Gogo adalah padi yang diusahakan di tanah tegalan kering secara menetap.

Padi Sawah adalah padi yang ditanam di sawah dengan pengairannya sepanjang musim atau setiap saat.

Pasar adalah tempat atau media yang diperlukan untuk terjadinya transaksi antara penjual dan pembeli.

Pemasar adalah seseorang yang mencari sumberdaya dari orang lain dan bersedia menawarkan sesuatu yang bernilai sebagai imbalannya.

Pemasaran adalah aktivitas-aktivitas dimana badan usaha melakukan promosi untuk menyampaikan barang dan jasa antara perusahaan dan masyarakat.

Pemasaran Pertanian adalah serangkaian kegiatan ekonomi berturut-turut yang terjadi selama perjalanan komoditi hasil-hasil pertanian mulai dari produsen primer sampai ke tangan konsumen.

Pemuda adalah aset nasional yang memerlukan penanganan secara baik dan hati-hati karena di tangan pemudalah pembangunan diharapkan akan diteruskan

Pertanian adalah sejenis proses produksi khas yang didasarkan atas proses pertumbuhan tanaman dan hewan.

Pertukaran adalah tindakan untuk memperoleh produk yang dikehendaki dari seseorang dengan menawarkan suatu yang lain sebagai balasannya.

Produk adalah sesuatu yang dapat ditawarkan kepada seseorang untuk memuaskan suatu kebutuhan atau keinginan.

Produk Marginal adalah tambahan produksi yang diperoleh sebagai akibat dari adanya penambahan kuantitas faktor produksi yang dipergunakan.

Produksi adalah hubungan antara faktor- faktor produksi yang disebut input dengan hasil produksi yang disebut output.

Program Bimas adalah kegiatan pendampingan kepada para petani melalui aktivitas penyuluhan pertanian.

Pupuk adalah material yang ditambahkan pada media tanam atau tanaman untuk mencukupi kebutuhan hara yang diperlukan tanaman sehingga mampu berproduksi dengan baik.

Sistem Penghidupan (*Livelihood System*) adalah kumpulan dari strategi nafkah yang dibentuk oleh individu, kelompok maupun masyarakat di suatu lokalitas.

Tataniaga adalah semua kegiatan bisnis yang terlibat dalam arus barang dan jasa dari titik produksi hingga barang dan jasa tersebut ada di tangan konsumen.

INDEKS

A

agribisnis · 5, 13, 33, 34, 40, 43, 44,
60, 63, 64, 67, 79, 80, 82, 114, 123,
124, 136, 149, 154
agroekosistem · 2, 9, 84
antropologis · 6
Arfak · 10

B

beras · 3, 37, 38, 48, 49, 50, 51, 53,
54, 55, 56, 58, 59, 84, 89, 93, 101,
102, 145
Bimas · 2, 158

E

ekonomi · i, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 23, 24,
25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33,
39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48,
51, 55, 60, 63, 64, 65, 67, 71, 73,
77, 78, 79, 80, 81, 84, 87, 89, 90,
105, 108, 109, 112, 123, 124, 131,
136, 137, 138, 139, 143, 151, 157
eksploitasi · 3, 34

H

harga · 12, 14, 18, 38, 49, 50, 54, 55,
56, 59, 62, 67, 69, 70, 74, 76, 77,
86, 91, 92, 97, 99, 118, 120, 134,
146, 147

I

impor · 12, 20, 34, 47, 48, 49, 50, 53,
58, 97, 102, 104, 105
Indonesia · 1, 2, 3, 4, 20, 21, 24, 26,
31, 39, 48, 51, 53, 55, 56, 57, 59,
77, 84, 85, 89, 92, 93, 94, 95, 98,
101, 102, 103, 105, 110, 111, 112,
113, 137, 141, 142, 144, 148, 150,
151, 152, 154, 155
irigasi · 6, 38, 87, 90

K

kesejahteraan · 14, 26, 27, 28, 29, 33,
48, 79, 84, 85, 105, 106, 107, 110,
111, 112, 113, 120, 137, 139
komoditas · 2, 39, 63, 80, 102
konsumsi · 12, 31, 42, 45, 49, 61, 74,
80, 85, 101, 102, 135

L

lahan · 1, 2, 3, 4, 9, 13, 19, 23, 34, 38,
39, 47, 50, 52, 53, 57, 81, 84, 87,
88, 89, 93, 95, 96, 98, 101, 105,
106, 109, 110, 111, 112, 126, 127,
140, 143

M

metamorphosis · 6

P

paradigma · 1
pasar · 1, 3, 6, 28, 43, 44, 48, 49, 50,
54, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 68, 72,
73, 76, 78, 91, 97, 108, 117, 118,
119, 124, 127, 134, 136, 138, 145,
146, 147
pedesaan · 1, 2, 3, 4, 6, 33, 34, 55, 56,
78, 80, 82, 89, 101, 107, 110, 112
pemerintah · 3, 10, 12, 16, 18, 19, 20,
45, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 58, 59,
78, 85, 86, 95, 97, 101, 102, 103,
104, 105, 106, 107, 112, 118, 136,
144, 145, 157
penawaran · 12, 14, 44, 77, 117, 118
permintaan · 12, 14, 44, 48, 70, 74,
76, 97, 101, 117, 118, 127, 138,
157
persaingan · 14, 62, 65, 68, 71, 84,
138
pertanian · i, 1, 2, 3, 5, 6, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 17, 25, 33, 34, 36, 37,
38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47,
48, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58,
60, 63, 64, 65, 67, 71, 72, 73, 74,
75, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84,
86, 88, 90, 91, 92, 95, 96, 97, 99,
100, 101, 102, 103, 104, 105, 106,
107, 109, 110, 111, 112, 117, 118,
121, 122, 123, 124, 127, 128, 129,
130, 135, 136, 137, 138, 139, 140,
142, 143, 144, 145, 147, 148, 151,
157, 158
pertukaran · 12, 64, 75, 76
petani · 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 33, 34, 37, 38, 43, 44, 45, 46,
49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57,
58, 59, 61, 67, 68, 74, 75, 77, 78,

79, 80, 81, 82, 84, 85, 86, 87, 88,
89, 91, 92, 93, 96, 97, 98, 99, 101,
102, 104, 105, 106, 107, 108, 109,
110, 111, 112, 135, 136, 137, 139,
142, 144, 145, 146, 151, 152, 158
polarisasi · 3
produk-produk · 12, 15, 44, 45, 47, 57,
63, 68, 142, 146
PUAP · 10
pupuk · 2, 46, 52, 53, 85, 86, 88, 91,
96, 97, 98, 99, 102, 107, 116, 124,
135, 145

R

revolusi · 2, 29, 51, 109, 139
rumah tangga · 5, 17, 23, 51, 103,
111, 112

S

sumberdaya · 5, 9, 77, 78, 82, 86, 89,
90, 93, 108, 109, 112, 139, 143,
157

T

tradisional · 4, 5, 7, 15, 120

U

usahatani · 4, 5, 8, 9, 33, 36, 37, 38,
39, 45, 60, 61, 65, 73, 81, 82, 87,
88, 91, 92, 97, 98, 123, 124, 135,
136, 137, 139, 144, 145, 147

TENTANG PENULIS



Cakti Indra Gunawan, SE., MM., Ph.D dilahirkan di Purwokerto Kabupaten Banyumas Propinsi Jawa Tengah pada tanggal 14 Mei 1971. Penulis dilahirkan oleh seorang ibu yang hebat bernama Rr. Sri Redjeki dan Ayah yang bijaksana bernama Mino. Penulis menempuh pendidikan S1 dan S2 di Universitas Brawijaya bidang manajemen dan S3 di the University of New England, Australia bidang manajemen.

Penulis adalah Dekan Sekolah Pascasarjana Universitas Tribhuwana Tungadewi Malang dan telah menghasilkan lebih dari 22 buku nasional dan internasional. Penulis mendapatkan penghargaan dari Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Pendidikan Tinggi (DIKTI) untuk kategori dosen penerima Insentif Buku Ajar tahun 2015 dan Hibah buku ajar tahun 2017. Penulis juga mendapatkan hibah penelitian Dikti tahun 2017 dan 2018.

Cakti telah menjadi dosen selama 21 tahun dan telah membantu mengajar puluhan ribu mahasiswa S1 dan S2; dan pernah menjadi dosen luar biasa di Universitas Brawijaya, Universitas Muhammadiyah Malang, Universitas Terbuka, Universitas Jenderal Soedirman. Penulis juga menjadi motivator

menulis buku bagi dosen se-Indonesia dan diundang di Universitas Lambung Mangkurat, Universitas Negeri Padang, Poltekkes Jambi, Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, Poltekkes dr Soepraoen dan kampus lainnya di Indonesia.

Kemampuan orasi dan presentasi, membawa penulis menjadi pembicara di dalam dan luar negeri baik konferensi nasional dan internasional bidang manajemen dan ekonomi. Penulis pernah menjadi pembicara di the University of New England, the University of New Castle, National University of Singapore, The University of Western Sydney dan the Australian National University.

Penulis adalah pendiri Lembaga Intelektual Solusi Indonesia (LISI) yang bertujuan untuk memberikan solusi permasalahan bangsa berupa naskah akademis kepada pemerintah. Penulis juga merupakan pendiri dan direktur International Research and Development for Human Beings (IRDH), yaitu lembaga yang bergerak di bidang penerbitan buku dan penelitian.

Cita-citanya membantu negara dan membarakan semangat sumberdaya manusia (SDM) unggul menuju Indonesia menjadi negara terkuat di dunia tahun 2045 berbasiskan Pancasila dan Cinta Tanah Air. Untuk menghubungi penulis di email: pancasilacakti@gmail.com



Karunia Setyowati Suroto, S.Pt., M.P.,

anak bungsu dari dua bersaudara yang dilahirkan di Malang 25 Mei 1987. Perjalanan Akademik Sarjana S1 diselesaikan pada tahun 2009 yang ditempuh di Fakultas Peternakan Program Studi Sosial Ekonomi Peternakan

Universitas Brawijaya Malang, kemudian dilanjutkan dengan program Magister S2 Pertanian yang diselesaikan pada tahun 2013 Program Studi Ilmu Ternak di Universitas Brawijaya Malang.

Perjalanan karir penulis sepenuhnya disumbangkan untuk mengabdikan sebagai Dosen Tetap di Fakultas Pertanian Universitas Tribhuwana Tunggaladewi Malang dan pada tahun 2019 mendapatkan amanah untuk menjabat sebagai Wakil Dekan Sekolah Pascasarjana Universitas Tribhuwana Tunggaladewi Malang.

Karya ilmiah yang Fenomenal telah menulis artikel ilmiah dan publikasi dalam Jurnal Internasional dengan judul "The Transformation of Family's Socio-Economic to the Diversity of Agribusiness-Based Food Consumption Pattern", Penulis tergabung dalam Ikatan Sarjana Peternakan Indonesia (ISPI) dimulai pada tahun 2016 sampai sekarang, dan berperan aktif dalam pengembangan ilmu Peternakan Di Indonesia.



Anung Prasetyo Nugroho, SE.,MMA. yang dilahirkan di Magetan 3 Desember 1971 pada tahun 1995 telah menyelesaikan studi S1 yang ditempuh di Fakultas Ekonomi Universitas Merdeka Malang. Kemudian dilanjutkan dengan studi Magister S2 Manajemen Agribisnis yang diselesaikan pada tahun 2010 di Universitas Tribhuwana Tungadewi Malang.

Dalam perjalanan karirnya penulis mengabdikan diri sebagai Dosen di Universitas Tribhuwana Tungadewi Malang mulai tahun 2004.

Selama ini penulis aktif mengembangkan ilmu dibidang Sosial Ekonomi berupa karya ilmiah yang di publikasikan dalam Jurnal Nasional maupun Internasional. Dan salah satu artikel yang fenomenal adalah “The relationships of Reputation, Advertisement Attractiveness, Community Effect with Customer Value and Positive Words of Mouth of Bear Brand Milk Consumers in Malang” yang di publikasikan dalam media The International Journal of Management, Accounting and Economics.

Dalam pengabdianya di lingkungan pendidikan, penulis mendapatkan kepercayaan untuk mengemban jabatan structural sebagai Ketua Lembaga Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (LPTIK) mulai 2019 sampai dengan sekarang.